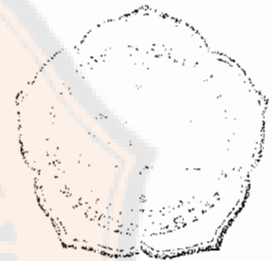


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**



DISUSUN OLEH:

RAPINUS RAIS

NIM: 971314007

NIRM: 970051120604120042

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2002

SKRIPSI

DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

DISUSUN OLEH:

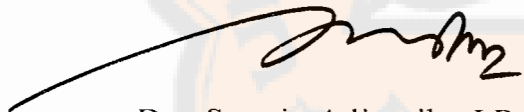
RAPINUS RAIS

NIM: 971314007

NIRM: 970051120604120042

Telah Disetujui:

Pembimbing I



Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R

Tanggal, 21/9/2002

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

Tanggal, 21/9 /2002

SKRIPSI

DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

RAPINUS RAIS

NIM: 971314007

NIRM: 970051120604120042

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal: 28-9-2002

dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota :
1. Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.

2. Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

3. Drs. A. A. Padi

Yogyakarta 28/9/2002

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta



Dj. A.M. Slamet Soewardi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN PERSEMBAHAN

*Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu.
Kesuksesan milik anda, milik saya, dan milik siapa
saja yang benar-benar menyadari, menginginkan
dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. (andrie
wongso)*

*Jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah)-
(Soekarno)*

*Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan
ikutilah jalan pengertian (amsal : 9:6)*

*Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan
karena kenyataan berada pada kenyataan itu
sendiri maka jangan terlalu banyak berharap.
(rapinus rais)*

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- 1). Povo Timor Lorosae*
- 2). Ayah (alm) dan Ibuku*
- 3). Kesebelas Saudaraku*
- 4). Seluruh keluarga besar Pang Maran*
- 5). Panitia Beasiswa Keuskupan Ketapang*
- 7). Si buah hatiku Agnes Aristiani*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18/10/2002

Penulis,



Rapius Rais



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

OLEH: RAPINUS RAIS

NIM: 971314007

NIM: 970051120604120042

Skripsi ini bertujuan untuk membahas empat permasalahan. Pertama, latar belakang integrasi Timor Timur tahun 1976. Kedua, tentang keadaan politik, sosial, pendidikan dan agama di Timor Timur antara tahun 1976-1999. Ketiga, tentang proses disintegrasi Timor Timur 1999. Dan keempat, tentang dampak disintegrasi tahun 1999 bagi Indonesia dan bagi Timor Lorosae.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu: pertama, pengumpulan sumber (heuristik) diperoleh dari sumber kepustakaan dan kliping koran, kedua, kritik sumber (verivikasi) dengan melakukan perbandingan antara sumber-sumber yang ada. Jika data telah menunjukkan kesesuaian maka dipilih sebagai sumber, ketiga, interpretasi (penafsiran sumber) merupakan analisa data hasil verivikasi dan, keempat, historiografi (penulisan sejarah) untuk menyajikan hasil penelitian menjadi satu tulisan sejarah sehingga dapat mempermudah penyampaian peristiwa kepada pembaca. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial seperti politik, sosiologi dan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, integrasi Timor Timur 1976 terjadi karena adanya keinginan dari empat partai politik yang dituangkan dalam Deklarasi Balibo. Kedua, keadaan Timor Timur selama bernaung dengan NKRI secara politik, masalah Timor Timur mengganjal di forum PBB dan rakyat Timor Timur hidup dalam situasi kadang-kadang tenang kadang-kadang perang, penuh teror, dan intimidasi. Secara sosial telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Timor Timur. Secara pendidikan, antara lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Dan keadaan agama, telah terjadi pelecehan terhadap agama tertentu di Timor Timur. Ketiga, terjadinya disintegrasi 1999 sebabnya adalah adanya opsi yang dikeluarkan oleh presiden B.J Habibie. Dan keempat, disintegrasi Timor Timur 1999 masih menyisakan masalah yang pelik antara kedua negara baik masalah politik, ekonomi maupun sosial.

ABSTRACT

THE DISINTEGRATION OF EAST TIMOR 1999

By Rapius Rais

Student Number 971314007

Student Registered Number 970051120604120042

This research is carried out to expose four problems in relationship with the disintegration of East Timor in 1999. They are, first, the background of East Timor integration into Indonesia in 1976; second, the condition of social, political, education and religious life during the time of integration 1976-1999; third, the how and why the disintegration process of East Timor in 1999, and fourth, the impact of the disintegration.

This research is library research. Political, social and historical approaches are used in order to give clear and comprehensive explanation about the disintegration case. After collecting the data, the researcher then does data verification by making comparison towards the available data. The next step is the process of interpretation towards the data. The final is the presentation of the study in the model of historical writing.

In summary, there are some points of this research. Balibo declaration in 1976 where four parties on behalf of East Timor people declared their wish to integrate into Indonesia is considered as the base for integration. Part of Indonesian territory during 1976-1999, the area remained unstable politically as Indonesia failed to get international acknowledgement and support for final status of the integration. Human right violations in the province have drawn international protest and weakened Indonesian position in international forum.

In education sector, central government provided and improved education facilities but failed to give opportunities for employment. While, in religious aspect, the majority Catholic follower in the province felt threatened by another new growing religions in the area. The two factors have grown social problems for the people of East Timor.

The disintegration of East Timor in 1999 happened as Indonesian government failed to get final status of the integration at international level. It was also the fruit of policy of president B.J. Habibie then who offered option of freedom, ignoring the implementation of autonomy status first. The disintegration leaves problems of social, politics and economic for the two countries, Indonesia as well as the new country Timor Lorosae.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan anugerah, berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disintegrasi Timor Timur 1999”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana jurusan ilmu pengetahuan sosial program studi pendidikan sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini selesai tidak mungkin tanpa ada yang membimbing, mendukung, memberi bantuan dan perhatian. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan selaku Dosen Pembimbing I yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing dan memberikan koreksi yang bersifat membangun sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Bpk. Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang penuh perhatian, membimbing dan memberikan koreksi yang membangun hingga skripsi ini selesai dengan sempurna.
3. Ibu Dra. Theresia Sumini, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

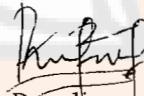
4. Para Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah banyak memberikan masukan sebagai bekal pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menempuh tugas belajar.
5. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas pinjaman buku-buku dari sejak kuliah hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang telah memberi ijin untuk membaca buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Panitia Beasiswa Keuskupan Ketapang yang memberikan dukungan baik secara moril, keuangan, arahan, bimbingan, dan kesempatan kepada penulis untuk studi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
8. Teman-teman Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta seperti Fuca, Romo Osharjo, Sr. Selia, Sr. Bertha (Wuriningsih), Sri Haryati, Anna, Muji Lestari, Vipin, Eka, Bowo, Adi, Andre, Longki, Budi, Eva, Dani, Ben, Redi, dan Hen (Takun) yang memberi motivasi untuk cepat-cepat lulus.
9. Bpk. Dwi U.D Laris Jaya dan Karyawan yang memberi sarana transportasi.
10. Kekasihku Agnes Aristiani yang setia menemani dalam suka dan duka disaat-saat kesibukan menyelesaikan tugas skripsi ini.
11. Teman-teman seperantauan seperti: Endi, Lusila Arnila, Pipensius, Bowo, Alosius, Sri, Edison, Marcelus, Marselina, Helan, Dwi, Joko yang memberi semangat. Dan teman-teman di Istana Laman Putra Kayong,

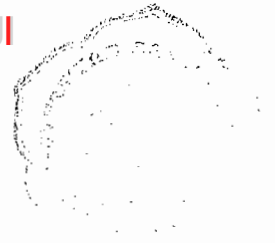
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bedayong, dan Asuhan PBS KK, Bang Alkap, Bang Ali Bata, Piao, Aan, Sisi, Lintuk, Yeni, Duri, Lilik, Yulie, Wiwik, Andi, Undai, Yudi, Yudhi, Ridom, Tain, Lakon, Tono, Agus Tono, Edi Susilo, Hadi, Nuki, Helarius, Poris, dan Niko yang dalam canda dan tawanya serta diskusi-diskusi ringan yang memberikan makna hidup bagi penulis.

Penulis juga berterima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut membantu penulis, namun tidak dapat disebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja yang menaruh minat terhadap masalah Timor Lorosae.

Yogyakarta, 28 September 2002.


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II INTEGRASI TIMOR TIMUR KE DALAM NKRI 1976.....	23
A. Kondisi Politik di Timor Timur Menjelang Integrasi.....	23
B. Munculnya partai-partai Politik di Timor Timur.....	27
1. Partai UDT (<i>Uniao Democratica Timor Lorosae</i>).....	29
2. FRETILIN (<i>Frente Revolusionaro de Timor Leste Independente</i>).....	31
3. APODETI (<i>Associacao Popular Democratica Timorenses</i>).....	37
4. Partai Politik Kecil Lainnya.....	40
C. Proklamasi Balibo.....	42
1. Latar Belakang Proklamasi Balibo.....	42
2. Perundingan Macao.....	44

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Perang Saudara 1975.....	47
4. Proklamasi Partai-partai Politik.....	49
a. Proklamasi Sepihak FRETILIN.....	50
b. Proklamasi Balibo.....	52
BAB III KEADAAN TIMOR TIMUR SELAMA DI BAWAH RI 1976-1999	55
A. Keadaan Politik.....	55
B. Keadaan Sosial.....	63
C. Keadaan Pendidikan.....	68
D. Keadaan Agama.....	72
BAB IV PROSES TERJADINYA DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999.	78
A. Timor Timur di Mata Dunia.....	78
1. Negara-negara Barat.....	78
a. Australia.....	78
b. Amerika Serikat.....	79
c. Jerman.....	80
d. Portugal.....	81
e. Vatikan.....	81
2. Negara-negara Afrika.....	82
a. Benin.....	82
b. Congo.....	82
c. Maroko.....	82
d. Mozambique.....	83
e. Guinea Bissau.....	83
3. Negara-negara Asia.....	84
a. India.....	84
b. Iran.....	84
c. Jepang.....	84
d. Malaysia.....	85
e. RRC.....	85
f. Kamboja.....	85
B. Timor Timur di Mata RI.....	86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Timor Timur di Mata Orang Timor Timur.....	88
D. Kebijakan Politik B.J. Habibie.....	90
E. Jajak Pendapat dan Hasilnya	94
BAB V DAMPAK DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999.....	99
A. Dampaknya Bagi Indonesia	99
1. Dampaknya Terhadap Politik.....	99
2. Dampaknya Terhadap Sosial ekonomi.....	102
B. Dampaknya Bagi Timor Lorosae	105
1. Dampak Terhadap Politik.....	105
2. Dampak Terhadap Sosial Ekonomi.....	107
BAB VI KESIMPULAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
A. Sumber Primer.....	113
B. Sumber Sekunder	114
LAMPIRAN	118

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timor Timur kini tinggal kenangan dalam sejarah bangsa Indonesia. Dua puluh tiga tahun lamanya Timor Timur menyatukan diri dengan bangsa Indonesia dan secara resmi menjadi bagian Indonesia yang dimasukkan dalam propinsi yang ke-27 tepatnya pada tahun 1976 yang lalu berdasarkan Deklarasi Balibo.

Timor Timur sebelumnya merupakan jajahan Portugis. Dan sudah barang tentu mayoritas penduduk Timor Timur menganut agama Katolik yang nota benanya Portugis yang menjajah Timor Timur beragama Katolik. Diduga pada awalnya Portugis datang ke Timor Timur berkisar tahun 1512-1515 dalam rangka pelayaran ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Timor Timur salah satu pulau di nusantara yang memiliki kayu cendana, madu dan lilin.¹

Orang Portugispun mulai menancapkan kekuasaannya di Timor Timur dengan mendirikan benteng pertahanan dan kapel untuk sembahyang. Kehadiran Portugis di Timor Timur telah menciptakan suatu masyarakat yang baru yang disebut dengan “Orang Tupas” (menurut ejaan Portugis Tupas) atau yang disebut Belanda “Portugis Hitam”. Mereka ini adalah keturunan pengikut Portugis Hitam yaitu bekas budak, pembantu pedagang dan lain-lain yang berasal dari tempat pemukiman Portugis di Afrika, India, Malaka dan sebagainya. Perkawinan campur dengan wanita pribumi sejak abad ke-16 dan kemudian perkawinan

¹ Lopian dan Chaniago, *Timor Timur Dalam Gerak Pembangunan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. hlm. 9

keturunannya dengan penduduk pribumi termasuk keluarga raja lokal, dan pada abad ke-17 dengan orang Eropa pelarian VOC dan sebagainya, telah membentuk suatu kelompok di Nusan Tenggara yang disebut dengan orang Tupas.² Tempat pijakan Portugis sebelum melebarkan sayapnya di Timor Timur adalah merebut pelabuhan Malaka 1511 dan dari Malaka inilah Portugis melakukan kunjungan tahunan ke Timor untuk mengangkut kayu cendana ke koloninya di Macao, pantai Tiongkok dan menjualnya kepada saudagar Cina. Mulai saat itulah Portugis menaruh perhatian kepada Timor yang lebih dilandasi karena kepentingan ekonomi. Kekayaan ekonomi Timor Timur dirampok selama 450 tahun lamanya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat setempat. Hal itu terus berjalan sampai pada akhir runtuhnya kekuasaan monarkhi di Portugal.

Sudah 450 tahun lamanya Timor Timur menjadi jajahan Portugis tetapi tetap berada dalam posisi yang terbelakang baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Runtuhnya rejim monarki di Portugal, tanggal 5 Mei 1974 Jendral de Spinoza mengeluarkan pernyataan tentang partai politik. Seiring dengan pernyataan itu, berarti membawa angin segar bagi rakyat Timor Timur untuk melakukan demokrasi membangun negerinya. Di antara partai politik tersebut yang muncul adalah UDT(*Uniao Democratica Timorese*), FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Lorosae*) yang pada awalnya bernama ASDT (*Associacao Social Democratica Timorese, Perhimpunan Demokrasi Sosial Timor*) dan APODETI, (*Associacao Popular Democratica de Timor, Perhimpunan Demokrasi Kerakyatan*

² *ibid.* hlm. 11

Timor), dengan masing-masing kebijakan mempunyai tiga pilihan bagi masa depan Timor Timur sendiri. Kemerdekaan, melanjutkan sebagai bagian dari Portugal dan integrasi dengan Indonesia.³ Kemudian menyusul muncul partai politik kecil yakni KOTA dan TRABALHISTA yang mendukung langkah APODETI.

Ketiga partai politik yang besar larut dalam perjuang visi dan misi mereka masing-masing. Akibatnya muncul tindakan kekerasan yang menelan banyak korban nyawa manusia sampai pada akhirnya terjadi perang saudara di Timor Timur. FRETILIN yang lebih berhaluan kiri melakukan aksi sepihak dengan memproklamasikan berdirinya negara Republik Demokrasi Timor tanggal 28 November 1975. Partai politik yang lain menjadi objek teror anggota FRETILIN bahkan kekerasan merupakan salah satu jalan yang ditempuh anggota FRETILIN.

Karena FRETILIN melakukan kekerasan, maka partai politik lain tidak dapat berdiam diri. Partai UDT yang pada awalnya berkoalisi dengan FRETILIN menarik diri dan menyatakan bergabung dengan ketiga partai politik lainnya. Bahkan untuk mempertahankan diri mereka dari hantaman FRETILIN, maka UDT, APODETI KOTA dan TRABALHISTA menggunakan kekuatan bersenjata juga. Melihat bahwa aksi yang dilakukan oleh FRETILIN yang memproklamasikan negara Republik, maka UDT, APODETI, KOTA dan TRABALHISTA pada tanggal 30 November 1975 ganti memproklamasikan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia di Balibo.⁴ Para delegasi partai

³ Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Dili, Yayasan Hak dan Sahe Institute For Liberation, 2000, hlm.XI.

⁴ Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 165-166

politik kecuali FRETILIN, datang ke Jakarta dan minta kepada pemerintah RI untuk mengesahkan keinginan mereka. Pemerintah di Jakarta menggukuhkan keinginan mereka tersebut dengan TAP MPR VI / MPR / 1978.

Ada dua alasan mengapa RI mau menerima integrasi Timor Timur. Pertama karena faktor yang ditimbulkan dalam negeri sendiri yakni karena ada desakan dari empat delegasi politik Timor Timur yang datang ke Jakarta dan desakan dari parlemen Indonesia yang ditugasi ke Timor Timur untuk memantau keinginan dari masyarakat setempat. Karena desakan itulah pemerintah RI mengambil kebijakan untuk mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan TAP MPR VI / MPR / 1978. Keputusan itu diambil guna menghindari pelanggaran HAM akibat perang saudara di sana. Yang kedua karena faktor luar. Faktor itu adalah meluasnya pengaruh ideologi komunis di Asia yang dilakukan oleh FRETILIN. Sejak adanya deklarasi Balibo sebagai proklamasi tandingan, FRETILIN telah mengubah taktiknya yakni dengan menggalang diplomasi dengan Portugal dan perang gerilya. Ketakutan akan paham komunis tersebutlah yang membuat Indonesia segera menerima desakan gagasan dari ke empat partai politik yang menyatakan berintegrasi dengan Indonesia. Pemerintah Orde Baru sebetulnya trauma dengan apa yang pernah terjadi dalam negerinya akibat pemberontakan PKI baik pada tahun 1948 maupun tahun 1965.

Bergabungnya Timor Timur 1976 bersama Indonesia membuat pemerintah menaruh perhatian yang khusus terhadap Timor Timur. Timor Timur dibangunnya secara fisik dan non fisik. Gedung-gedung sekolah, kantor-kantor dan jalan raya serta fasilitas umum seperti rumah sakit dan poliklinik dibangun. Pada sisi lain

pemerintah pusat mengirim tenaga kerja, tenaga medis dan tenaga pendidik demi kemajuan di propinsi Timor Timur. Adanya perhatian yang sangat khusus dari pemerintah pusat membuat propinsi lain merasa iri melihat kemajuan yang diterima oleh masyarakat di Timor Timur.

Berintegrasinya Timor Timur yang dituangkan dalam TAP MPR VI/MPR/1978 itu, memunculkan beragam reaksi dari dunia luar dan dari masyarakat Timor Timur sendiri. Bagi masyarakat mayoritas Timor Timur kecuali FRETILIN, menyambut niat baik bangsa Indonesia yang telah memperhatikan keinginan dari mayoritas masyarakat Timor Timur bergabung dengan wadah Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang mereka sepakati dalam deklarasi Balibo.

Negara luar memandang kasus integrasi Timor Timur dengan Indonesia melalui dua sisi yang berbeda. Ada negara tertentu yang secara langsung menyatakan sikap setuju dan ada yang menyatakan sikap tidak setujunya. Mereka yang tidak setuju adalah mereka yang telah menganut dan terpengaruh paham ideologi komunis yang pro terhadap FRETILIN seperti RRC dan Kamboja untuk negara Asia, Guinea Bissau untuk negara Afrika dan Portugal serta Uni Soviet untuk negara Eropa.

Status integrasi semakin kokoh karena pemerintah pusat segera membangun daerah itu. Sudah banyak pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga rakyat Timor Timur sendiri mengakui dalam perayaan sepuluh tahun integrasi dengan NKRI kemajuan yang dicapai telah lebih

banyak daripada dalam 450 tahun dalam penjajahan Portugal. Hal itu nampak dalam penyusunan pemerintahan, pendidikan, perumahan dan kesehatan.⁵

Berintegrasinya Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berarti seluruh rakyat Timor Timur menghendaknya, tetapi juga ada juga rakyat di sana yang tidak menghendaki menyatu dengan NKRI. Salah satu masyarakat yang tidak menghendaki hal itu terjadi adalah mereka yang bergabung dalam sebuah partai politik yang bernama FRETILIN. Partai politik ini ingin memisahkan diri dari negara manapun dan berdiri sendiri. Awalnya partai politik ini bernama ASDT (*Perhimpunan Demokrasi Sosial Timor*) dan demi rakyat serta aspiratif berubah menjadi FRETILIN (*Revolusioner bagi kemerdekaan Timor*). Mereka inilah yang gencar memperjuangkan aspirasi mereka baik dengan bergriya melawan TNI maupun dengan cara berdiplomasi dengan negara internasional dan akhirnya keinginan mereka terwujud, di mana mereka memenangkan proses jajak pendapat yang dilaksanakan 30 Agustus 1999. Perjuangan FRETILIN secara gerilya inilah yang meyebabkan situasi keamanan di Timor Timur kadang-kadang tenang dan kadang-kadang perang.

Secara *de-facto* Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, namun secara *de-jure* Timor Timur sejauh ini oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.⁶

Dua puluh tiga tahun lamanya kedua belah pihak (TNI dan FRETILIN) melakukan kontak senjata. Dan tidak dapat dipungkiri selama itu telah terjadi

⁵ *ibid*, hlm. 167.

⁶ Gerry van Klinker, *Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur Kini dan Prospek Bagi Perdamaian*, Elsam, 1996, hlm. v.

pelanggaran HAM oleh ABRI dan FRETILIN, kesenjangan sosial dan serta pelecehan terhadap salah satu agama tertentu di Timor Timur. Puncak pelanggaran HAM yang terbesar dan terburuk sepanjang sejarah di Timor Timur adalah insiden Santa Cruz 12 November 1991. TNI menembak sekelompok orang Timor Timur saat mereka berjalan dari Gereja Montael ke pemakaman Santa Cruz di Dili untuk menaburkan bunga di makam. Kejadian berdarah itu merengut 271 orang tewas menurut data *Human Right Watch* dan 25 orang hilang, 382 orang luka-luka serta 362 orang ditangkap dalam peristiwa itu.⁷

Insiden Santa Cruz 1991 juga berdampak pada para investor luar negeri. Mereka mulai berfikir untuk menanamkan modalnya ke Indonesia jika kasus itu tidak diusut sampai tuntas dan situasi di Timor Timur belum tenang. Disamping itu keinginan untuk pergi berwisata ke Indonesia diurungkan dalam beberapa saat sampai pada kondisi di Indonesia khususnya Timor Timur kembali tenang. Reaksi pihak dunia luar secara nyata melakukan tindakannya adalah negara Amerika Serikat dan Belanda. Kedua negara ini segera menghentikan bantuan keuangannya dan bantuan persenjataan (khusus Amerika) untuk Indonesia. Secara umum dunia internasional mengutuk kejadian insiden Santa Cruz 1991. Insiden Santa Cruz dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM yang paling besar dalam pemerintahan Soeharto. Dampak insiden Santa Cruz itu sendiri bagi rakyat Timor Timur adalah telah menimbulkan sikap kebencian mereka terhadap aparat keamanan (TNI). Kejadian itu selalu terkenang dalam ingatan mereka dan tidak mudah bagi mereka yang menyaksikan untuk melupakannya. Insiden Santa Cruz 1991 juga semakin

⁷ F.C Zamora, Penyunting Gus Miclat, *Timor Timur Untuk Pemula*. Initiatives for International Dialog, 1997, hlm. 51.

menaikan semangat perjuangan mereka khususnya para FRETILIN untuk mewujudkan Timor Timur merdeka.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Disintegrasikan Timor Timur 1999” dipandang oleh peneliti belum ada yang menulisnya, sekiranya adapun tidak persis sama apa yang dikemukakan oleh peneliti. Bagi penulis sendiri sangat tertarik untuk menelusuri sejarah Timor Timur yang kini tinggal kenangan bagi kita. Mengapa Timor Timur dulu 1976 berintegrasi dengan Indonesia dan pada tahun 1999 yang lalu memilih berdiri sendiri daripada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penulisan ini. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana latar belakang integrasi Timor Timur ke dalam NKRI 1976 ?
2. Bagaimana keadaan Timor Timur selama bernaung dengan RI tahun 1976-1999?
3. Bagaimana proses terjadinya disintegrasi Timor Timur pada tahun 1999 ?
4. Bagaimana dampak terjadinya disintegrasi Timor Timur bagi Indonesia dan masyarakat Timor Timur sendiri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsi dan menganalisis bagaimana latar belakang terjadinya integrasi Timor Timur ke dalam NKRI 1976
2. Mendeskripsi dan menganalisis bagaimana keadaan Timor Timur selama bernaung dengan RI 1976-1999.
3. Mendiskripsi dan menganalisis bagaimana proses terjadinya disintegrasi Timor Timur 1999.
4. Mendiskripsikan dan menganalisis dampak disintegrasi bagi rakyat Timor Timur dan bagi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan disumbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana latar belakang integrasi Timor Timur 1976 dengan NKRI, keadaan Timor Timur selama bernaung bersama RI 1976-1999 dan proses terjadinya disintegrasi 1999 serta dampak terjadinya disintegrasi bagi Timor Timur sendiri dan Indonesia.
2. Bagi mahasiswa sejarah, adalah untuk memperkaya dan melengkapi perbendaharaan historiografi khususnya tentang Timor Timur.
3. Bagi peneliti sendiri adalah sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah.

E. Kajian Teori

Dalam penelitian ini yang berjudul “Disintegrasi Timor Timur 1999” merupakan studi kasus sejarah nasional yakni sejarah sosial politik yang mengandung permasalahan-permasalahan yang sudah disinggung sebelumnya. Guna mengkaji “Disintegrasi Timor Timur 1999” diperlukan suatu konsep pemahaman yang benar tentang konsep disintegrasi itu sendiri. Patokan terhadap konsep itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang sesuatu yang dibahas. Secara etimologi integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.⁸ Menurut Hendropuspito sendiri dalam buku *Sosiologi Sistematis* terbitan tahun 1989, integrasi berasal dari kata latin *integrare*, artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Maka istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.⁹ Pengertian yang lebih luas mengenai integrasi dijelaskan oleh Nazarudin Sjamsuddin. Menurutnya, integrasi adalah penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik yang ada dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun, budaya.¹⁰ Sedangkan disintegrasi berarti kebalikan dari integrasi. Disintegrasi adalah suatu proses atas substansi utuh yang secara bertahap mengalami kehilangan keutuhannya menjadi tercerai berai. Hendropuspito mengatakan bahwa disintegrasi adalah pecahnya kesatuan.¹¹ Timor Timur sejak 1976 menyatu dengan Indonesia (integrasi), namun tahun 1999 Timor Timur

⁸ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1982. hlm. 384.

⁹ Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta, 1989, hlm. 375.

¹⁰ Saafroedin Bahar & A.B. Tangdililing (Ed.), *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*, IKAPI Ghalia Indonesia, 1996, hlm. 7.

¹¹ Hendropuspito, *op.cit*, hlm. 390.

melepaskan diri dengan Indonesia. Lepasnya Timor Timur dengan Indonesia itulah yang dinamakan disintegrasi.

Timbulnya integrasi dan disintegrasi bangsa disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, adanya integrasi bangsa disebabkan oleh berbagai faktor yang menekan peran memori kebersamaan sejarah, ancaman dari luar, kesepakatan pemimpin, homogenitas sosial-budaya, agama, paksaan negara/pusat, serta saling ketergantungan politik dan ekonomi. Sebaliknya disintegrasi terjadi, karena melemahnya faktor-faktor yang berfungsi sebagai integrator tersebut.¹² Faktor penting yang ikut memainkan peranan dalam mewujudkan cita-cita integrasi masyarakat besar adalah adanya konsensus bersama dari sebagian besar kelompok saja. Integrasi yang dialami oleh masyarakat Timor Timur saat 1976 hanya diterima oleh empat partai politik saja dan satu partai politik yang secara terang-terangan menolak berintegrasi dengan Indonesia yaitu partai FRETILIN.

Mahfud MD menambahkan bahwa disintegrasi bangsa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya dendam terhadap masa lalu. Pemerintah pada masa lalu berlaku tidak adil terhadap rakyat dan pada saat sekarang kebebasan dibuka, sehingga akibatnya rakyat minta keadilan yang berlebihan sampai-sampai pada tataran ingin merdeka. Kedua, sekelompok orang yang takut terhadap proses reformasi. Ketiga, terbukanya peluang bagi masyarakat untuk merebut kue politik.¹³

¹² Mahfud, MD, dkk, *Ibu Pertiwi Menangis Cegah Disintegrasi Bangsa*, Yogyakarta, UPN Veteran, 2001, hlm. 5.

¹³ *ibid*, hlm. 2-3.

Menurut Al Baroto disintegrasi bangsa disebabkan pula oleh beberapa faktor yakni; (1) ikatan-ikatan primordial yang kuat, (2) perubahan sosial dan ekonomi serta munculnya kelas-kelas, (3) gaya politis pemimpinnya, (4) cara-cara kekerasan, (5) penetapan kebijakan luar negeri.¹⁴

Disintegrasi Timor Timur terjadi karena faktor: pertama, faktor sejarah integrasi, apakah integrasi karena “dipaksa”, “terpaksa”, atau “sukarela”. Dari sejarah awal integrasi dengan Indonesia, Timor Timur merupakan jajahan Portugal. Maka berintegrasi dengan Indonesia sudah lain sekali karena Indonesia sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Dan memang satu partai politik yakni FRETILIN-lah yang dengan gencar tidak mendukung berintegrasinya Timor Timur dengan Indonesia. Terlepas dari “dipaksa”, “terpaksa”, atau “sukarela” Timor Timur bergabung dengan Indonesia, pada kenyataannya 17 Juli 1976 Timor Timur bagian dari NKRI dan merupakan propinsi yang termuda 23 tahun lamanya. Kedua, karena kekuatan eksternal yang dapat mendorong disintegrasi bangsa. Kasus Timor Timur jelas sekali. Timor Timur didukung oleh beberapa negara internasional seperti Portugal, Australia dan PBB sendiri. Ketiga, perbedaan agama membantu mendorong disintegrasi, seperti kasus agama di Inggris antara Anglikan dan Protestan. Demikian juga di Timor Timur mayoritas penduduknya beragama Katolik. Mayoritas pendatang-pendatang yang ditransmigrasikan oleh pemerintahan pusat yang berasal dari Jawa, Sulawesi dan

¹⁴ Saafroedin Bahar & A.B. Tangdililing (Ed.), *op.cit.* hlm.297.

Bali beragama Islam. Keempat, karena faktor ketidakadilan dan kesewenang-wenangan TNI yang memicu tindakan separatisme.¹⁵

Satu hal lagi yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari NKRI adalah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan opsi yang dikeluarkan oleh B.J Habibie. Opsi otonomi luas dan jika menolak otonomi luas maka dipersilakan untuk memilih berdiri sendiri. Alternatif opsi yang terakhir inilah yang semakin membuat rakyat Timor Timur secara mayoritas dalam hasil jajak pendapat menyatakan merdeka dan sejak 4 september 1999 Timor Timur secara resmi memulai pemerintahan sendiri.

F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

1). Metodologi Penelitian

Penelitian ini menyangkut tentang objek dokumentasi sejarah, oleh karena itu metode deskriptif analisis yang tepat untuk dipakai. Metode deskriptif itu sendiri diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatian kepada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.

Menurut Louis Gottschalk ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik

¹⁵ Bdk. Mahfud, MD, dkk, *op.cit.* hlm. 7.

sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan.¹⁶ Keempat tahap tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk memahami buku-buku, dokumen-dokumen, koran-koran dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini

a). Pengumpulan sumber.

Pengumpulan sumber adalah pengambilan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kliping koran-koran yang diterbitkan oleh CSIS, dan majalah-majalah serta surat kabar tentang Timor Timur yang dianggap sebagai sumber utama. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari orang lain yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Sumber sekunder biasanya berupa buku-buku.

b). Kritik Sumber

Segala sumber baik primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian setelah itu dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Dalam mengkritik sumber dilakukan terhadap kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap bentuk luar dari dokumen sejarah. Kritik ini bertujuan untuk mengetahui asli atau tidaknya dokumen sejarah itu. Kritik intern yakni kritik terhadap isi daripada sumber sejarah, yang bertujuan untuk mengetahui meneliti kebenaran dari isi dokumen tersebut.¹⁷

c). Interpretasi

¹⁶ Louis Gottshalk (Terj. Nugroho Nutosusanto), *Mengerti Sejarah*, UI-Press, 1986, hlm. 33-40.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung, Transito, 1980, hlm. 135.

Interpretasi adalah tafsiran terhadap sumber-sumber yang digunakan kemudian dilakukan suatu uraian yang disertai dengan analisa-analisa.

d). Pendekatan

Titik berat pendekatan penelitian ini adalah pendekatan historis, politik dan sosiologis.

Di tinjau dari sumber penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library search*). Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data-data dari literatur-literatur yang ada dipergustakaan. Literatur tidak hanya terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan dokumen, majalah, koran, bahan tertulis dan lain-lain. Manfaat penelitian melalui penelusuran perpustakaan dan penelaahan kepustakaan adalah dapat mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis dan efisien.

2). Pendekatan

Untuk menganalisa lebih lanjut diperlukan berbagai pendekatan ilmu-ilmu dan konsep-konsep ilmu sosial lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dua atau lebih disiplin ilmu yang saling berjalanan berdasarkan interaksional masing-masing. Pendekatan ini sering digunakan oleh para sejarawan. Titik berat penelitian ini menggunakan pendekatan historis, politis, dan sosiologis.

Seseorang yang ingin menulis tentang masa lampau tepat kiranya pendekatan secara historis yang dipakai. *History* itu sendiri menurut Louis Gottschalk berarti masa lampau umat manusia.¹⁸ Pengertian yang lebih tajam

¹⁸ Louis Gottshalk, *op.cit.* hlm. 27.

diungkapkan oleh Sartono bahwa sejarah tidak hanya peristiwa masa lampau saja tetapi juga mengungkapkan fakta mengenai apa, siapa, kapan dan dimana serta menerangkan bagaimana sesuatu telah terjadi.¹⁹ Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui perjalanan sejarah berintegrasinya Timor Timur 1976 dan sejarah terdisintegrasinya Timor Timur tahun 1999. Sejarahpun pada dasarnya tidak bisa lepas dari masa lampau umat manusia itu sendiri. Maka, berintegrasi dan terdisintegrasinya Timor Timorpun tidak lepas dari perjalanan sejarahnya, dimana pada mulanya Timor Timur merupakan jajahan Portugis 450 tahun lamanya. Ketika pemerintahan otoriter Portugal Salazar jatuh, maka daerah jajahannya mengalami kebebasan politik termasuklah Timor Timur. Di Timor Timur muncul beberapa partai politik dan empat partai politik (kecuali FRETILIN) tanggal 20 November 1975 menyatakan bergabung dengan Indonesia. Pernyataan mereka tertuang dalam deklarasi Balibo yakni berupa pernyataan mereka atas nama rakyat Timor Timur (sebelumnya Timor Portugis) memproklamasikan pengintegrasian bekas Timor Portugis ke negara kesatuan RI sebagai propinsi ke-27.²⁰

Pendekatan secara politik dipakai untuk memahami beberapa konsep dalam penelitian ini yang memakai konsep-konsep politik, contohnya tentang konsep disintegrasi itu sendiri. Terintegrasinya Timor Timur kedalam NKRI memiliki tujuan politik tertentu pula. Rakyat Timor Timur (kecuali FRETILIN) merasa senasib sepenangungan dengan Indonesia kecuali secara historis mereka

¹⁹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta, PT Gramedia, 1992, hlm. 1.

²⁰ Tomodok, E.M, *Hari-hari Akhir Timor Portugis*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1994, hlm. 307.

dijajah oleh Portugis. Dua puluh tiga tahun lamanya Timor Timur bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selama ini pula kondisi politik yang dialami oleh rakyat Timor Timur tidak pernah tenang. Mereka hidup dengan kondisi diteror, diintimidasi, penculikan, pemerkosaan dan kadang-kadang perang diantara kedua belah pihak yang bertikai yakni FRETILIN dan ABRI sendiri. Diplomasi yang dilakukan Indonesia di Dewan PBB selama dua puluh tiga tahun selalu menemukan jalan yang berbuntut buntu. ABRI yang secara politik menjalankan tugas negara di Timor Timur menganggap kekuatan FRETILIN sebagai pengacau keamanan di Timor Timur sudah tidak berarti lagi. Tetapi pada kenyataannya FRETILIN masih dapat mengalang kekuatan baik melalui organisasi didalam negeri terutama ditubuh anggota FRETILIN sendiri maupun di dunia internasional. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Timur selama 23 tahun membuat citra politik pemerintah Indonesia terpuruk.

Pendekatan secara sosiologis dipilih untuk memberikan gambaran kehidupan sosial masyarakat Timor Timur selama berintegrasi dan bernaung di bawah Republik Indonesia. Suatu indikator yang dapat dilihat bagaimana kehidupan sosial rakyat Timor Timur selama bersama RI adalah terdapat beberapa kalangan muda Timor Timur yang menganggur karena lapangan pekerjaan di Timor Timur diisi oleh para pendatang. Rakyat Timor Timur merasakan bahwa agama Katolik yang mayoritas dianut oleh mereka diganggu oleh para pendatang yang beragama lain. Para pendatang tersebut mendirikan tempat ibadah tanpa sejijn dengan warga setempat. Hal itu kemudian memicu berbagai kerusuhan

sosial di Timor Timur pada tahun 1991 yang dikenal dengan insiden Santa Cruz 1999. Bahkan kerusuhan yang tidak dapat dihindari adalah kerusuhan yang menjelang dan akhir jajak pendapat 1999. Banyak orang yang pergi mengungsi dari Timor Timur untuk menyelamatkan diri. Diperkirakan ada sekitar 100.000 orang yang mengungsi dari Timor Timur pada saat itu. Selama bernaung dengan RI juga, pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM di Timor Timur terus menerus terjadi. Kejadian tersebut ditimbulkan oleh ABRI maupun pihak FRETILIN yang menyatakan diri tidak mau bergabung dengan NKRI dan memilih berdiri sendiri. Pelanggaran HAM yang paling besar adalah insiden Santa Cruz 1991.

Pendekatan sosiologis juga melihat suatu gejala dari aspek sosial yang mencakup hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial kelakuan manusia. Segala macam perwujudan tindakan yang menyangkut relasi antar individu diungkapkan secara tepat dengan melihat dimensi sosial perikelakuan orang seperti yang terwujud sebagai gejala.²¹

G. Tinjauan Pustaka

Sumber yang digunakan dalam skripsi ini ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Beberapa sumber primer antara lain; pertama, kliping yang berjudul: *Integrasi Timor Timur 1976*, terbitan CSIS. Isinya tentang reaksi-reaksi negara-negara Eropa terhadap berintegrasinya Timor Timur tahun 1976. Digunakan untuk membahas permasalahan tiga. Kedua, kliping yang berjudul: *Timor Timur 1983*,

²¹ Sartono Kartodirjo, *op.cit*, hlm. 87.

terbitan CSIS. Isi dari kliping ini adalah berbicara mengenai masalah pendidikan di Timor Timur pasca peninggalan Portugis. Kliping ini digunakan untuk menjawab permasalahan dua yakni membahas tentang keadaan pendidikan di Timor Timur. Ketiga, kliping berjudul: *Timor Timur 1984*, terbitan CSIS. Isinya tentang perbaikan terhadap kondisi fasilitas sosial masyarakat Timor Timur. Digunakan untuk membahas persoalan pada permasalahan kedua. Ke empat adalah kliping yang berjudul: *Timor Timur 1992*, terbitan CSIS. Isi dari kliping tentang tinjauan kembali terhadap insiden Santa Cruz 1991. Kliping ini digunakan untuk menjawab masalah keadaan Timor Timur selama bernaung dengan NKRI yang ada pada permasalahan point dua. Ke enam, mejalah Forum Keadilan no. 22 bulan September 1999. Isinya tentang jajak pendapat. Kliping ini digunakan untuk menjawab permasalahan tiga.

Beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, buku yang berjudul: *Selamat Tinggal Timor Timur* yang dieditor oleh Yohanes Sukendar dkk. terbitan Insist Press tahun 2000, isinya adalah keluhan kesah dari para pekerja sosial selama Timor Timur bernaung dengan NKRI. Buku ini digunakan untuk mengetahui pengalaman dan kesaksian dari orang-orang Timor Timur selama berada dalam naungan RI yang ada dalam permasalahan dua.

Kedua, adalah buku: *Reformasi Menjadi Deformasi dari Lengser ke Lengser*, karangan Sri-Edi Swarsono yang diterbitkan Universitas Indonesia 2001. Digunakan untuk membahas permasalahan yang ada pada point tiga yakni mengenai proses terjadinya disintegrasi 1999. Buku ini berisikan tentang ketidak

puasan dari warga Indonesia yang tidak menerima hasil jajak pendapat di Timor Timur dan meminta jajak pendapat di ulang kembali.

Ketiga, Lopes da Cruz dengan buku autobiografinya yang ditulis tahun 1999 berjudul: *Kesaksian aku dan Timor Timur*. Dalam bukunya mengkisahkan perjalanan kariernya, dimulainya dari masuk seminari dan keluar menjadi orang awam biasa sampai pada pembelaan barisan rakyat Timor Timur menjelang jajak pendapat. Buku ini digunakan untuk mengetahui persiapan jajak pendapat yang akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999.

Keempat, Hamid Rusdie dkk. dalam buku: *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Timor Lorosae* terbitan Kanisius Yogyakarta 1997. Buku ini di antaranya berisikan tentang berdirinya partai Politik UDT, FRETILIN dan APODETI. Digunakan untuk membahas tentang situasi Politik Timor Timur menjelang integrasi dengan Indonesia.

Kelima, Helen Mary Hill, dalam bukunya tahun 2000 berjudul: *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae* terbitan Yayasan Hak dan Sahe Intitute for Liberation Dili. Isi dari buku ini pada dasarnya berbicara mengenai keadaan Timor Portugis pra integrasi dengan Indonesia. Buku itu berisi tentang gerakan partai politik baik UDT, FRETILIN dan APODETI. Digunakan untuk membahas permasalahan pertama yakni Latar belakang Timor Timur berintegrasi dengan NKRI 1976.

Keenam, buku George J. Aditjondro yang diterbitkan oleh yayasan Hak dan Fortilos Jakarta 2000 yang berjudul: *Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau: Dampak Pendudukan Timor Lorosae dan Munculnya Gerakan Pro-*

Timor Lorosae di Indonesia. Isi pokoknya adalah mengupas dampak pendudukan TNI di Timor Timur secara sosial, ekonomi dan agama sejak adanya integrasi. Digunakan untuk mengetahui perlawanan sebagian rakyat Timor Timur terhadap pemerintah pusat dan ABRI yang kurang adil selama berada dibawah RI.

Ke tujuh, buku yang diedit oleh Cris Manning dan Peter Van Diemen yang berisi perkembangan politik menjelang disintegrasi dan jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1999. Bukunya berjudul: *Indonesia di Tengah Transisi Aspek Sosial Reformasi dan Krisis* tahun 2000. Buku ini juga digunakan untuk mengetahui proses terjadinya disintegrasi Timor Timur 1999.

Kedelapan, buku yang ditulis Makmur Makka 1999: *B.J Habibie: Kisah Hidup dan Kariernya*, diterbitkan oleh Pusaka Cidesindo Jakarta. Isinya adalah perjalanan hidup dan karier B.J Habibie dan kebijakannya dalam mengatasi masalah Timor Timur. Akibat kebijakan itu membuat Timor Timur menyatakan lepas dari gengaman NKRI.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari beberapa bab yang akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pokok. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka ditampilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian dan pendekatan, serta tinjauan sumber.

Bab II berisi penjelasan mengenai latar belakang terjadinya integrasi Timor Timur ke wilayah kesatuan RI. Dalam bab ini dibahas pula mengenai keadaan politik di Timor Timur, timbulnya beberapa partai politik dan Deklarasi Balibo 1975.

Bab III menjelaskan tentang keadaan Timor Timur selama bernaung di wilayah RI selama 1976-1999. Dalam bab ini akan disorot mengenai masalah situasi keamanan, situasi sosial politik dan agama di Timor Timur.

Bab IV merupakan penjelasan tentang proses terjadinya disintegrasi Timor Timur 1999. Bab ini akan memuat tentang kebijakan B.J Habibie, proses jajak pendapat, hasil jajak pendapat, serta sudut pandang tentang Timor Timur baik dimata orang Indonesia, Timor Timur dan dimata negara-negara internasional.

Bab V menjelaskan tentang dampak dari terjadinya disintegrasi bagi rakyat Timor Timur maupun bagi bangsa Indonesia.

Bab VI berisi simpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.

BAB II

INTEGRASI TIMOR TIMUR KE DALAM NKRI 1976

A. Kondisi Politik di Timor Timur Menjelang Integrasi

Sejarah Timor Timur tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik di Portugal karena Portugal merupakan penjajah bagi masyarakat Timor Timur di tanahnya sendiri. Pada tahun 1951 di semua tanah jajahan Portugis diberlakukan undang-undang pokok wilayah seberang lautan dan termasuklah Timor Portugis atau Timor Timur. Namun demikian, secara *de-facto* perlakuan terhadap rakyat Timor Timur masih bercirikan kolonial. Kegiatan berorganisasi, menyatakan pendapat dan berkumpul tetap diawasi oleh suatu badan yang dinamakan dengan ANP (*Accao Nacional Popular*- partai aksi rakyat nasional). Pada hakekatnya organisasi tersebut hanya digunakan sebagai alat pemerintah untuk meredam berbagai kritikan atau kecaman terhadap kebijakan pemerintah yang datangnya dari rakyat. Badan politik ini pun diawasi oleh DGS (*Dissecao Geral de Scuranca*, direktorat jendral keamanan atau semacam polisi intelijen yang sebelumnya bernama *Policia Internacional de Defase de Estrado* –PIDE).

Berbeda dengan koloni-koloni Portugal di Afrika, di Timor Timur hampir tidak pernah terjadi gerakan nasionalis dalam pengertian yang sesungguhnya, di bawah koordinasi suatu pusat kekuatan tertentu sebagai pemersatu. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi daerah tersebut serta keengganan negara-negara tetangga untuk mendukung suatu usaha pembebasan dari suatu belunggu kolonial Portugis. Namun demikian tidak berarti bahwa perlawanan atau usaha

untuk menentang kehadiran kaum penjajah dari wilayah Timor Timur tidak pernah walaupun masih bersifat lokal.

Perlawanan lokal yang dilakukan oleh *Liurai* terhadap kekuasaan kolonial Portugis di Timor Timur yang terpenting adalah antara tahun 1910-1912. Perlawanan yang dilakukan oleh para *Liurai* itu disebabkan sebagai suatu alasan mempertahankan kekuasaan di kerajaan mereka. Pemberontakan itu dipimpin oleh seorang *Liurai* bernama Dom Boaventura, yang bersekutu dengan sejumlah *Liurai* lainnya yang menyebabkan timbulnya pemberontakan yang luas melawan Portugis yang berpusat di Manufahui (sekarang dikenal dengan Suma) di bagian selatan.²² Sebab langsung terjadinya perang ini adalah perasaan harga diri orang Timor Timur yang tidak mau menerima orang asing masuk ke wilayah mereka dan melakukan campur tangan. Kedua, karena alasan dinaikannya pajak kepala dan terakhir karena alasan pelarangan pematangan kayu cendana sebelum mencapai umur tertentu.

Penduduk Timor Timur mulai sadar terhadap konsep nasionalitas pada saat perang dunia kedua. Mereka menyadari bahwa kepentingan orang-orang Timor Timur berbeda dengan kepentingan orang-orang Portugis, Jepang, Belanda dan Australia yang berada di tempat mereka. Satu-satunya pemberontakan setelah PD II adalah pemberontakan di bagian Tenggara Timor Timur yang lebih dikenal dengan pemberontakan Viqueque tanggal 7 Juni 1959.

Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang gerakan tersebut khususnya mengenai asal usul tujuan yang sebenarnya dari pelaku utama pemberontakan itu.

²² Hellen Mari Hill, *op.cit.* hlm. 54.

Yang pasti adalah bahwa pelaku utama pemberontakan itu berjumlah 14 orang yang berasal dari daerah Sulawesi sebagian anggota dari gerakan Permesta dan mereka terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Mereka kebetulan mendarat di Timor Timur dan minta suaka politik kepada pemerintah Portugal dan pemerintah Portugal kemudian memberi tempat tinggal bagi mereka di Bacau.

Ke empat belas orang ini adalah anggota gerakan Permesta dari Sulawesi Utara yang melancarkan pemberontakan bersenjata pada bulan Pebruari 1958 atau yang dikenal dengan RMS=Rakyat Maluku Selatan, sebuah gerakan pemberontakan yang bermula pada bulan April 1950.²³

Mereka ini yang menggerakan perlawanan dan melakukan serangan ke *posto-posto* Portugis di Vactolari dan Vactocarabu di dekat Viqueque. Untuk mengucilkan *posto-posto* ini, saluran telpon ke Bacau di potong. Portugis mengirimkan 100 orang tentara dari Goa India untuk memadamkan pemberontakan. Pemberontakan berakhir tanggal 14 Juni 1959. Di perkirakan orang yang mati berkisar antara 160 sampai 1000 orang. Sejumlah 58 orang Timor Lorosae diasingkan ke Mocambique, Angola dan Lisboa.²⁴

Terlepas dari apakah pemberontakan Viqueque tersebut didalangi oleh pihak tertentu atau tidak, peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa hanya dengan kekerasan Timor Timur dapat ditaklukan oleh penjajah, dan bilamana ada kesempatan untuk memberontak mereka tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan. Yang menarik dari peristiwa pemberontakan Viqueque adalah berupa

²³ *ibid.* hlm.61.

²⁴ John, G. Tailor, *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur Yang Dilupakan*, 1990, hlm. 40.



palakunya nanti akan menjadi pelopor-pelopor dari perkumpulan politik yang timbul sesudah peristiwa revolusi bunga (*reds flowers*) 1974.

Awal tahun 1970 sebuah surat kabar yang diterbitkan kalangan gereja Katolik membuat gusar kalangan PIDE (*Polisi Rahasia*). Surat kabar itu (bernama *Seara*) bebas dari sensor PIDE, sehingga halaman-halamnya kebanyakan diwarnai oleh artikel-artikel tentang tata hidup orang Timor Timur yang selama empat abad lebih dijajah dan diabaikan. Tema yang dominan yang muncul adalah mengenai hukum, perkawinan tradisional, adat istiadat, rumah-rumah tradisional, moralitas kekerasan dan sebagainya. Hal yang sangat menarik bahwa sebagian besar kolumnisnya di kolom surat kabar itu orang-orang seperti Ramos Horta, Nicolao Lobato, Xavier do Amaral, Domingus de Olivera, Manuel Carascalao, Fransico Borja da Costa, Inocio de Nurak dan Mari Alkatiri yang nantinya muncul diarena partai politik setelah 1974.

Dalam surat kabar itu pernah dimuat suatu polemik antara Ramos Horta dan Alkatiri awal tahun 1973. Ramos Horta pada saat itu mengemukakan gagasannya bahwa Timor Timur merupakan negeri yang indah, akan tetapi sayangnya penduduknya kurang menghargainya, maka mereka akan bekerja keras dan berbuat sesuatu demi kemakmurannya. Mari Alkatiri (seorang tokoh Islam yang kurang memahami seluk beluk gereja) menanggapi dengan menyatakan bahwa sebenarnya persoalan pokok tidak terletak pada kemauan penduduk untuk bekerja atau tidak, akan tetapi “melase” Timor Timur lebih kompleks sifat strukturnya, dan keterbelakangan pertanian akibat sistem kolonial. Ramos Horta

dengan berapi-api menanggapi pula dengan pedas, “masalah kita dapat diselesaikan dengan utopia atau sophisme.”²⁵

Atas polemik dalam surat kabar itu, PIDE melakukan intervensi. Pada tanggal 24 Maret 1973 surat kabar *Seara* diberendel dan ditutup. Di antara kolumnis surat kabar *Seara* ditangkap dan di buang ke Afrika antara lain Justino Morta dan Alarrico Morta dan Akarrico Fernandes.

Peristiwa di atas, ternyata secara tidak langsung berfungsi mempersiapkan arena perjuangan politik, di mana pada permainannya untuk sementara waktu, melatih diri untuk gelombang kejadian-kejadian politik yang muncul pasca revolusi bunga 25 April 1974. Pemerintah Portugis tidak mempersiapkan SDM Timor Timur untuk memegang tampuk pemerintahan. Para nasionalis Timor Timur mempersiapkan SDM-nya sendiri dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga.

B. Munculnya Partai-partai Politik di Timor Timur

Reds Flowers atau Revolusi Bunga di Portugal yang berhasil menumbangkan rezim Salazar (Caetano), segera diganti oleh suatu dewan koordinasi dan operasional yang dinamakan *Junta de Nacional* (Dewan Penyelamat Nasional) dibawah pimpinan Jendral Antonio Spinoza.

Kudeta 25 April 1974 di Portugal membawa perubahan-perubahan radikal dalam tata politik dalam maupun luar negeri Portugal. Revolusi Bunga membuka lembaran baru sejarah politik negeri-negeri jajahan Portugal pada

²⁵ Tomodok, *op.cit.* hlm. 17.

waktu itu dengan janji-janji yang diberikan oleh pimpinan baru Portugal yakni Jendral Espinola. Janji-janji Espinola itu antara lain adalah memberikan kebebasan kepada rakyat Portugal dan wilayah-wilayah jajahannya untuk membentuk partai-partai politik dalam rangka menuju era demokrasi yang diharapkan dapat membantu menyusun kebijaksanaan pemerintah kelak.²⁶

Kudeta 15 April 1974 itu sendiri dilakukan oleh Jendral Spinola. Spinola memberikan kebebasan kepada koloni-koloni Portugal termasuk Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Program dekolonisasi juga berlaku terhadap koloninya yang lain yaitu Angola (Afrika Barat), Guinea Bisau (Sebelah Utara Angola), Cape Verde, Sao Tome, Principe (Lepas pantai Afrika Barat), Mozambique (Afrika Timur) dan Macao. Sejarah telah mencatat bahwa kup itu dilakukan pada tanggal 25 April 1974 oleh kelompok perwira menengah (dari Letnan sampai Mayor) yang bergabung dalam wadah *Movimento das Forças Armadas* (FMA)-Gerakan Angkatan Bersenjata.

FMA dipimpin oleh sejumlah Jendral, yang paling mengemuka adalah Antonio de Spinola dan Jendral Costa Gomes. Keduanya mantan panglima Portugis di wilayah jajahan. Spinola, misalnya, pernah memegang komando militer Portugal di Guinea Bissau, di Afrika Utara. Ia seperti halnya atasan-atasan Portugis yang dilempar ke Medan tempur di Mozambik, seperti Jendral Caulza de Ariaga, sudah muak dengan kebijakan Lisabon memerangi maraknya gerakan nasionalis ditanah-tanah seberang lautan. Baginya kebijakan macam ini tidak

²⁶ Hamid Rusdi, dkk, *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Timor Lorosae*. 1997, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

menghasilkan apa-apa kecuali Portugal yang kian kurus terhisap biaya tempur yang makin hari makin bengkak.²⁷

Dampak dari adanya kudeta 25 April 1974 memunculkan berbagai organisasi politik yang selama rezim Salazar dibungkam dan mendapat sensor yang ketat ditanah koloninya. Mulai awal Mei 1974 tahun itu, kran kebebasan politik diseluruh penjuru Timor Timur tiba-tiba dibuka lebar-lebar. Di Timor Portugis (nama Timor Timur pada waktu itu) berdiri berbagai partai politik sebagai jawaban atas kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal tersebut. Sejak tahun 1974 telah berdiri 3 partai politik yang kemudian disusul oleh 2 partai politik kecil lainnya. Partai politik itu adalah:

UDT = *Uniao Democratica Timorese*

ASDT = *Associacao Social Democratica Timorese* yang kemudian berubah menjadi FRETILIN=*Frente Revolusionaro de Timor Leste Independent*

AITI = *Associacao Integrate de Timor Indonesia* yang juga berubah jadi

APODETI=*Associacao Popular Democratica Timorese*

KOTA dan TRABALHISTA

1. Partai UDT (*Uniao Democratica Timorese*)

Partai ini muncul pertama kali dengan menamakan diri Serikat Demokratik Timor (*Uniao Democratica Timorese* atau UDT) yang dibentuk tanggal 11 Mei 1974. Ketua partai ini adalah Mario Carascalao seorang Insinyur Kehutanan dan

²⁷ Lopes da Cruz, *Kesaksian Aku dan Timor Timur*, Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, 1999, hlm. 34-35.

pemilik perkebunan kopi dan Sekjenya Domigos Olivera Lopes da Cruz yang pernah didaulat menjadi ketua umum pada bulan September 1974. Umumnya massa dari UDT ini terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan kuat dalam pemerintahan-kebanyakan orang Portugis Putih yang ditugaskan atau sebaliknya dulu di buang ke Timor Portugis, raja-raja pribumi dan keluarga-keluarga pemilik perkebunan kopi dan sebagainya.

Yang menjadi program partai adalah menuntut demokratisasi, redistribusi, pendapatan, dan hak asasi manusia. Dan yang menjadi tujuan utama program partai ini adalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, yang orientasinya adalah bentuk hubungan federasi dengan Portugal dan mereka menolak integrasi Timor Timur ke negara asing manapun. Dapat dikatakan bahwa partai ini berkeinginan kuat Timor Timur diintegrasikan dengan Portugal dalam bentuk negara federasi.²⁸

Keanggotaan partai ini dalam perkembangannya tidak hanya dari kalangan elit pemerintah saja dan pemilik tanah yang terkemuka, akan tetapi mereka berusaha merangkul anggota dari kalangan pedesaan juga. Partai ini menolak secara penuh bagi Timor Timur berdiri sendiri, mereka menilai Timor Timur masih lemah jika dipandang dari sudut ekonomi, juga tidak cukup tenaga terdidik untuk memimpin sebuah negara. Namun, dalam merespon dekolonisasi, di dalam partai UDT sendiri terdapat tiga kelompok aliran. Pertama, aliran di bawah pengaruh Ir. Mario Carascalao, yang menghendaki rakyat sendiri yang menentukan nasibnya. Kedua, kelompok yang dipimpin oleh Maontinho yang

²⁸ Bdk. Lopes da Cruz, *ibid.* hlm. 39.

menhendaki *satus quo* agar Timor Timur tetap dibawah naungan Portugal. Ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Domingus da Oliveira, yang menghendaki Timor Timur merdeka.²⁹

Namun, meskipun terdapat 3 kelompok dengan pendapat yang berbeda-beda akhirnya mereka menyadari bahwa polemik politik seperti itu merupakan hal yang wajar dan membangun dan pada kenyataannya mereka berhasil tampil menjadi satu front yang bersatu dengan penuh percaya diri.

2. FRETILIN (*Frente Revolucionario de Timor Leste Independente*)

Partai ini merupakan partai kedua. Sebelumnya partai ini bernama ASDT=*Associacao Social Democratica Timor*. Partai ini dibentuk tanggal 20 Mei 1974. Anggota partai ini masanya kebanyakan dari kalangan elit perkotaan yang baru saja direkrut oleh pemerintah kolonial seperti UDT, ASDT yang dalam perkembangannya berusaha merekrut dan menjalin hubungan kepartaian di pedesaan.

Partai ini berlandaskan pada doktrin-doktrin universal tentang sosialisme dan demokrasi serta berpedoman pada pasal-pasal berikut ini:

- 1). Hak untuk berdiri sendiri (suatu otonomi secara progresif menuju kemerdekaan).
- 2). Penolakan terhadap kolonialisme dan pencegahan secara aktif terhadap neokolonialisme.

²⁹ Saafroedin Bahar dan Tangdililing, *op.cit.* hlm. 239.

- 3). Keikutsertaan orang-orang Timor Timur yang kompeten dalam administrasi dan pemerintah setempat dengan segera, sebagai persiapan untuk mengambil alih posisi-posisi yang dipegang oleh orang-orang yang direkrut dari luar.
- 4). Tidak diperkenankan adanya diskriminasi ras, penegakan suasana damai dan bersahabat antara aneka ras yang mendiami wilayah Timor Timur, selain penegakan keamanan dan ketertiban intern (yang harus diwujudkan tanpa syarat).
- 5). Perang aktif melawan korupsi.
- 6). Politik tetangga yang baik dan kerjasama dalam semua sektor maupun semua tingkat dengan negara-negara yang letaknya dalam geografis Timor Timur, namun dengan syarat harus tetap menjaga kepentingan-kepentingan utama rakyat Timor Timur.³⁰

Program partai ini dalam jangka panjangnya adalah menyerukan perlunya mewujudkan kemerdekaan secara bertahap dimulai dari reformasi pemerintah, ekonomi, sosial dan politik. Kurun waktu 3 dan 8 tahun merupakan waktu persiapan menuju kemerdekaan. Dalam jangka yang pendek program partai ini adalah menitik beratkan pada pemberantasan buta huruf, pembangunan pertanian sebagai prioritas, melibatkan rakyat dalam politik, perluasan kesehatan dan pengalihan serta pengembangan kebudayaan Timor.

Pendiri partai ini adalah seperti Jose Fernando Osorio Soares (yang nantinya keluar dan membentuk partai APODETI), Francisco Xavier do Amaral

³⁰ Armindo Maia, *Proses Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur*, 1984. Yogyakarta, IKIP Sanata Dharma, hlm. 66-67.

dan Jose Ramos Horta, di samping itu ada seorang tokoh yang sangat populer yaitu Xanana Gusmao. Partai ASDT kemudian berubah setelah hengkangnya Jose Fernando Osorio Soares dan bergabungnya lima mahasiswa yang datang dari Portugal. Kelima orang mahasiswa tersebut adalah Abilio Araujo, Antonio Cavarino (Maulear), Hanis Basarewan (Hata), Carlos Caesar (Maulaka), dan Vincente Reis (Sahe) yang tiba di Timor Timur pada bulan Agustus 1974.³¹ Mereka ini rata-rata cenderung ke ekstrim kiri, yang merupakan suatu gejala yang umum dalam kalangan mahasiswa di Portugal pada masa itu, sebagai suatu cerminan sikap anti terhadap rejim lama yang ekstrim kanan.³² Akhirnya setelah mengalami pengurangan-pengurangan maka diubahlah ASDT menjadi FRETILIN=*Frente Revolucionario de Timor Leste Independente* atau front revolusioner bagi kemerdekaan Timor Timur yang berdiri tanggal 12 September 1974.

Perubahan nama tersebut digambarkan oleh seorang di antara pendirinya bahwa ASDT dibentuk untuk mempertahankan gagasan mengenai hak mengenai nasib sendiri. Sedangkan FRETILIN dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan. Programnya adalah kemerdekaan penuh secara *de-jure* dari Portugal. Caranya secara *de-facto* harus diperjuangkan terlebih dahulu, lewat proses dekolonisasi yang cepat.³³

Karena hal tersebutlah maka FRETILIN menolak prinsip politik UDT yang ingin tetap berada di bawah naungan pemerintah federasi dengan Portugal.

³¹ Hamid Rusdi, dkk, *op.cit*, hlm. 35.

³² Bdk. Armindo Maia, *op.cit*, hlm. 68.

³³ Bdk. John G. Taylor, *op.cit*, hlm. 60.

FRETILIN juga menentang dengan keras prinsip politik APODETI yang ingin mengintegrasikan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar penolakan yang dilakukan oleh FRETILIN adalah bahwa kebudayaan, bahasa dan adat istiadat seperti yang dinyatakan oleh APODETI hampir sama dengan Indonesia, adalah sangat berbeda jauh dengan Timor Timur. Menurut pemikiran FRETILIN, Timor Timur memiliki “hubungan dekat” dengan bekas penjajahnya Portugal. Maka dalam perjuangannya FRETILIN menetapkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. Alasannya karena bahasa Tetum yang diakui sebagai bahasa yang paling luas penggunaannya dan paling banyak dimegerti di Timor Timur adalah bahasa yang tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahasa resmi.

FRETILIN lebih dekat hubungannya dengan partai UDT ketimbang dengan partai APODETI karena kedua partai ini menguasai fasilitas bekas angkatan bersenjata Portugal dan fasilitas politik. Karena alasan inilah maka kedua partai ini melakukan koalisi. Koalisi mereka terjadi pada bulan Mei 1975. Koalisi antar kedua partai tersebut menimbulkan interpretasi bagi pemerintah Indonesia, bahwa suatu penyerahan kekuasaan kepada kedua partai pro kemerdekaan akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa campur tangan dengan kekerasan adalah jalan ataupun pilihan yang paling tepat untuk keluar dari dilema yang dihadapinya. Ini terjadi pada awal Pebuari 1975. Pemerintah Indonesia melakukan invansi militernya dengan menerjunkan pasukan payung di lapangan terbang Bacau.³⁴ Kekhawatiran

³⁴ Armindo Maia, *op.cit.*, hlm. 74.

pemerintah Indonesia tersebut memiliki alasan tertentu. Menurut Pemerintah Jakarta, bila penyerahan kekuasaan betul-betul terjadi, maka buyarlah semua harapannya dan sia-sialah segala dukungan terhadap APODETI, dalam rangka mempengaruhi pendapat dan sikap rakyat Timor Timur untuk memilih integrasi dengan jalan yang legal.³⁵

Namun koalisi itu tidak dapat bertahan lama dan runtuh ketika UDT melancarkan aksi “Gerakan 11 Agustus 1975”. Alasan yang dikemukakan oleh UDT untuk memutuskan koalisinya dengan FRETILIN adalah karena FRETILIN menurutnya makin lama makin dikuasai komunis³⁶ yang membahayakan kepentingan rakyat Timor Timur.

Runtuhnya koalisi kedua partai itu diikuti dengan meletusnya “perang saudara berdarah” yang banyak memakan korban pada kedua belah pihak. Menyikapi hal ini, APODETI bersikap netral dan tidak memihak kepada partai manapun bahkan anggota APODETI menjadi pahlawan membantu para korban kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa antar kedua partai dilakukan pertemuan di Macao (Koloni Portugal di India) yang semula diadakan tanggal 13 Juni 1975 namun diundur karena FRETILIN tidak mau hadir. Alasannya karena APODETI akan hadir dalam pertemuan tersebut.³⁷ Sampai batas pengunduran tanggal 25-28 Juni 1975, pihak FRETILIN-pun tidak hadir dalam pertemuan itu. Di balik ketidakhadirannya itu, FRETILIN diluar dugaan telah memproklamkan kemerdekaan

³⁵ *ibid*, hlm. 72.

³⁶ Saafroedin Bahar dan Tangdililing, *op.cit*, hlm. 245. Bdk. Hamid Rusdi, dkk, *op.cit*, hlm. 36

³⁷ Bdk. John, G. Aditjondro, *op.cit*, hlm. 86.

Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975. Kemudian diumumkan pula susunan pemerintahannya dengan lengkap tanggal 2 Desember 1975.

Salah seorang pendiri partai FRETILIN menyadari bahwa posisi partainya terjepit karena partai mereka telah dicap sebagai partai yang berideologi komunis yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia waktu itu. Karena itu, Ramos Horta berkunjung ke Jakarta guna meluruskan kesalahpahaman antara pemerintah Indonesia dengan FRETILIN.³⁸

Guna menghilangkan paradikma yang terlanjur berkembang tersebut, maka Ramos Horta dan kawan-kawannya melakukan strategi baru dengan mengubah bentuk dan nama yang berbeda dengan bentuk FRETILIN sebelumnya. Oleh mereka FRETILIN kemudian diganti nama menjadi CNRM (*Conselho Nacional Resistencia Maubere*=Dewan Nasional Perlawanan Maubere), dan CNRM sejak berakhirnya Perang Dingin 1990-an dengan tegas menolak jika disamakan dengan FRETILIN sebelumnya.³⁹ Mulai sejak itu pula mereka melakukan kegiatan bawah tanah. Selain melakukan doktrinisasi kepada penduduk tentang arah perjuangan FRETILIN, arti pentingnya kemerdekaan, dan nasionalisme Timor Timur, juga perang secara bergeriliya melawan tentara Indonesia. Doktrin tersebut mereka berikan ketika sebelum rakyat Timor Timur menyerahkan diri kepada tentara Indonesia yang mendukung perjuangan FRETILIN yang lari ke hutan bersama-sama pada saat invansi militer Indonesia bulan Juni 1975. Selain gerakan bawah tanah, mereka juga melakukan gerakan

³⁸ Bdk. Hamid Rusdi, dkk, *op.cit*, hlm. 45.

³⁹ *ibid*.

diplomasi di luar negeri.⁴⁰ Gerakan mereka itu tidak sia-sia karena mereka dapat menikmati pascapenentuan pendapat dimana secara mutlak (78,5%) memilih untuk berdiri sendiri daripada tetap berintegrasi dengan Indonesia.

3. APODETI (*Associacao Popular Democratica Timorese*)

Partai APODETI muncul sebagai partai yang ketiga. Munculnya partai APODETI ini tanggal 27 Mei 1974 yang didirikan oleh sekelompok orang sebanyak 36 orang. Secara menyeluruh ada 13 butir manifesto yang ingin diperjuangkan yakni⁴¹:

- (1). Integrasi yang otonom ke dalam Republik Indonesia sesuai dengan hukum Internasional
- (2). Pengajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang wajib di semua sekolah menengah dan pembukaan sekolah-sekolah dasar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, tanpa menghapus sekolah-sekolah Portugis yang ada.
- (3). Mengembangkan prinsip-prinsip kebebasan dan HAM
- (4). Pembagian kekayaan secara adil oleh pemerintah
- (5). Pekerjaan adil dengan penetapan gaji minimum
- (7). Menghargai bahasa maupun kebudayaan Portugis
- (8). Pendidikan bebas dan pelayanan medis bagi semua orang
- (9). Menghormati secara khusus gereja-gereja Katolik
- (10). Kebebasan untuk mengutarakan pendapat dengan rasa tanggung jawab

⁴⁰ Bdk. Saafroedin Bahar dan Tangdililing, *op.cit*, hlm. 247-248.

⁴¹ *ibid*, hlm. 23. Bdk. Tomodok, *op.cit*, hlm. 98-99.

(11). Pemilihan secara langsung dalam pemilihan umum

(12). APODETI secara terang-terangan menentang:

- a) Kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan manusia dan praktek-praktek yang tidak sesuai, seperti yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dalam mendapatkan tenaga kerja.
- b) Korupsi dan semua praktek koloni lainnya
- c) Diskriminasi ras.

Sedangkan butir ke-13 berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap orang yang ingin menjadi anggota partai. Selanjutnya partai ini memberikan jaminan kepada para anggotanya maupun kepada rakyat secara keseluruhan antara lain:

- a) Politik hidup berdampingan secara damai
- b) Memperbolehkan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar di Universitas luar negeri, khususnya Australia.

Yang menjadi tujuan dari partai ini adalah menggabungkan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Partai ini semula bernama AITI=*Associacao Para a Integracao de Timor na Indonesia*, kemudian berubah menjadi APODETI=*Associacao Popular Democratica Timorese*, dengan maksud agar istilah-istilah rakyat (popular) dan demokrasi (*democratica*) dapat memikat hati rakyat.

Integrasi yang diinginkan oleh partai ini adalah integrasi dengan syarat bukan tanpa syarat. Hal itu dapat dilihat dari manifestonya, dimana dikatakan bahwa status yang diinginkan oleh mereka untuk Timor Timur adalah suatu

integrasi otonom (semacam propinsi otonom) ke dalam negara Republik Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Seperti halnya dengan partai yang terdahulu yakni partai FRETILIN, partai APODETI memandang bahwa secara politis dan ekonomis terlalu atau tidak mampu berdiri sendiri, sehingga integrasi dengan Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Timor Timur di masa mendatang.

Para pemimpin APODETI yang paling penting seperti Guilherme Goncalves, Arnaldo des Reis Araujo dan Osorio Soares. Masa pendukung APODETI adalah rakyat Gonsalves di perbatasan dan kelompok kecil komunitas Muslim di Dili.

Dasar pendirian APODETI sesuai dengan aspirasi rakyat Timor Timur yang merasa bahwa mereka adalah juga bagian dari Indonesia Raya yang terpaksa dipisahkan oleh perselisihan antara penjajah Portugis dan Belanda. Sedangkan yang menjadi tujuan partai APODETI adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur serta berintegrasi dengan Indonesia demi kesejahteraan rakyat Timor Timur.

Kepengurusan partai APODETI terbagi menjadi presidium partai APODETI dan Komite Sentral Partai APODETI.⁴² Pengurus partai APODETI adalah:

Arnaldo des Reis Araujo : Presiden

Hermenengildo W Martin : Wakil Presiden

⁴² Hamid Risdi, dkk., *op.cit*, hlm, 24-25.

Guilherme Maria Goncalvas : Penasehat
Abel da Costa Belo : Penasehat
Joao Asuncao de Araujo : Sekretaris
Ermina C dos Reis Araujo : Wakil Sekretaris

Sedangkan ada komite sentral partai APODETI adalah:

Jose Fernando Osorio Soares : Sekretaris Jendral
Jose A.B dos Reis Araujo : Sekretaris Penerangan
Domingos Pinto Soares : Sekretaris Hubungan Sosial
Antonio Freitas Parada : Sekretaris Urusan Keuangan
Alberqueque Maria Borges : Sek. Pem. Hub. Sosial
Gaspar da Silva : Bendahara
Moises Martins : Sekretaris Urusan Olah Raga

4. Partai Politik Kecil Lainnya

Selain ada tiga partai besar yang paling berpengaruh, masih terdapat dua partai politik kecil lainnya. Kedua partai itu adalah *Associacao Popular Monarquica Timorese* (APMT/KOTA), dan *Associacao dos Trabalhadores* (AT/Trabalhista) yang muncul sekitar akhir tahun 1974.

Pendiri APMT yakni Tomas Dias Ximenes, yang mengaku sebagai keturunan dari kelompok raja pejuang pribumi Timor Timur, yang pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan bangsa Portugis pada masa awal penjajahan Portugis di Timor Timur.

Yang menjadi tujuan utama dari partai ini adalah menciptakan suatu sistem pemerintahan monarkhi konstitusional di Timor Timur. Para pendiri partai ini pada mulanya adalah pendukung partai APODETI (pro-integrasi), namun kemudian mereka memisahkan diri setelah mengetahui bahwa di Indonesia sudah tidak mengakui sistem monarkhi. Setelah memisahkan diri dari APODETI, mereka menginginkan suatu ikatan khusus dengan Portugal di mana Timor Timur menjadi semacam suatu negara yang otonom di bawah pemerintah Portugis.

Gagasan tersebut masih dipengaruhi oleh konsep Spinola, dan ternyata tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah Portugal yang baru. Hal ini dapat dilihat pada larangan penggunaan radio milik pemerintah untuk siaran-siaran politiknya. Pendukung partai ini sedikit dan tidak mencapai 100 orang. Hal yang sangat mengecewakan perkumpulan ini adalah tidak diakuinya status sebagai suatu partai politik oleh pemerintah Portugis seperti ketiga partai politik lainnya.

Partai yang terakhir adalah *Associacao dos Tarabaldores* atau lebih populer dikenal dengan sebutan TRABALHISTA. Inti dari program politiknya adalah memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Timor Timur. Pendukungnya tidak jelas berapa jumlahnya dan terdiri dari golongan pekerja di daerah perkotaan. Perkumpulan ini ternyata tidak memperlihatkan suatu kegiatan politik yang berarti, sehingga peranannya dalam percaturan politik Timor Timur tidak nampak sama sekali.⁴³

Sebelumnya masih ada satu lagi partai politik kala itu, namun partai politik yang satu ini tidak berumur panjang. Partai yang dimaksud adalah *Associacao*

⁴³ Armindo Maia, *op.cit.*, hlm. 76.

Democratica Integracao Timorleste Australia (ADELITA). Sama sekali partai ini tidak memiliki program. Partai ini memiliki kegiatan mengumpulkan uang untuk memenuhi integrasi dengan Australia. Tetapi partai ini dengan segera melorot karena akhir 1974 pemerintah Australia menolak ide mereka. Tujuan secara eksplisit dari partai ini adalah ingin mengintegrasikan Timor Timur dengan Australia. Apa daya, mereka harus menguburkan niat mereka karena niat utama mereka untuk meminang Australia di tolak.⁴⁴

C. Proklamasi Balibo 30 November 1975.

1. Latar Belakang Proklamasi Balibo

Persaingan antar partai politik semakin sengit. Mereka larut dalam perjuangan visi dan misi masing-masing. UDT dan FRETILIN merupakan dua kekuatan partai yang menguasai arena politik di Timor Timur. Mereka juga menguasai fasilitas politik seperti gedung pemerintahan peninggalan Portugis dan angkatan bersenjata. Mereka memperkokoh diri dengan melakukan koalisi tanggal 20 Januari 1975. Tujuan dari koalisi yang mereka bentuk adalah agar secara bersama-sama membendung dan bila perlu menghancurkan partai APODETI.⁴⁵ Pembentukan koalisi kedua partai itu ditandai dengan pernyataan bersama yang masing-masing ditanda-tangani oleh ketua FRETILIN Farnsico Xavier do Amaral

⁴⁴ Bdk. John, G. Taylor, *op.cit*, hlm. 51.

⁴⁵ Bdk. Hamid Rusdi, *dkk*, *op.cit*, hlm. 36.

dan ketua UDT Fransisco Lopes da Cruz. Ada 8 butir pokok pernyataan tersebut⁴⁶:

- (1). Kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor atau Timor Dili.
- (2). Menolak APODETI karena mempertahankan gagasan integrasi dengan neo-kolonialis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor dan piagam PBB.
- (3). Mengakui Portugal sebagai pelaksana yang sah dalam proses dekolonisasi, mengambil bahasa Portugis sebagai bahasa resmi di Timor Dili
- (4). Koalisi mempunyai hak untuk memilih negara mana yang akan mengambil bagian dalam komisi supervisi, dan menolak partisipasi negara-negara besar, negara ASEAN dan negara-negara lain yang berada dalam pengaruh Indonesia dan Australia.
- (5). Pembentukan pemerintahan peralihan melalui perundingan di Lisabon antara pemerintah Portugal, FRETILIN dan UDT.
- (6). Membentuk komisi “*ad hoc*” dengan jumlah anggota yang sama dari kedua partai koalisi yang ditugaskan mempelajari program radio, ceramah-ceramah untuk disiarkan melalui organ-organ penerangan
- (7). *Non-ideological-agresion* dan saling menghormati program serta bentuk ideologi.
- (8). Timor Portugis diganti namanya dengan Timor Timur dan penduduknya disebut “Timores”.

⁴⁶ Lapijan dan Chaniago. *op.cit.* hlm 39-40. Bdk. Lopes da Cruz, *op.cit.* hlm.8.

Sepintas kelihatan bahwa antara FRETILIN dan UDT terjalin kerja sama yang kuat. Namun kesan tersebut segera terhapus setelah memperhatikan kenyataan-kenyataan yang muncul beberapa bulan kemudian. Koalisi UDT dan FRETILIN tidak dapat bertahan secara lama karena didorong oleh kesadaran akan bahaya kaum komunis oleh kelompok UDT.

Koalisi yang dilakukan oleh FRETILIN dan UDT sebagai maksud untuk mencari dukungan secara politik. Di balik itu semua FRETILIN melakukan gerakan bawah tanah dan meninggalkan kesepakatan demokrasi. Koalisi dimanfaatkan sebagai senjata propaganda politik untuk melakukan serangan fisik. Untuk memperluas pengaruh, mereka mulai mempraktekkan metodologi vulgar dengan melakukan intimidasi, teror, penganiayaan bahkan pembunuhan.

Akibat pecahnya koalisi tersebut disepanjang garis perbatasan telah terjadi keributan, perkelahian dan pembunuhan seperti di Suai, Bobonaro dan Oe Cusse.⁴⁷ Mulai saat itulah muncul perang saudara. Dalam menyikapi hal ini partai APODETI menjadi pihak penengah bahkan ketika terjadi perang, mereka melakukan pertolongan terhadap yang luka bahkan Jose Amaral ditemukan tewas.

2. Perundingan Macao

Bentrokan berdarah antara kedua belah pihak membuat kekusaran masyarakat Timor Timur dan mendapat perhatian dari pemerintah Portugal di Timor Timur.

⁴⁷ Tomodok, *op. cit.* hlm. 234.

Untuk itulah Portugis memprakarsai dengan mengadakan pertemuan di Macao (koloni Portugal di Cina) sebagai upaya menghentikan pertikaian perang saudara dan sebagai upaya menyatukan rakyat Timor Timur sebagai mana sedia kala. Menurut Armindo Maia, pertemuan Macao bertujuan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang berisikan draft tentang kemerdekaan.⁴⁸ Pertemuan itu direncanakan tanggal 13 Juni 1975. Namun pertemuan tersebut harus ditunda berkali-kali karena pihak FRETILIN tidak bersedia hadir. Seperti penulis katakan sebelumnya bahwa dalam pertemuan itu FRETILIN tidak mau duduk satu meja dengan APODETI dan hal itu diungkap oleh Francisco Xavier do Amaral, Alarico Fernandes dan Ramos Horta. Pertemuan itu ditunda dan dibuka lagi tanggal 25-28 Juni 1975 dan lagi-lagi FRETILIN memboikot pertemuan itu. Menurut perkiraan Osorio Soares pemimpin APODETI, pemboikotan itu menunjukkan kepada dunia luar bahwa pertemuan itu pasti akan gagal tanpa kehadiran FRETILIN.

Mereka yang hadir dalam pertemuan itu yakni dari UDT Lopes da Cruz, Mario Carascalao dan Mascimento, dari APODETI Osorio Soares, Hermeningildo Martin, Jose Bonifacio dos Reis Araujo dan Albuquerque Borges.⁴⁹ Sedangkan pemimpin sidang itu dari Portugal hadir Mayor Victor Alves sebagai pemimpin delegasi dengan anggotanya Dr. Almeida (mentri koordinator antar wilayah) dan Prof. Jorge Campignos (mentri sekretaris negara). Dan untuk Indonesia diwakili oleh Nasrun Syahrin (Konsul Jendral RI di Hongkong).

⁴⁸ Bdk. Armindo Maia, *op.cit.*, hlm. 93.

⁴⁹ Tomodok, *op.cit.* hlm. 239.

Dalam pertemuan itu masing-masing pihak (UDT dan APODETI) menggunakan kesempatan untuk berpendapat. Partai UDT mengungkapkan pendapatnya tentang masalah dekolonisasi di Timor Timur agar penyelesaian dekolonisasi dilakukan tahap demi tahap dan tidak perlu dilakukan melalui referendum.

Sedangkan APODETI memanfaatkan momentum ketidakhadiran FRETILIN dengan cara menyudutkan posisinya. Ketidakhadiran FRETILIN dinilai sebagai sikap tidak demokratis dan melanggar hak asasi rakyat Timor Timur dan tidak mau memperhatikan kehendak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri.⁵⁰

APODETI dalam menanggapi usul yang dilontarkan oleh UDT bahwa referendum tidak perlu dilaksanakan. APODETI menyatakan sesuai dengan prinsip demokrasi adanya referendum menjadi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri. APODETI menginginkan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia karena ikatan kebudayaan, keturunan, geografis dengan Indonesia.

Karena FRETILIN tidak hadir dalam pertemuan itu maka bentuk pertemuan itu sekedar *hearing* antar kedua partai dengan Portugal.

Namun hasil positif yang dapat dipetik dalam pertemuan Macao itu adalah intinya kesepakatan diadakannya persiapan-persiapan melaksanakan referendum sekitar bulan Oktober 1976. Dua tahun setelah pelaksanaan referendum Portugal akan meninggalkan Timor Timur. Untuk melaksanakan referendum itu

⁵⁰ Bdk. John G. Taylor, *op.cit.* hlm. 81-84.

direncanakan dibentuk *government body*, atau semacam badan pengelola wilayah Timor Timur.⁵¹

Naskah undang-undang yang berdasarkan pada pertemuan Macao dikukuhkan oleh Dewan Revolusioner Militer Portugal dan diumumkan pada tanggal 13 Juli 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur tetap menjadi daerah Portugal sampai dengan bulan Oktober 1978. Naskah konstitusi itu menetapkan pembentukan sebuah majelis rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum pada tahun 1976. Tugas majelis rakyat menentukan politik dan administrasi daerah.

3. Perang Saudara 1975

Hasil pertemuan Macao tidak segera merubah suasana yang terjadi di Timor Timur. Pertemuan itu disamping menghasilkan ketentuan jadwal dekolonisasi, juga mengakibatkan ketegangan antar kekuatan politik di Timor Timur. Para petinggi-petinggi partai UDT menunjukkan anti komunisnya pasca pertemuan Macao saat adanya kesempatan kompanye.

Raja Atsabe tokoh yang sangat berpengaruh dikalangan APODETI diserang oleh FRETILIN pada tanggal 10 Agustus 1975. Akibat serangan itu jatuh beberapa korban dari pihak raja Atsabe. UDT membalas aksi itu dengan mengadakan demonstrasi arak-arakan di kota Dili sambil menyerukan yel-yel anti komunis.

Puncak dari aksi itu terjadi pada tanggal 11 Agustus 1975, yakni terjadi gerakan perebutan kekuasaan. Dalam sekejap saja UDT telah berhasil menguasai

⁵¹ Bdk. Lopian dan Chaniago, *op.cit.* hlm. 49.

beberapa tempat penting di Dili dan Bacau seperti kantor pos, kantor telegram, stasiun radio, sejumlah pos militer, serta lapangan terbang Dili.⁵² Sementara itu tokoh sentral FRETILIN yang berada di Dili ada yang ditahan, tetapi sebagian besar berhasil meloloskan diri bersama keluarga. Para pengungsi yang diduga jumlahnya sekitar enam sampai belasan ribu, lari mencari selamat, tetapi sebelum melintasi perbatasan Timor Barat, mereka diharuskan oleh TNI menandatangani pernyataan pro integrasi.⁵³ Dari Jakarta pada saat itu dikabarkan secara luas bahwa pengungsi tersebut menginginkan integrasi ke dalam wilayah RI. Maka Aboeprijadi Santoso mengatakan bahwa kabar tersebut adalah rekayasa Jakarta. Pemerintah Indonesia pada waktu itu rela mengorbankan begitu banyak uang untuk membantu mereka yang mengungsi. Sebetulnya ada apa dibalik bantuan Indonesia tersebut? Armindo Maia mengatakan bahwa bukan rahasia lagi dalam dunia politik internasional bahwa bantuan apa saja yang diberikan kepada suatu negara oleh negara tertentu tidaklah terlepas dari tujuan politis tertentu.⁵⁴

Pada tanggal 11 Agustus 1975 partai UDT mengajukan beberapa tuntutan tertulis kepada pemerintah Timor Portugis, yang isinya antara lain⁵⁵ :

- (a). Gerakan revolusi yang dipelopori oleh UDT pada jam 12.00 malam tanggal 11 Agustus 1975 di Timor Timur adalah suatu cetusan hati nurani rakyat Timor Timur yang sekian lama merindukan kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat.

⁵² Rudini, *Profil Propinsi Republik Indonesia*, Jakarta: P.T Intermedia, 1992, hlm. 3-4.

⁵³ Aboeprijadi Santoso, *Jejak-jejak Darah Tragedi dan Penghianatan di Timor Timur*, Yogyakarta, Pijar, 1996, hlm. 83. Bdk. John, G. Taylor, *op.cit*, hlm. 51

⁵⁴ Armindo Maia, *op.cit*, hlm. 108.

⁵⁵ Soekanto, *Integrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Jakarta: Bumi Restu, 1976, hlm. 202.

- (b). UDT menyerukan kepada semua partai/rakyat seluruhnya di Lautem, Bacau, Viqueque, Liquica, Manatuto, Ermeran, Save Covalima dan Malima, agar maklum bahwa UDT-lah yang ingin memegang tampuk pimpinan pemerintahan.
- (c). UDT mempunyai tekad untuk berusaha keras mempengaruhi semua lapisan masyarakat agar mementingkan cita-cita menuju suatu masa gemilang, yaitu negara merdeka Timor Timur.

Pada tanggal yang sama 13 Agustus 1975, Raja Atsabe ditangkap oleh sekretaris FRETILIN di Atsabe. Sebelum tertangkap tokoh APODETI ini, sempat berkirim pesan kepada pemimpin APODETI ke Atambua yang intinya menolak komunike yang dikendalikan oleh Portugis dan APODETI akan mengibarkan bendera merah putih sampai titik darah penghabisan.

4. Proklamasi Partai-partai Politik

Perkembangan pergolakan keadaan Timor Timur dari hari ke hari menunjukkan situasi yang tidak kunjung tenang. Sejak awal September 1975 pasukan-pasukan dari kedua partai minoritas, KOTA dan TRABALHISTA mengabungkan diri dalam wadah MAC=*Movimento Anti Comunista*/Gerakan Anti Komunis. Para pemuda yang bergabung dalam MAC diberi latihan keprajuritan sebagai persiapan untuk mengempur FRETILIN.

Pada tanggal 2 Oktober 1975 terjadi pertempuran antara pasukan FRETILIN dan pasukan gabungan MAC untuk merebut Batu Gede. Batu Gede merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Belu dan propinsi Timor Timur

dan merupakan benteng sebagai tempat pemusatan bagi pasukan FRETILIN. Serangan tersebut berhasil mengejutkan pasukan FRETILIN, karena mereka tidak menduga sama sekali akan ada serangan dari pasukan gabungan MAC. Tanggal 16 Oktober 1975 Batu Gede jatuh ke tangan pasukan gabungan MAC. Tanggal 16 Oktober 1978 delapan hari setelah jatuhnya Batu Gede, kota Balibo ikut di serang dan dapat dikuasai pasukan gabungan MAC.

a. Proklamasi Sepihak FRETILIN.

Serangan pasukan gabungan menyebabkan FRETILIN terpojok. Terpojoknya pasukan FRETILIN menghantarkan FRETILIN untuk bertindak yang lebih cepat menguasai situasi di Timor Timur khususnya Dili sebagai basis mereka. FRETILIN yang tidak mau kehilangan kekuasaannya mengumandangkan proklamasi kemerdekaan secara unilateral. Proklamasi unilateral yang dinamakan Republik Demokrasi Timor Timur itu dikumandangkan tanggal 28 November 1975, dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya. Dalam prosesi proklamasi itu diturunkanlah bendera Portugal dan diganti dengan bendera Timor Timur.

Beberapa hari kemudian FRETILIN pun mengumumkan susunan dan nama-nama pejabat mereka sebagai berikut:⁵⁶

Xavier do Amaral	: Presiden
Nicolao Lobato	: Perdana Mentri
Jose Ramos Horta	: Menlu
Mari Alkatiri	: Mendang

⁵⁶ Lopian dan Chaniago, *op. cit.* hlm. 66.



Abilio Conceicao	: Menkosos
Jose Goncalves	: Menko. Perekonomian dan statistik
Aires do A Parera	: Mendikbud
Juvenal Sanacio	: Menkeu
Alarico Josege G. F	: Menkoordaneg
Fernando de -	
Almeida do Carmo	: Wk. Ur. Keuangan
Antonio Duarte Carvarino	: Men. Pengadilan Sosial
Vicente Reis	: Men. Tenaga
Guido Valdares	: Wk. Men. tenaga
Hermingildo Alves	: Men. Pertahanan
Elio Sanchespina	: Wk. Men. Pertahanan
Nicolao de Jorge	: Men. Perhub & Transport
Domingos Dos Santos	: Wk. Menperhubta

FRETILIN mengklaim bahwa Timor Timur saat itu berada di bawah kekuasaan dirinya. Proklamasi FRETILIN itu mengusarkan banyak pihak, termasuklah pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan tindakan sepihak itu, termasuk juga menyesal atas sikap pemerintah Portugis yang membenarkan tindakan FRETILIN. Tindakan FRETILIN itu bertentangan dengan usaha yang dilakukan oleh Indonesia kearah tercapainya penentuan sendiri nasib Timor Timur.

b. Proklamasi Balibo.

Proklamasi Balibo yang dicetuskan tanggal 30 November 1975 sebagai reaksi dari proklamasi tandingan terhadap proklamasi yang dilakukan oleh FRETILIN sebelumnya. UDT, APODETI, KOTA dan TRABALHISTA menentang dengan keras proklamasi ciptaan FRETILIN, karena itulah mereka mengeluarkan pernyataan kesepakatan di Balibo yakni mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak oleh FRETILIN, proklamasi itu lebih dikenal sebagai Proklamasi Balibo. Sejak deklarasi Balibo inilah titik awal integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI. Seminggu setelah itu, satuan udara dan laut Indonesia secara terbuka digelar di sekitar Dili.⁵⁷

Satu hal yang telah lama tumbuh dalam pikiran rakyat Timor Timur adalah kesadaran mereka bahwa saudara-saudara mereka di wilayah Indonesia bagian Timor telah berhasil melepaskan diri dari belenggu Belanda dan Portugal. Karena itulah mereka (kecuali FRETILIN), bertekad menggabungkan Timor Portugis dengan Indonesia.

Teks proklamasi Balibo yang disusun berdasarkan kesepakatan keempat partai politik, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Terjemahan bebas teks tersebut adalah⁵⁸:

Kami, rakyat Timor Portugis yang di wakili oleh APODETI-*Associacao Popular Democratica de Timor*, UDT-*Uniao Democratica de Timor*, KOTA-*Klibor Oan Timor Aswain and Partido Trabalhista*, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi sepihak FRETILIN yang terwujud melalui, "Proklamasi Kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh pemerintah Portugis; kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.

⁵⁷ Safroedin Bahar dan Tangdililing, *op.cit.* hlm. 246.

⁵⁸ Lopian dan Chaniago, *op.cit.* hlm. 67-69.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai terutama dalam masalah Timor, terutama:

- Pertemuan Macao, dimana dengan sengaja FRETILIN tidak hadir walaupun pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.
- Kesiediaan pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara menteri-mentri luar negeri Portugis dan Indonesia. Yang telah menghasilkan memorandum yang saling pengertian diantara kedua negara.
- Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa FRETILIN dengan sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebut, tambahan lagi FRETILIN menunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya, telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang sah.

Mengingat suasana yang disebabkan oleh FRETILIN dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah meninggalkan segala kemungkinan kearah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat.

Merasakan, bahwa aksi kolonial Portugis dan Belanda yang hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara bangsa Indonesia dan Timor Portugis.

Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik, menyambung secara kokoh hubungan tradisi dengan bangsa sendiri.

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan alasan-alasan diatas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timur dengan negara Indonesia; Proklamasi ini adalah pernyataan yang paling sungguh-sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubungan dengan isi penyatuan ini, pemerintah Indonesia dan Rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang ingin merupakan bagian bangsa Indonesia, yang berada dibawah teror dan fasis yang dilakukan oleh FRETILIN dan direstui oleh Portugis. Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 ditandatangani oleh partai APODETI yang diwakili oleh Guilherme Maria Goncalves, partai UDT diwakili oleh Lopes Da Cruz, partai KOTA yang diwakili oleh Jose Martins dan partai TRABALHISTA yang diwakili oleh Domingus C. Pereira.

Portugis tetap sebagai penguasa atas tanah Timor Timur. Bagi pemerintah Indonesia sendiri tidak serta merta menerima keinginan sebagian besar rakyat Timor Timur, alasannya adalah akan membuat posisinya sulit di dunia

internasional. Atas desakan-desakan yang dilakukan oleh para petisi Dewan Perwakilan Timor Timur yang secara langsung datang ke Jakarta meminta agar pemerintah pusat di Jakarta segera meresmikan Timor Portugis ke dalam Wilayah Kesatuan RI. Maka pemerintah pusat mengeluarkan TAP MPR VI/1978 dan Timor Timur pada tanggal 17 Juli 1976 dinyatakan sebagai Propinsi RI yang ke-27.⁵⁹ Nama Timor Portugis pun diganti dengan nama Timor Timur.

Sejak saat berintegrasinya Timor Timur dengan Indonesia partai FRETILIN mengubah taktik perjuangan, disamping bergerilya juga melakukan diplomasi dan menggalang dukungan dengan pihak luar. Karena perjuangan FRETILIN yang gigih inilah menimbulkan apa yang kemudian dikenal dengan pemisahan sebagian besar keinginan rakyat Timor Timur dengan kesatuan wilayah Indonesia. Dan secara resmi berpisah sejak diumumkannya hasil jajak pendapat yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

⁵⁹ *20 Tahun Timor Timur Membangun (20 Years of Development In East Timor)*, Dili, 1976, hlm. 42-43.

BAB III

KEADAAN TIMOR TIMUR SELAMA DI BAWAH RI 1976-1999

A. Keadaan Politik

Tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian sistem pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia. Setelah integrasi disahkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, di Timor Timur kemudian dibentuk pemerintah sementara. Sebagai pelaksana pemerintah sementara maka diangkatlah putra Timor Timur yang pertama yaitu Arnaldo Dos Reis Araujo. Secara yuridis formal oleh pemerintah pusat sah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan dikeluarkannya UU VII/1976. Pada saat yang bersamaan Arnaldo Dos Reis Araujo dan Lopes da Cruz diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur yang pertama. Pada tahap yang selanjutnya, maka dikeluarkan pula peraturan No.19 tahun 1976 tentang pemerintah daerah di Timor Timur yang kemudian menjadi propinsi Indonesia yang ke-27.

Karena Timor Timur berada dalam tahap penyesuaian dengan sistem pemerintahan Indonesia, maka pemulihan keamanan merupakan hal yang pokok. Sisa-sisa FRETILIN diharapkan oleh pemerintah Indonesia mau bekerja sama untuk membangun propinsi Timor Timur bersama-sama dan tidak perlu lagi mempersoalkan masalah integrasi.

Pada tahun 1977, tidak banyak yang dicapai oleh tentara Indonesia dalam memulihkan keamanan di Timor Timur. Sekitar 75 % dari seluruh penduduk Timor Timur masih berada dibawah kontrol langsung pasukan FRETILIN.

Daerah-daerah kekuasaan mereka masih terbatas pada daerah-daerah pesisir dan desa-desa terpenting atau letaknya di daerah perbatasan. Daerah pedalaman yang berbukit di Timor Timur penyebab sulit tercapainya keinginan tentara Indonesia.

Pada tahun 1978-1979, usaha pembersihan sisa-sisa FRETILIN terus dilancarkan, sehingga mengakibatkan suatu masa yang benar-benar suram bagi FRETILIN. Pada tahap inilah mayoritas penduduk yang dikontrol oleh FRETILIN mulai menyerah kepada pasukan Indonesia, karena terdesak kelaparan dan penyakit. Operasi tahun ini dikenal dengan "Operasi Soraja".⁶⁰ Operasi ini melibatkan pasukan khusus berkekuatan sepuluh ribu orang dan telah menewaskan lima ribu orang Timor Timur dan seribu orang tentara Indonesia.

Meskipun penduduk setempat banyak yang menyerah, ternyata FRETILIN secara gigih terus bertahan. Sedikit demi sedikit anggotanya yang terpencar mulai mengorganisasi diri kembali di bawah kepemimpinan Xanana Gusmao yang menggantikan Nicolao Lobato karena tewas dalam Operasi Soraja. Sisa-sisa pengikut FRETILIN ini pada pertengahan tahun 1980-an melakukan serangan yang cukup mengejutkan atas kota Dili. Aksi FRETILIN itu menimbulkan tindakan balasan dari TNI dengan mengerahkan Batalyon 744 dan Batalyon 745.

Sampai pada akhir tahun 1983, kekuatan sisa-sisa FRETILIN tidak dapat ditumpas oleh TNI. Bahkan L.B Moerdani selaku Pangab RI waktu itu menyerukan kepada penduduk dan pejuang FRETILIN yang berada di gunung-gunung untuk menyerah. Hal ini menandakan bahwa eksistensi dan pendukung FRETILIN secara eksplisit masih ada.

⁶⁰ Zamora, *op.cit*, hlm. 28.

Di forum PBB masalah integrasi Timor Timur dengan Indonesia belum tuntas. Dari tahun 1975-1982 majelis umum PBB mengadakan pemungutan suara yang pada intinya menghendaki agar majelis umum menolak penggabungan Timor Timur dengan Indonesia dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia. Namun dari tahun ketahun dukungan terhadap PBB semakin berkurang dan negara-negara yang mendukung Indonesia bertambah. Data itu dapat dilihat sebagai berikut:

Perkembangan masalah Timor Timur di PBB:⁶¹

Tahun	Menentang RI	Mendukung RI	Abstain	Absen
1975	72	10	43	18
1976	65	20	53	7
1977	67	26	48	7
1978	59	31	45	14
1979	62	32	45	13
1980	58	35	46	15
1981	54	42	46	15
1982	50	46	50	11

Sedangkan pada sidang umum tahun 1983, masalah Timor Timur ditangguhkan atas usul dari Eropa Utara yakni Norwegia. Tahun ini juga masalah Timor Timur dihentikan karena masalah lain selain Timor Timur masih ada dan forum PBB sendiri mengalami kebosanan terhadap masalah Timor Timur yang belum selesai-selesai. Kesempatan itu diyakini oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu kemenangan yang semakin nyata.

⁶¹ Joao Mariano de S.S, *Ekonomi-Politik Pembangunan Timor Timur*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 295.

Setelah masalah Timor Timur ditangguhkan oleh PBB, propinsi Timor Timur menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan dari pemerintah Indonesia. Gubernur adalah salah satu lembaga pemerintah yang mulai diterapkan di Timor Timur. Hadirnya Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat tersebut secara bertahap, telah mengurangi peran lembaga yang dipercayai oleh masyarakat Timor Timur seperti *Liurai*. Akibatnya muncul sakit hati para *Liurai* terhadap pemerintah pusat Indonesia di Jakarta.

Pada tahun 1980-1991, pemerintah pusat dengan PELITA-nya memfokuskan diri membangun propinsi termuda ini secara fisik dan non fisik. Di samping itu keamanan tetap ditingkatkan supaya apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat dapat tercapai. Pada tahap ini pula dimanfaatkan oleh FRETILIN untuk mengubah strategi perjuangannya dari bergerilya ke perjuangan bawah tanah. Kontak senjata dengan TNI mereka kurangi dan diganti dengan melakukan propaganda di tengah-tengah masyarakat untuk menentang integrasi dan mengalang diplomasi dengan negara-negara tertentu yang siap dan mau mendukung gerakan mereka.

Pada tahun 1987 pendukung gerakan FRETILIN di Timor Timur bertambah satu yakni RENENTIL (*Resistencia Estudantil de Timor Leste-Perlawanan pelajar Timor Timur*). Anggota mereka masih muda-muda dan berasal dari berbagai golongan seperti FRETILIN sendiri, UDT, maupun APODETI. Sejak adanya organisasi ini, situasi keamanan kadang-kadang normal dan kadang-kadang terjadi konflik antara TNI dengan pihak FRETILIN dan anggota

RENTIL. Selama ini pula FRETILIN dan anggota RENTIL bahkan rakyat Timor Timur yang dicurigai, dicap oleh TNI sebagai GPK.⁶²

Akibatnya rakyat Timor Timur yang merindukan kedamaian dan ketentraman yang tidak berdosa menjadi korban kedua belah pihak. Rakyat yang menjadi korban tersebut akhirnya mendukung gerakan yang diperjuangkan oleh FRETILIN dan sebaliknya membenci tindakan ABRI. Hal ini nampak dari adanya jumlah kelompok anti integrasi yang diperkirakan 20.000 pada tanggal 4 September 1990 melakukan demonstrasi di Dili.⁶³

Situasi politik di tanah Timor Timur kembali memanas pada tahun 1991 karena adanya insiden Santa Cruz. Paling tidak ada 271 orang yang tewas dalam peristiwa itu yang disaksikan oleh seorang wartawan asing. Pada saat itu pula pemerintah Indonesia kembali menjadi “buah bibir” dunia internasional. Setelah insiden Santa Cruz itu setahun kemudian pemimpin FRETILIN yakni Xanana Gusmao ditangkap. Anehnya, dukungan terhadap rakyat Timor Timur dari luar negeri dan tuntutan untuk berdiri sendiri bertambah kuat. Hal itu nampak dari diberikannya nobel perdamaian bagi kedua orang putra Timor Timur atas usaha jerih payah mereka mewujudkan kedamaian bagi masyarakat Timor Timur. Nobel perdamaian itu diberikan kepada Uskup Belo yang memberikan perlindungan kepada penduduk Timor Timur tanpa memandang status yang pro dan kontra dan diberikan kepada Ramos Horta yang menggalang perdamaian untuk Timor Timur

⁶² GPK digunakan untuk mengintimidasi penduduk Timor Timur yang dilakukan oleh TNI. Label ini sangat menakutkan, karena berarti orang yang dituduh demikian akan diinterogasi dan disiksa oleh TNI. Bahkan setelah diculik dan disiksa jarang sekali mereka selamat kembali untuk berkumpul dengan keluarga dan handai tolan mereka. (Bdk. Aditjondro, *Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau: Dampak Pendudukan Timor Lorosae dan Munculnya Gerakan Pro Timor Lorosae di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak dan Fortilos, 2000, hlm.52).

⁶³ Safroedin Bahar dan Tandililing, *op.cit*, hlm. 248.

di dunia internasional. Menurut panitia nobel perdamaian, nobel itu diberikan kepada dua orang putra Timor Timur yang menaruh perhatian terhadap masalah kemanusiaan di Timor Timur dengan alasan bahwa jerih payah mereka dalam upaya penyelesaian konflik di sana dilakukan secara adil dan damai.⁶⁴

Nobel perdamaian yang diberikan kepada dua orang putra Timor Timur tersebut sangat mengharukan rakyat Timor Timur. Nobel perdamaian bagi Uskup Belo merupakan kemenangan bagi semua pihak yang menginginkan perdamaian, termasuk rakyat Timor Timur. Sedangkan bagi Ramos Horta sendiri nobel perdamaian itu layak diterima oleh saudaranya Xanana Gusmao yang di penjara oleh pemerintah Pusat Indonesia di Jakarta pasca insiden Santa Cruz. Dengan adanya pemberian nobel perdamaian itu, berita tentang Timor Timur menghiasi halaman depan media masa dunia internasional yang pada akhirnya mengutuk pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI-nya agar segera merubah kebijakannya mengenai status Timor Timur. Pemimpin orde baru waktu itu Presiden Soeharto, menanggapi pernyataan internasional yang masih memperlumahkan status Timor Timur dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur selangkahpun dan siap menghadapi tantangan dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.⁶⁵

Menyikapi pernyataan pemimpin negara Indonesia yang demikian, warga Timor Timur melakukan unjuk rasa dan protes terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Sebagai bukti protes mereka terjadi kerusuhan pada bulan Febuari 1997 di

⁶⁴ N.N. (1996, Oktober 19). "Uskup Belo: Kemenangan Bagi yang Berkehendak Bagi Semua". *Detektif dan Romantika*. Hlm. 76.

⁶⁵ N.N. (1995, Mei 27). "Presiden Tentang Timor Timur Indonesia Takkan Mundur Selangkahpun". *Suara Karya*. Timor Timur 1995 Jilid I. Jakarta, CSIS. Hlm.22.

kota Ambeno. Diperkirakan ratusan orang yang ikut mengungsi akibat kerusakan itu. Pada akhir tahun 1997, gerakan pemuda Timor Timur untuk memisahkan Timor Timur dengan NKRI muncul secara terang-terangan menunjukkan diri. Gerakan itu mereka namakan Gerakan Rekonsiliasi Persatuan Rakyat Timor Timur/GRPRTT.

Tawaran terhadap penyelesaian Timor Timorpun dalam lontaran pendapat mulai nampak. Tawaran otonomi menjadi perdebatan di kalangan elit politik. Otonomi dengan status khusus itulah solusi yang berkembang dan yang dianggap baik oleh pemerintah pusat. Otonomi khusus belum sempat diterapkan di Timor Timur karena bangsa Indonesia diterpa oleh krisis ekonomi yang kemudian merembet pada krisis politik, hukum dan sosial yang terjadi pada akhir tahun 1997. Konflik berdarah waktu itu tidak hanya terjadi di Timor Timur tetapi juga terjadi di Ambon, Maluku, Aceh, Irian dan Sambas. Karena krisis itulah menyebabkan rejim orde barunya Soeharto jatuh dan diganti oleh B.J Habibie dengan orde reformasinya. Presiden B.J Habibie mempunyai kebijakan yang lain terhadap penyelesaian kasus Timor Timur.

Timor Timur oleh pemerintah B.J Habibie dipandang sebagai beban politik bagi bangsa Indonesia dan Timor Timur terlalu mahal baik secara ekonomi maupun politis.⁶⁶ Karena alasan itulah B.J Habibie mengeluarkan pernyataan bahwa Timor Timur ditawarkan status otonomi khusus dan bila status itu tidak diterima, rakyat Timor Timur dipersilakan memilih berdiri sendiri atau merdeka.

⁶⁶ Dewi Fortuna Anwar. (1999, Febuari 8). "Habibie dan Timor Timur". *Tempo*. Hlm. 31.

Karena gendang untuk berdiri sendiri telah ditabuh oleh presiden B.J Habibie, sejak saat itu pula demonstrasi besar-besaran oleh rakyat dan terutama mahasiswa, menuntut untuk memilih berdiri sendiri mulai bermunculan.

Situasi keamanan di Timor Timur pada masa pemerintahan transisi 1998 tidak menentu bahkan kekerasan mewarnai pemandangan saat itu. Dukungan terhadap kemerdekaan dan tetap pro integrasi sama-sama saling mempersenjantai diri. Tak terbilang lagi berapa jumlah pengungsi yang pergi keluar Timor Timur untuk menyelamatkan diri.

Gerakan politik bermunculan untuk mempertahankan status integrasi dengan Indonesia seperti GADAPAKSI (Garda Muda Penegak Integrasi), PAMSWAKARSA, MAHIDI (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia), BMT (Barisan Merah Putih) dan PPT (Pasukan Pejuang Integrasi). Dan gerakan yang membela Timor Timur supaya berdiri sendiri seperti, ASDT, FRETILIN, UDT dan CNRT. Bentrokan antar kubu yang berseteru tersebut kerap terjadi bahkan jauh sebelum adanya tawaran dua opsi pemerintah RI. Adanya tawaran otonomi khusus atau merdeka-perselisihan antar kubu tidak pernah benar-benar berhenti.⁶⁷

Adanya pro kemerdekaan dan pro otonomi khusus, diantara rakyat Timor Timur tersebut, menghantar mereka pada isu perang saudara lagi seperti pada tahun 1975 yang silam. Penduduk sipil saling membunuh satu sama lain hanya demi kepentingan sebuah politik. Pada akhirnya kasus Timor Timur yang tidak kunjung usai tersebut diselesaikan dengan melakukan jajak pendapat pada bulan Agustus 1999. Jajak pendapat dilakukan untuk mengetahui keinginan yang

⁶⁷ N.N. (1999, Maret 7). "Arwah Mengundang Pasukan PBB". *Gamma*. Hlm. 59.

sebenarnya dari rakyat Timor Timur dengan hasil mayoritas menginginkan merdeka.

B. Keadaan Sosial

Antara tahun 1976-1978 keadaan sosial masyarakat Timor Timur belum menentu. Karena mereka hidup dalam pengungsian ke kamp-kamp bekas pemerintahan Portugis. Keperluan terhadap obat-obatan dan pangan sangat tergantung pada militer Indonesia. Mereka yang mengungsi saat itu diperkirakan 300 ribu orang, sehingga persediaan obat-obatan dan pangan untuk mereka serba terbatas. Kelaparan rentan menyerang mereka di tempat pengungsian. Selain itu, mereka terserang berbagai macam penyakit seperti TBC, lepra, paru-paru lembab, DB serta kekurangan gizi. Ada perkiraan bahwa sampai tahun 1979 ada 300 orang yang meninggal dunia.

Aktivitas sosial seperti jual beli barang kebutuhan pokok sehari-hari di pasar, ke ladang untuk bercocok tanam, ke laut untuk menangkap ikan dan relasi dengan kaum kerabat atau tetangga dekat tidak dapat mereka lakukan. Segala aktivitas yang akan dilakukan harus diketahui oleh militer. Menjaga keamanan di Timor Timur dilakukan oleh militer dengan maksud untuk melenyapkan kemungkinan munculnya kembali perlawanan yang bersumber pada kesatuan-kesatuan tradisional seperti klen, kampung atau desa.⁶⁸ Kehidupan yang seperti itu adalah merupakan babak baru bagi masyarakat Timor Timur di pengungsian.

⁶⁸ John, G. Taylor, *op.cit.* hlm.166.

Karena mereka harus memiliki kawan yang baru dan memulai relasi dengan sahabat baru.

Bangunan fisik peninggalan Portugis tidak banyak yang berarti bagi kehidupan sosial masyarakat Timor Timur. Seperti sekolah dan rumah sakit jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Hal inilah yang menyebabkan rakyat Timor Timur terbelakang, miskin, buta huruf dan kekurangan pangan. Karena hal tersebut, maka tahap demi tahap fasilitas sosial seperti rumah sakit dan gedung sekolah dari SD sampai SLTA dibangun oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1984, pemerintah membangun Timor Timur dalam empat sektor dengan prioritas pembangunan darat, pendidikan, pertanian dan kesehatan.⁶⁹ Pembangunan darat dilakukan melalui pengerasan, pengaspalan dan membuat jalan tembus dari satu wilayah ke wilayah lain. Di pendidikan yang dilakukan pertamanya adalah pemberantasan buta huruf, pengajaran bahasa Indonesia dan membangun sekolah-sekolah dari SD hingga SLTA. Di sektor pertanian, dilakukan penyuluhan pertanian. Sedangkan disektor kesehatan dibangunlah puskesmas-puskesmas dan mendatangkan tenaga medis dari daerah lain.

Seiring dengan dibangunnya sarana pendidikan dan kesehatan kemudian timbul masalah mengenai minimnya tenaga pengajar dan tenaga medis. Sekiranya ada tenaga pendidik dan tenaga medis dari pusat yang dikirim ke Timor Timur sangat terbatas dan mereka kurang mengerti bahasa Tetum. Bahasa Indonesia belum memasyarakat di tengah-tengah rakyat. Akibatnya, tenaga medis dan pengajar kurang simpatik terhadap rakyat Timor Timur. Contohnya adalah para

⁶⁹ N.N. (1994, Januari 20). "Selama Repelita IV: Prioritas Pembangunan di Timor Timur 4 sektor". *Suara Karya*. Timor Timur 1994. Jakarta, CSIS. Hlm. 4

dokter yang dikirim ke sana kurang mengerti terhadap situasi sosial dan situasi politik serta budaya setempat. Hal itulah yang menghalangi mereka menjadi simpatik terhadap rakyat Timor Timur.⁷⁰ Untuk mengatasi kekurangan hal tersebut, para medis dan tenaga pengajar didatangkan dari luar Timor Timur. Tindakan pemerintah pusat ini nantinya akan menyebabkan interaksi sosial antara penduduk setempat dengan pendatang sehingga kurang harmonis.

Para imigran datang ke Timor Timur sejak tahun 1985. Para transmigran tersebut berasal dari Sulawesi, Jawa, Bali dan NTT. Kaum imigran ini pula nantinya yang akan membawa masalah terhadap isu berkembangnya konflik “berbau” agama dan ras. Terjadinya hal tersebut karena para transmigran kebanyakan beragama Islam sedangkan rakyat Timor Timur mayoritas beragama Katolik. Akibat lain yang timbul dari adanya program transmigrasi oleh pemerintah tersebut adalah beberapa tanah milik penduduk Timor Timur seperti di Bobonaro dan Covalima “dirampas” dari tangan penduduk setempat.

Daerah tempat transmigran tersebut seperti di Covalima, Bobonaro, Manututo dan Manufahui. Hingga tahun 1995 transmigran tersebut diperkirakan berjumlah 2.644 orang.⁷¹

Para imigran dari Jawa dan Bali menguasai tanah yang subur untuk pertanian dan para imigran dari Sulawesi menguasai pasar dan toko-toko di seluruh Timor Timur. Sedangkan imigran dari NTT ada yang bekerja di kantor pemerintah dan swasta. Data ini mau mengatakan bahwa kesempatan usaha yang dimiliki oleh rakyat Timor Timur sudah sempit karena telah diisi oleh para

⁷⁰ Bdk. Aditjondro, *op.cit.* hlm.212.

⁷¹ *ibid*, hlm. 58-61.

transmigran tersebut. Hal ini kemudian memunculkan masalah sosial seperti, pengangguran, perampokan penodongan dan sebagainya. Diperkirakan jumlah pengangguran di Timor Timur sebanyak 18.000 orang.⁷² Puncak kemarahan penduduk Timor Timur terhadap kesenjangan sosial ekonomi tersebut terjadi pada 12 November 1991.

Peristiwa 12 November 1991 disebut juga dengan insiden Santa Cruz 1991 telah menewaskan sekitar 271 orang. Insiden 12 November 1991 tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang mengundang reaksi dunia internasional dan menjadi batu sandungan bagi pemerintah pusat untuk segera menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peristiwa itu untuk segera diadili. Pada sisi lain dunia internasional khususnya panitia nobel perdamaian benar-benar memberikan perhatian kepada rakyat Timor Timur. Mereka memberikan nobel perdamaian kepada dua orang putra terbaik Timor Timur lima tahun pasca insiden Santa Cruz.

Pada bulan Agustus 1998 menjelang perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-22 di Timor Timur, para imigran dan penduduk Timor Timur mendapatkan teror dari kelompok yang menamakan diri mereka kelompok pendukung integrasi dengan Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan. Kedua kelompok ini saling membantai dan saling menyerang. Munculnya dua kubu yang saling membantai, menyerang, penuh dengan teror dan intimidasi tersebut karena pernyataan dari presiden Habibie yang melontarkan dua tawaran yakni otonomi khusus dan jika menolak dipersilakan memilih sebagai negara yang berdiri sendiri.

⁷² N.N. (1995, Mei 19). "Ada 18.000 Penganggur di Timor Timur". *Bisnis Indonesia*. Timor Timur 1996 Jilid I. Jakarta, CSIS. Hlm. 200.

Organisasi-organisasi yang mendukung kedua kubu tersebut mulai berani menunjukkan diri. PPI (Pasukan Perjuangan Integrasi), IMPETTU (Ikatan Mahasiswa Pemuda Timor Timur), GADAPAKSI (Garda Muda Penegak Integrasi), MAHIDI (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) dan BMT (Besi Merah Putih) yang pro terhadap integrasi dengan Indonesia. Mereka ini sebagian dilatih dan dipersenjatai oleh ABRI. Di sisi lain ada CNRM (*Conselho Nacional Resistencia Maubere*), CNRT (*Concelho Nacional de Restencia Timorese*) dan FALINTIL (*Forças Armadas da Libertacao Timor Leste* atau Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat Timor Timur) yang dengan giat memperjuangkan Timor Timur untuk merdeka.

Pada awal tahun 1999 masing-masing pihak mulai melakukan perang urat syaraf dengan melakukan intimidasi, teror, penindasan, pemerkosaan dan berbagai hal lain yang berupa pelecehan hak asasi manusia.⁷³ Penduduk Timor Timur kebanyakan tidak berani keluar rumah sehingga aktivitas seperti sosial politik dan sosial ekonomi hampir lumpuh. Tidak heran rumah-rumah penduduk, kendaraan baik mobil maupun sepeda motor dibakar oleh mereka yang berseteru.

Lopes Da Cruz memperkirakan sekitar 100.000 orang telah mengungsi untuk menyelamatkan diri. Mereka betah menunggu kapal yang singgah ke Timor Timur berhari-hari dan bermalam-malam. Suasana dalam arus pengungsian itu tampak tidak baik. Berdempet-dempet, berdesak-desakan, suara jeritan tangis dan saling sikut mewarnai suasana para pengungsi meninggalkan kota Timor Timur.

⁷³ Martino Sardi, *Timor Lorosae Merdeka dalam Pandangan Romo Mangunwijaya*, Makalah disampaikan di Roma tanggal 14 Mei 1999, hlm. 7

Dampak pengungsian itu kemudian menimbulkan masalah baru bagi Indonesia dan Timor Lorosae pasca jajak pendapat nanti.

Penyelesaian masalah Timor Timur oleh PBB, Portugal dan Indonesia disepakati dengan memberikan status otonomi khusus kepada rakyat Timor Timur. Namun pemerintahan B.J Habibie kemudian menawarkan opsi yang lain yakni bila menolak status otonomi luas maka rakyat Timor Timur boleh merdeka. Opsi yang terakhir inilah yang menghantarkan rakyat Timor Timur betul-betul memilih lepas dari Indonesia. Jajak pendapat sebelumnya dimumkan 5 Mei 1999. Kemudian dewan keamanan PBB membentuk misi perdamaian untuk Timor Timur yang dikenal dengan UNAMET=*United Nations Assesement Mission In East Timor* pada 1 Juni 1999. Sejak itu pula keamanan di Timor Timur dan masalah sosial politik ditangani oleh UNAMET dan bekerja sama dengan TNI.

C. Keadaan Pendidikan

Awal tahun 1976, keadaan fasilitas pendidikan di Timor Timur pasca peninggalan Portugis dapat dihitung dengan jari. Demikian pula dengan lulusan sekolah tinggi seperti sarjana. Peninggalan pendidikan masa Portugis bagi masyarakat Timor Timur tidak banyak berarti karena sekitar 92 % penduduk Timor Timur buta huruf. Mayoritas mereka tidak dapat membaca.⁷⁴ Untuk mengurangi keterbelakangan tersebut, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan dengan cara membentuk badan koordinasi pusat pendidikan dan

⁷⁴ Ridwan Suryantho. (1983, Januari 20). "Timor Timur Mengejar Ketertinggalannya". *Antara*. Timor Timur 1983. Jakarta, CSIS. Hlm. 5.

kebudayaan. Adapun yang menjadi tugas utamanya adalah mengajar cara menulis, membaca dan berhitung serta memperbaiki sarana dan prasarana gedung sekolah peninggalan Portugis. Sebagai hasil usaha tersebut, terdapat 47 buah gedung sekolah dengan jumlah murid mencapai 13.501 orang dan tenaga guru sebanyak 499 orang. Sedangkan di tingkat SLTP, pada tahun 1976 baru ada dua buah SLTP dengan jumlah siswa 315 orang dan tenaga guru sebanyak sepuluh orang.⁷⁵

Gedung sekolah bertambah jumlahnya pada tahun ajaran 1977-1978. Terdapat 107 buah SD dengan jumlah murid 23.041 orang, ditunjang dengan tenaga guru 641 orang. Kemudian pada tahun 1978-1979, jumlah Sekolah Dasar bertambah menjadi 208 buah dengan jumlah murid 41.453 orang dan tenaga guru 595 orang.⁷⁶

Sekolah Tingkat Pertama dari dua buah bertambah menjadi sembilan buah dengan jumlah siswa sebanyak 926 orang. Kemudian pada tahun 1978-1979 dari sembilan buah menjadi 14 buah dengan 1041 orang siswa. Untuk tingkat SLTA sampai tahun 1983 terdapat tiga gedung sekolah dengan jumlah murid 286 orang.

Tahun ajaran 1978-1982, di tingkat SD, SLTP, maupun SMA tenaga pendidik dan administrasinya sangat terbatas. Tercatat pada waktu itu, tenaga administrasi sebanyak 18 orang. Padahal pada saat itu ada 18 buah gedung SLTP dan 3 buah gedung SMA.⁷⁷ Guna mengejar ketertinggalanya dari propinsi lain di Indonesia, pengajaran Bahasa Indonesia menjadi bahan ajar di sekolah dan sekaligus sebagai mata pelajaran umum yang wajib.

⁷⁵ 20 Tahun Timor Timur Membangun, *op.cit*, hlm. 107.

⁷⁶ *ibid*. hlm. 109.

⁷⁷ John, G. Taylor, *op.cit*, hlm. 113.

Pendidikan di Timor Timur mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1983 jika diukur dari jumlah gedung sekolah dan jumlah siswanya. Seperti yang dikutip oleh Koran Antara: terdapat 376 gedung sekolah SD negeri dan swasta dengan murid berjumlah 9000 orang yang terdiri dari 90% berusia 7-12 tahun dan sisanya berusia 13 tahun keatas. Delapan belas buah gedung sekolah SLTP dengan jumlah muridnya kira-kira 1.500 orang. Tiga buah gedung SLTA dengan jumlah siswanya kira-kira 800 orang. Untuk perguruan tinggi tercatat 200 orang putra putri Timor Timur sedang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.⁷⁸ Tahun 1986 baru dapat didirikan sembilan buah sekolah kejuruan. Di antaranya empat buah SMEA, dua STM, SMKK, SMOS, dan SMFA.

Dari data diatas, memang dari tahun ketahun jumlah siswanya meningkat, tetapi kemudian muncul masalah baru yakni banyak jumlah lulusan sekolah dari tingkat SD-SMA belum siap dan dapat bekerja di berbagai tempat baik di sektor pemerintah maupun swasta. Guna merespon jumlah kelulusan tersebut, maka didirikanlah sebuah Universitas yang pertama di Timor Timur dengan nama Universitas Timor Timur/UNTIM. Kampus ini didirikan pada tahun 1986 dengan membuka tiga Fakultas: Fakultas Pertanian, Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain kampus UNTIM, ada kampus Universitas Terbuka/UT dengan sistem pelajaran jarak jauh. Universitas Terbuka berdiri tahun 1986 dengan empat program studi: Ekonomi dan Pembangunan, Administrasi Negara, Administrasi Niaga dan Statistik Terapan. Bahkan pada tahun 1989 didirikan sebuah politeknik dengan empat jurusan: Teknik Mesin, Teknik Sipil,

⁷⁸ Rafa' at Nurdin. (1983, Januari 20). "Timor Timur Terus Bergerak Membangun". Antara. Timor Timur 1983. Jakarta.CSIS. Hlm. 20

Teknik Elektro dan Tata Niaga. Hanya satu perguruan Tinggi yang berbasis agama yakni lulusannya dipekerjakan sebagai guru agama Katolik dengan nama Institut Pastoral Indonesia/IPI.

Tahun 1995 adalah wisuda perdana di UNTIM dengan meluluskan 56 sarjana. Lulusan mahasiswa dari tahun ke tahun tentunya akan bertambah. Kemudian muncul suatu persoalan baru lagi. Pada satu sisi memang pendidikan dipandang berhasil karena memberantas penduduk yang buta huruf tetapi disisi lain ketidak seimbangan dari banyaknya lulusan yang mencari kerja. Banyaknya jumlah pencari kerja “mibanjir” pada tahun 1991. Pencari kerja seperti yang terdaftar di kantor departemen tenaga kerja propinsi Timor Timur baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 6.390 orang. Dari jumlah ini banyak yang berlatar belakang pendidikan SLTA yaitu 3.892 orang, disusul SLTP 1.467 orang, SD 372 orang, sarjana muda 326 orang dan S-1 sebanyak 21 orang.⁷⁹

Pertumbuhan kesempatan kerja bagi rakyat Timor Timur sangat lambat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja lulusan dari tingkat pendidikan. Hal itu telah berada diambang krisis menuju pada kerusuhan sosial. Seperti yang diungkap oleh Joa Mariano, bahwa keseimbangan pertumbuhan kebutuhan dari penyediaan tenaga kerja besar sekali perbedaannya. Lulusan SD 95 % rata-rata menganggur dan 4,5 % pengangguran menimpa lulusan SLTP dan SLTA.⁸⁰ Pengangguran telah menumpuk masalah yang baru bagi masyarakat Timor Timur yang kemudian masalah itu menimbulkan ketidakpercayaan mereka pada

⁷⁹ N.N.(1991, Maret 25). “Mutu Angkatan Kerja di Timor Timur Perlu ditingkatkan”. *Angkatan Bersenjata. Timor Timur 1992* Jilid II. Jakarta, CSIS. Hlm. 110

⁸⁰ Joa Mariano, *op.cit*, hlm. 271.

pemerintah pusat di Jakarta. Hal ini nampak dari hasil jajak pendapat yang dilakukan tanggal 30 Agustus 1999 yang diumumkan hasilnya 4 Oktober 1999 dengan kemenangan mutlak memilih berdiri sendiri dari pada berintegrasi dengan NKRI.

D. Keadaan Agama

Agama Katolik merupakan agama peninggalan satu-satunya bangsa Portugis di Timor Timur. Karena itu, mayoritas penduduk di Timor Timur menganut dan mengenal agama Katolik. Sejak invansi militer Indonesia ke Timor Timur tahun 1975, agama lain selain Katolik mulai hadir di tengah-tengah rakyat Timor Timur. Agama yang dimaksud selain Katolik seperti Islam, Protestan, Budha dan Hindu.

Untuk membangun propinsinya yang termuda itu setelah dinyatakan sah dengan TAP MPR/VI/1978-nya, maka didatangkanlah tenaga-tenaga kerja yang beragama lain yang bekerja pada berbagai instansi di Timor Timur.

Agama Katolik merupakan agama yang mayoritas diyakini dan dianut oleh penduduk Timor Timur. Beribadat, melakukan misa kebaktian dan merayakan hari besar dalam agama Katolik seperti Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang jatuh pada bulan Desember, Kematian Yesus Kristus dan Kebangkitan-Nya yang jatuh pada bulan April atau Mei dapat mereka lakukan dengan penuh khidmat. Namun ketika pemerintah Indonesia mendatangkan imigran-imigran dari luar Timor Timur yang beragama lain, kekhidmatan mereka dalam menjalankan agama mulai

terganggu. Hal itu nampak dari apa yang dikatakan oleh Aditjondro⁸¹ bahwa para imigran yang datang ke Timor Timur secara perlahan-lahan telah menggeser kenyamanan penduduk Timor Timur untuk beribadat. Imigran yang datang dari Bali misalnya, selain membangun sistem persawahan juga mendirikan Pura. Demikian pula halnya dengan imigran yang berasal dari Sulawesi dan Jawa yang beragama Islam, mereka membangun Surau dan Masjid dengan suara pengeras yang dipasang di atasnya. Tak luput pula mereka yang berasal dari Sulawesi yang beragama Kristen yang juga turut mendirikan Gereja. Para imigran-imigran dengan agama-agama yang berbeda tersebut hidupnya mengelompok membangun basis agama mereka dan mendirikan tempat ibadat tanpa ada persetujuan dengan penduduk Timor Timur.

Agama Katolik adalah agama yang cocok dan sebagai pilihan yang paling mungkin bagi rakyat Timor Timur karena agama Katolik merupakan agama yang ditinggalkan Portugis yang sesuai dengan budaya mereka dan agama-agama lain yang dibawa para imigran Indonesia merupakan agama yang baru dan pendatang. Sehingga banyak umat Katolik Timor Timur baik kaum awam maupun kaum agamawan, mencemaskan masuknya warga Indonesia yang non Katolik.⁸²

Dari prosentase penduduk Timor Timur berdasarkan agama tahun 1994, nampak bahwa jumlah orang yang menganut agama Katolik dan non Katolik hampir mencapai keseimbangan jumlahnya. Terutama agama Islam menduduki urutan kedua setelah agama Katolik. Dari total agama non Katolik yang ada

⁸¹ Aditjondro, *op.cit.*, hlm.63-64.

⁸² *ibid.*, hlm. 220.

berjumlah sekitar 59.604 orang, dan sedangkan agama Katolik jumlahnya 73.800 orang.

Persentase penduduk Timor Timur berdasar agama:⁸³

Agama	Jumlah	Persentase dari Total penduduk
Katolik	73.800	48,02
Islam*	30.655	19,95
Protestan*	23.513	15,30
Hindu*	4.460	2,90
Buddha*	976	0,63
Lain-lain (termasuk agama lokal)	20.252	13,18
Total	153.657	

Keterangan: *jumlah total agama pendatang 59.604

Jumlah angka itu menunjukkan bahwa agama lain hampir mewarnai kehidupan agama mayoritas yang dianut oleh rakyat Timor Timur dan suatu saat akan menggeser agama Katolik sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Timor Timur.

Bagaimanapun meningkatnya pluralitas agama di sana telah menyebabkan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik oleh ulah para imigran dari Sulawesi dan Jawa yang beragama Islam maupun militer Indonesia. Berikut ini adalah gambaran singkat kejadian berlatar belakang agama tersebut.

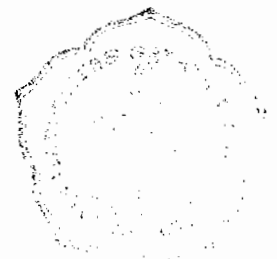
⁸³ Dikutip dari *Timor Timur Dalam Angka 1993*. Dili:Bappeda Tk. I dan Kantor Statistik Propinsi Timor Timur, 1994: hlm. 166.

Pada bulan Januari tahun 1987 di Comoro, Dili, terjadi perusakan terhadap patung Bunda Maria oleh seorang umat yang dipaksa oleh seorang aparat keamanan. Pada bulan September tahun 1991, di Malilait Bobonaro, dua orang militer Indonesia yang beragama Islam mengikuti misa di Gereja Remexio, mereka meludahi dan menginjak hosti yang dianggap paling suci oleh umat Katolik. Selain itu aparat keamanan telah merusak kapel di Bobonaro. Pelecehan agama yang paling besar adalah insiden Dili yang lebih dikenal dengan insiden Santa Cruz. Kapel dan pemakaman Santa Cruz dilempari batu dan dihujani oleh tembakan peluru.⁸⁴

Selain aparat militer Indonesia yang beragama Islam yang berbuat seperti itu, juga dilakukan oleh beberapa imigran dari Sulawesi yang beragama Islam. Imigran dari Sulawesi ini lingkungannya sangat tertutup dan fanatik. Mereka mendirikan mesjid-mesjid yang dilengkapi dengan pengeras suara guna memanggil umat untuk sembahyang lima kali sehari.

Kemarahan terhadap penduduk non Katolik yang dilakukan oleh penduduk Timor Timur mulai memuncak tahun 1997. Kemarahan mereka ditujukan kepada imigran dari Sulawesi. Kejadian itu sendiri pada tanggal 21 Februari 1997 antara 3-6 ribu umat Katolik Timor Timur melampiaskan kemarahannya kepada imigran muslim Indonesia, setelah terdapat selentingan bahwa pastor Paroki mereka Lazarus Maubut diracuni di markas militer di Ambeno. Kemudian ditemukan bahwa 86 rumah imigran Bugis dibakar, seorang Bugis ditusuk dan tujuh orang lainnya terluka parah dan 329 imigran muslim lainnya kehilangan tempat

⁸⁴ Bdk. Aditjondro. *op. cit.*, hlm. 224-226.



tinggal.⁸⁵ Polisi menangkap tiga orang pemuda Timor Timur dalam kasus itu. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan antara masyarakat Timor Timur yang mayoritas Katolik dengan imigran Indonesia yang mayoritas muslim memang sengaja dipertahankan pada suatu titik tertentu, tepat pada batas kemarahan rakyat Timor Timur.

Pertentangan antar agama terutama rakyat Timor Timur yang Katolik dengan imigran Indonesia yang Islam tidak dapat disembunyikan. Komisi hak asasi manusia PBB untuk Timor Timur telah mengangkat isu itu di hadapan sidang PBB. Kasus konflik yang berbau sara di Timor Timur yang diangkat oleh komnas HAM PBB adalah kasus yang terjadi pada bulan September 1995. Keributan itu terjadi di Maliana, Vatolari dan di Dili yang disebabkan oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dari petugas penjara Maliana yang menyingung perasaan rakyat yang berbeda agama dan mudah berkembang menjadi kerusuhan dengan unsur antar suku dan agama di beberapa kota di Timor Timur.⁸⁶ Bahkan komisi HAM PBB untuk Timor Timur mencatat laporan kekerasan terhadap agama dan suku telah meningkat tahun 1996 yang diduga sebagian karena dipropokasi secara sengaja.

Agama Katolik terasa kental dalam masyarakat Timor Timur. Maka tidak heran jika simbol-simbol keagamaan mereka dilecehkan dan dihina akan mereka lawan dengan kekerasan. Rakyat Timor Timur memang dekat dengan pimpinan gereja karena mereka merasa dilindungi dan pemimpin gereja dekat dengan

⁸⁵ *ibid*, hlm.70.

⁸⁶ *Timor Timur di Komisi Hak Asasi Manusia PBB*, Jakarta, Komite Bersama Untuk Masyarakat Timor Timur, 1997, hlm.11.

mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa gereja Katolik pasca kolonial Portugal dan selama integrasi dengan Indonesia menjadi sebuah institusi yang menjadi pusat perhatian yang mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak masyarakat Timor Timur menuju pembelaan hidup demi perdamaian dan kesejahteraan umum.



BAB IV

PROSES TERJADINYA DISINTEGRASI 1999

A. Timor Timur di Mata Dunia

Salah satu kekurangan berintegrasinya Timor Timur dengan Negara Kesatuan Indonesia yang dikukuhkan dengan TAP MPR/VI/1978 oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah belum mendapat pengakuan dunia internasional. Bahkan kasus integrasi yang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia di forum internasional terutama di DK PBB mengalami hambatan. Mayoritas forum di DK PBB sepakat bahwa kasus Timor Timur diselesaikan dengan memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk mendengarkan aspirasi mereka yang sebenarnya belum dilakukan oleh Indonesia.

Meskipun secara mayoritas forum DK PBB menghendaki agar kasus Timor Timur diselesaikan dengan cara referendum, masih ada negara-negara tertentu yang konsisten dengan dukungannya bahkan ada negara yang netral atau memihak keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Berikut akan jelas sikap-sikap negara-negara tersebut.

1. Negara-negara Barat

a. Australia

Pada satu sisi pemerintah Australia berpandangan bahwa mengakui integrasi Timor Timur dengan Indonesia karena mereka mempunyai kepentingan ekonomi terhadap Timor Timur. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan rutin antara

komite bisnis Indonesia dan Australia (AIBC). Pertemuan ini dihadiri oleh semua perusahaan terbesar di Australia, pejabat Departemen seperti Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. AIBC kemudian meminta kepada pemerintah Australia agar pemerintah mempertegas pengakuannya atas integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Mereka telah memperhitungkan bahwa celah Timor antara Australia dan Timor Timur mengandung cadangan minyak sebanyak lima miliar barel. Tidak lama kemudian Menlu Australia menyatakan bahwa Australia segera mengakui integrasi Timor Timur demi alasan kemanusiaan dan lebih mengakui tindakan itu dari lingkungan regional serta memahami pandangan Indonesia bahwa Timor Timur sekarang adalah bagian dari bangsa Indonesia dan bahwa situasi semacam ini tidak mungkin diubah.

Pada sisi lain pandangan di atas berseberangan dengan pandangan pengusaha-pengusaha Australia. Mereka ini adalah para buruh Australia yang berkeinginan agar Australia membantu perjuangan kemerdekaan Timor Timur karena negaranya pernah berhutang budi kepada masyarakat daerah itu. Hal ini tercermin oleh reaksi pers, serikat buruh dan masyarakat Australia terhadap integrasi Timor Timur. Pers Australia selalu melancarkan kritik dan berita yang menentang pemerintah Indonesia. Sedangkan sikap buruh Australia melakukan aksi pemboikotan terhadap angkutan pos Indonesia.⁸⁷

b. Amerika Serikat

Amerika Serikat sendiri mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Menurut John G. Taylor, Amerika Serikat berpandangan demikian

⁸⁷ Joa Mariano. *op.cit.*, hlm 308-309.

karena kepentingan keamanan. Amerika membutuhkan niat baik pemerintah Indonesia. Puncak kepentingan itu adalah keinginannya tetap digunakannya selat Ombai-Wetar (di Samudra Hindia dan Pasifik) sebagai lintasan kapal selam Amerika Serikat. Saat itu rancangan undang-undang kelautan sedang dibahas di PBB, yang kemungkinan besar meniadakan hak lintas bawah laut. Permasalahan ini bukan suatu yang menyenangkan bagi negeri adikuasa, jika kapal selam bersenjata nuklir dilarang melintas di bawah laut tanpa halangan melalui selat-selat internasional yang terletak di perairan wilayah negara tertentu. Bagi Amerika Serikat, beberapa selat yang harus dilintasi untuk mencapai sasaran tanpa bergantung pada ijin negara sekutunya, terutama adalah Selat Gibratal dan Selat di Indonesia, Lombok dan Ombai-Wetar.⁸⁸ Amerika Serikat memandang juga bahwa kasus Timor Timur di DK PBB yang dipermasalahkan oleh forum sikapnya netral tidak memihak salah satu pihak baik Indonesia maupun forum DK PBB sendiri.

c. Jerman.

Dalam surat kabar Jerman Barat yaitu *Derbund* 9 Juni 1976 dalam artikelnya menyatakan bahwa persoalan Timor Timur dengan suara bulat telah menginginkan bergabung dengan Indonesia. Sementara itu surat kabar *Nuve Zurchen Zeihing* 9 Juni 1976 juga dengan tegas menilai bahwa masalah Timor Timur sudah selesai karena rakyat secara bulat menyatakan bergabung dengan Indonesia.⁸⁹ Hanya saja karena tidak dipenuhinya resolusi DK PBB dan tidak diadakannya referendum, kemungkinan besar akan menimbulkan perdebatan baru

⁸⁸ Bdk. John G. Taylor, *op.cit*, hlm. 135.

⁸⁹ N.N. (1976, Juni 16). "Surat Kabar Jerman Dukung Integrasi Timor Timur dengan RI". *Suara Karya*. Integrasi Timor Timur 1976 Jilid II. Jakarta. CSIS. Hlm. 109.

di Dewan Keamanan PBB yang mungkin berakhir dengan tidak diakuiinya status daerah Timor Timur oleh Portugal.

d. Portugal.

Portugal bersikap tegas mengutuk Indonesia karena telah merebut Timor Timur sambil mengklaim diri sebagai penguasa administratif daerah itu. Portugal dengan berbagai upaya mempengaruhi anggota sidang di DK PBB agar anggota sidang mengeluarkan statemen mengutuk Indonesia. Portugal secara aktif ikut membantu merumuskan resolusi-resolusi yang mengancam Indonesia di DK PBB. Namun pada prinsipnya seperti apa yang dituturkan Menlu Portugal yakni Joao de Deus Pinheiro yang giat menyampaikan pandangan mengenai penyelesaian masalah Timor Timur agar diadakan suatu dialog serius mengenai pemecahan masalah antara Portugal dengan Indonesia dengan mengikut sertakan wakil-wakil dari Timor Timur baik yang anti integrasi maupun yang pro integrasi.⁹⁰

e. Vatikan

Bagi Vatikan kasus Timor Timur membawa persoalan tersendiri. Karena secara *de-facto* Timor Timur sudah berada dalam kekuasaan Indonesia, sementara dilain pihak secara *de-jure* integrasi tersebut belum mendapatkan pengakuan dari PBB. Oleh karena itu sampai lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Indonesia Vatikan juga belum mengakui integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Sehingga Keuskupan Dili langsung ditempatkan di bawah Vatikan, bukan di

⁹⁰ Joa Mariano, *op.cit.*, hlm. 302.

bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Namun Vatikan akan langsung mengakui integrasi begitu PBB memberikan pengakuan formal.⁹¹

2. Negara-negara Afrika

a. Benin

Negara ini dengan nada keras menuduh Indonesia sebagai negara Neo-Imperialis yang sejarahnya ternoda oleh sifat-sifat ekspansionisme, misalnya ekspansionisme Indonesia terhadap Irian dan Maluku. Oleh karena itu negara ini berharap agar negara-negara lain mengutuk perbuatan ekspansionis Indonesia dan memberikan bantuan yang cukup terhadap perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

b. Congo

Congo hanya menekankan agar resolusi DK PBB dan keamanan dilaksanakan secara konsekuen. Congo juga menganggap Portugal sebagai penguasa pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan berusaha mencari penyelesaian dengan partai-partai pada waktu itu, sehingga hal itu dipakai sebagai alasan Indonesia untuk mengadakan invansi militer.

c. Maroko

Negara ini diwakili oleh Duta Besar Maroko Benjjalon, mengemukakan pendapatnya bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia. Baik sebagai penjajah datang ataupun sesudahnya hingga terjadi pengabungan tidak dipisahkan

⁹¹ *ibid*, hlm.311-312.

lagi. Ditegaskan bahwa keputusan rakyat Timor Timur yang sudah menentukan nasibnya sendiri dengan memilih bergabung dengan Indonesia harus dihormati.

d. Mozambique

Negara Mozambique menyatakan penilaiannya bahwa situasi di Timor Timur semakin menjadi buruk dan membahayakan perdamaian serta keamanan internasional. Lebih lanjut dikatakannya meskipun dengan kekerasan senjata, tetapi FRETILIN tetap mampu mengadakan perlawanan dan masih mengadakan siaran radio tiga kali seminggu. Banyak rakyat Timor Timur ditangkap, dituduh bekerja sama dengan FRETILIN. FRETILIN adalah partai yang sejak semula dinilai sebagai partai patriotik dan berusaha melakukan perjuangan melalui jalan damai. Tetapi setelah keadaan menjadi kacau, Portugal tidak menguasai keadaan dan tidak ada jalan lagi bagi FRETILIN kecuali menyatakan kemerdekaannya yang disusul intervensi oleh Indonesia.

e. Guinea Bissau

Menlu Guinea Bissau menyatakan pengakuannya terhadap apa yang menamakan diri “Republik Demokrasi Timor Timur” sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat. Selain itu juga dilancarkan kutukan terhadap apa yang dinamakan “invansi pasukan asing” ke Timor Timur. Kepada Indonesia dimintainya agar menarik mundur semua pasukannya dari Timor Timur, dan menghormati keutuhan wilayah Timor Timur.⁹²

⁹² Soekanto, *op.cit.*, hlm. 539.

3. Negara-negara Asia

a. India

Rikhi Jaipal Dubes India untuk PBB menyatakan bahwa betapa tak wajar sebuah pulau yang rakyatnya terdiri dari suatu suku bangsa dan suatu budaya dibagi oleh koloni Eropa. Dengan demikian keputusan menjadi bagian dari integral Indonesia adalah keputusan yang tepat, karena rakyat Timor Timur bersatu kembali dengan saudara-saudaranya yang dipisahkan dari oleh penjajah Portugis selama 450 tahun.

b. Iran

Bahman Effan dari wakil Iran di PBB menyatakan bahwa rakyat Timor Timur secara resmi telah minta kepada Indonesia bersedia menerima pengabungan wilayah Timor Portugis dengan Indonesia. Sebelum menerima integrasi itu, terlebih dahulu Indonesia mengirim misi pencari fakta untuk menjajaki pedesaan-pedesaan politik yang hidup di kalangan rakyat Timor Timur. Hasilnya menyatakan bahwa bagian terbesar wilayah itu menghendaki integrasi dengan Indonesia.

c. Jepang

Wakil Jepang di PBB Isao Abe, menyatakan bahwa akan menjadi masalah bila hak penentuan nasib sendiri dilaksanakan oleh rakyat Timor Timur, boleh saja dipersoalkan. Akan tetapi yang penting, semua pihak yang berkepentingan harus berusaha mencari pemecahan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Timor Timur.⁹³

⁹³ Joau, Mariano. *op.cit*, hlm. 316

d. Malaysia

Malaysia diwakili oleh Tan Sri Zailon Ibrahim menyatakan bahwa daerah Timor Timur telah memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh rakyat Timor Timur semua negara harus menghormatinya. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat internasional dapat menghargai dan menghormati penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Timur.

e. RRC

RRC menyatakan bahwa Indonesia mengabaikan resolusi PBB dan telah meningkatkan agresi bersenjata terhadap Timor Timur, dengan dalih atas nama rakyat. Selanjutnya Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai propinsinya, yang sebenarnya adalah suatu pencaplokan terselubung terhadap suatu negara berdaulat. Lebih lanjut RRC meminta agar Indonesia menarik pasukannya dari Timor Timur, sehingga rakyat Timor Timur dapat melaksanakan haknya untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara asing. RRC menyatakan sikapnya yang menyokong perjuangan rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh FRETILIN. RRC percaya bahwa perjuangan tersebut akan mendapatkan simpati yang dalam dan dukungan dari negara-negara rakyat yang cinta keadilan.

f. Kamboja

Kamboja menyatakan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat dan pemerintahan Republik Demokrasi Timor Timur dibawah pimpinan FRETILIN tanpa menyebutkan nama Indonesia, Kamboja menyatakan bahwa setelah merdeka, Timor Timur telah mengalami agresi dan aneksasi dengan kekerasan.

B. Timor Timur di Mata RI

Setelah mendengar adanya pernyataan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia oleh empat partai, Menlu Adam Malik waktu itu menyatakan keterharuannya atas keputusan rakyat Timor Timur dan mengumumkan wilayah itu sebagai wilayah RI. Dengan Undang Undang No.7 tahun 1976, maka bukan saja secara resmi Timor Timur menjadi bagian wilayah RI akan tetapi sekaligus telah ditetapkan statusnya menjadi propinsi daerah istimewa tingkat I.⁹⁴ Dengan demikian menurut persi pemerintah Indonesia integrasi Timor Timur sudah sah baik secara *de-jure* maupun *de-fakto* menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Indonesia. Bertahun-tahun Indonesia tetap pada pendiriannya yakni bahwa masalah Timor Timur itu telah selesai secara nasional dengan diintegrasikannya ke dalam wilayah Indonesia.⁹⁵

Pemerintah pusat tidak kepalang tanggung dengan gencar memperjuangkan status Timor Timur di forum DK PBB yang masih mengambang dan berani mengorbankan begitu banyak dananya untuk membangun propinsi termuda itu. Di forum internasional oleh Menlu Ali Alatas dengan berani menentang negara-negara yang mengungkit masalah Timor Timur yang menurutnya masalah Timor Timur tidak dapat diganggu gugat.

Kompanye politik di forum internasional digencarkan oleh Menlu Ali Alatas menghadapi serangan aksi protes dari berbagai pihak yang menuntut referendum kepada masyarakat Timor Timur. Menlu Ali Alatas sendiri

⁹⁴ Mahmudin Noor, dkk. *Lahirnya Propinsi Timor Timur*. Jakarta: Alamanak RI, 1977, hlm. 343.

⁹⁵ Martino Sardi, *op.cit*, hlm. 9-10.

memandang Timor Timur diibaratkan “kerikil dalam sepatu”. Artinya, masalah Timor Timur akan selalu mengganggu perhatian Indonesia, seperti halnya kerikil dalam sepatu kita sering membuat kaki kita terasa geli dan kadang-kadang dapat melukai kaki kita sampai pincang. Kerikil itu harus segera dibebaskan agar tidak menghambat dan tidak mengganggu perjalanan kita dalam membangun bumi Timor Timur. Kini kerikil itu tidak hanya membuat kaki kita terluka dan pincang akan tetapi menyebabkan kaki kita harus diamputasi. Berarti kita kehilangan sebelah kaki. Pandangan Ali Alatas itu untuk membela dan mempertahankan Timor Timur menjadi integral NKRI di mata dunia mengalami hambatan. Penyebabnya antara lain karena Indonesia tidak secara terbuka dan rendah hati mau meyakinkan masyarakat Timor Timur dan komunitas internasional mengenai semua pelanggaran yang terjadi dalam proses integrasi. Pelanggaran administratif misalnya mengenai “Deklarasi Balibo” yang kurang mendapat penjelasan resmi menurut sejarah. Banyak orang meragukan kebenaran adanya Deklarasi Balibo tersebut.⁹⁶

Bagi Indonesia jika terjadi guncangan terhadap keutuhan wilayahnya, terutama di wilayah Timor Timur baik disebabkan oleh faktor luar maupun karena faktor dari dalam negerinya sendiri, maka dengan segala upaya bangsa Indonesia mempertahankan keutuhan wilayahnya itu. Masalah Timor Timur sendiri diselesaikannya dengan cara memberikan status khusus dengan otonomi luas dalam wadah NKRI. Ganti penguasa ganti kebijakan terhadap kasus Timor Timur. Otonomi luas belum sempat diterapkan terhadap propinsi Timor Timur karena

⁹⁶ N.N. (1996, Oktober 19). “Uskup Belo: Kemenangan Bagi yang Berkehendak Bagi Semua”. *Detektif Dan Romantika*. Hlm. 79.

opsi yang baru yakni jika menolak otonomi khusus maka boleh memilih opsi yang terakhir yakni kemerdekaan. Akhirnya opsi Presiden B.J Habibie yang terakhir inilah yang dipilih oleh rakyat Timor Timur.

C. Timor Timur di Mata Orang Timor Timur

Invansi tentara Indonesia yang secara terselubung melakukan aneksasi wilayah lain yang dalam keadaan kacau, membawa cerita lain bagi Timor Timur. Sebelum integrasi dengan Indonesia mereka hanya berbeda dalam hal pandangan politik, namun ketika campur tangan militer Indonesia yang secara bersama-sama menanda tangani Deklarasi Balibo (kecuali FRETILIN) haluan politik mereka berubah menjadi dua kubu yakni, kubu yang prokemerdekaan dan kubu yang pro terhadap integrasi dengan Indonesia. Partai FRETILIN inilah hingga lepasnya Timor Timur dari Indonesia menentang ide integrasi dan bercita-cita mendirikan negara merdeka.

Masyarakat Timor Timur secara mayoritas tidak memungkiri diri bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah banyak menunjukkan hasil dan sebagian rakyat Timor Timur merasakan hal itu. Namun dibalik keberhasilan pembangunan itu, kekerasan di Timor Timur tidak pernah surut. Bahkan pembangunan yang dilaksanakan di Timor Timur hanya dinikmati oleh segelintir orang dan pembangunan tidak menyentuh segi kemanusiaan rakyat Timor Timur. Bagaimana pembangunan akan dapat dirasakan oleh kepuasan batin rakyat Timor Timur bila pembangunan penuh dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia terutama oleh ABRI ?.

Mantan anggota DPRD Tingkat I Timor Timur Clementino Dos Reis Amaral misalnya mengakui bahwa kekerasan selalu terjadi karena rakyat tidak pernah diajari perdamaian. “Kami dilatih untuk baku hantam, diadu domba secara sengaja atau tidak, tercipta kondisi permusuha”. Ada suasana takut saling mencurigai penuh teror.⁹⁷

Satu hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Timor Timur adalah bahwa lembaga tradisional seperti *Liurai* diacak-acak sehingga tidak berlaku dan menjadi hilang. Hilangnya kekuasaan *Liurai* itu karena undang undang pokok pemerintah desa. Portugis yang menjajah Timor Timur selama 450 tahun tidak berani mengusik tradisi, apalagi lembaga adat. Diterapkannya undang undang pokok pemerintah desa di Timor Timur ternyata berdampak pada hilangnya lembaga tradisional *Liurai* yang sangat mereka percayai dan hormati. Karena adanya lembaga tradisional itulah segala kehidupan mereka diatur dengan baik dari pada undang undang pemerintah desa buatan pemerintah Indonesia dengan kaki tangannya ABRI yang memecah belah mereka.

Pemimpin FRETILIN menuntut hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dikembalikan. Tuntutan FRETILIN itu kemudian “mengema” ke dunia internasional. Xanana Gusmau mengakui, apa yang terjadi di Timor Timur adalah invansi militer, pembunuhan masal, penyiksaan, penculikan, dan pemerkosaan.⁹⁸ Timor Timur bagi orang Timor Timur sendiri telah dijadikan “lahan” naik pangkat oleh kalangan elit militer Indonesia dan sekaligus dijadikan bisnis militer. Karena

⁹⁷ N.N. (1999, Mei). “Kedamaian Tak Kunjung Datang di Timor Timur”. *Intisari*. Hlm. 173.

⁹⁸ N.N. (1999, Febuari 8). “Wawancara Xanana Gusmau: Saya Kira 99 Persen Menginginkan Merdeka”. *Tempo*. Hlm. 23.

setelah bertugas dari Timor Timur, para ABRI yang pernah dikirim ke sana akan dinaikkan pangkatnya. Pemasokan terhadap senjata dari luar negeri ke Timor Timur mengalir dengan deras dan dana operasi militer untuk meredakan keamanan dialihkan untuk bisnis lain. Selama dalam operasi militer, rakyat Timor Timur seolah-olah ditakdirkan hidup dalam suasana kadang-kadang tenang dan kadang-kadang mendadak berubah menjadi hingar bingar dan para awam yang tidak berdosapun terseret dalam pertikaian yang tidak tahu lagi siapa lawan dan siapa kawan.

Rakyat Timor Timur sendiri merasa dijajah oleh pemerintah pusat Indonesia dan ABRI. Rakyat Timor Timur melihat adanya sekelompok kecil oportunist yang memperoleh “dukungan” dari aparat yang merengut kekayaan dan hak milik rakyat Timor Timur.⁹⁹

D. Kebijakan Politik B.J Habibie

Tumbangnya orde baru ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada tanggal 22 Mei 1998. Dengan demikian Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden waktu itu secara otomatis menggantikan sebagai presiden Indonesia. Naiknya Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto telah memunculkan desas desus di kalangan elit politik. Bagaimanapun undang-undang telah mengesahkan kedudukan Presiden B.J Habibie itu. Naiknya Habibie sebagai Presiden Indonesia, tugasnya sebagai seorang kepala negara cukup berat. Selain berbagai krisis yang harus segera diselesaikan, juga berbagai kerusuhan yang berkejolak mengancam

⁹⁹ Bdk. Sri-Edi Swarsono, *Reformasi Menjadi Deformasi Dari Lengser ke Lengser*, Ui-Press, 2001, hlm. 274.

disintegrasikan bangsa dan membutuhkan penanganan yang cukup serius. Misalnya saja kerusuhan di kota Dili Timor Timur. Karena situasi politik, keamanan dan ekonomi di Timor Timur yang tidak menentu itulah yang membuat Presiden B.J Habibie berkebijakan lain terhadap Timor Timur.

Habibie memandang Timor Timur memberatkan posisi Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politik. Secara ekonomi pemerintah Indonesia selama itu telah banyak mengeluarkan dana untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat Timor Timur tetapi situasi di Timor Timur terus bergolak. Secara politik, Timor Timur telah menyulitkan posisi Indonesia di dunia internasional khususnya PBB. Akhirnya dengan jalan yang menurut B.J Habibie baik, memutuskan memberikan rencana otonomi luas dengan status khusus dan tetap mempertahankan integrasi Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga direncanakan akan menarik pasukan Indonesia dari Timor Timur.

Sejalan dengan langkah proaktif yang diambil oleh Habibie dalam mencari penyelesaian berbagai masalah bangsa, juga proaktif dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Jika sebelumnya Indonesia berada dalam posisi defensif dalam upaya penyelesaian internasional tentang Timor Timur, kini Presiden B.J Habibie mengambil sikap proaktif dan inisiatif yang gencar melakukan pendekatan diplomatik ke berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah Timor Timur khususnya, melakukan pendekatan terhadap Portugal dan PBB.

Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie mengumumkan bahwa masyarakat Timor Timur akan diberi kesempatan untuk melakukan pemungutan

suara mengenai suatu paket otonomi.¹⁰⁰ Paket status khusus dengan otonomi luas tersebut menurut Makmur Makka adalah bahwa Timor Timur memperoleh status *Self Governing* dengan kewenangan luas diberbagai bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan sebagainya dengan catatan pemerintah pusat memegang tiga kewenangan tertentu: politik luar negeri, keamanan eksternal serta moneter dan fiskal. Usulan penyelesaian ini dikenal dengan opsi pertama Presiden B.J. Habibie.¹⁰¹

Ketika usulan tersebut sedang dibicarakan dalam pertemuan dialog antara Indonesia, Portugal dan PBB, pemerintah Indonesia mengadakan pengkajian lebih mendalam tentang suatu alternatif lain bagi penyelesaian masalah Timor Timur. Seandainya mayoritas rakyat Timor Timur menolak usulan otonomi khusus, maka wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional jika diusulkan kepada MPR/DPR hasil pemilu 1999 agar Timor Timur secara terhormat, baik-baik dan damai berpisah dengan negara kesatuan RI. Opsi ini adalah opsi yang kedua dan tawaran terakhir oleh Presiden Habibie.¹⁰²

Demi masa depan Timor Timur, Presiden Habibie mempertegas kebijakannya dengan memberi dua opsi: otonomi luas atau melepasnya dari wilayah RI. Kebijakan ini diambil oleh Habibie dengan alasan bahwa dirinya tidak memiliki trauma soal Timor Timur, tidak mempunyai keperluan tertentu dengan Timor Timur, dan tidak ada beban sejarah. Sehingga bisa melihat sejarahnya lebih jernih. Bagi Habibie kasus Timor Timur harus selesai sebelum

¹⁰⁰ Chris Maning & Dierman Peter (Ed), *Indonesia di Tengah Transisi Aspek-aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta, LKIS, 2000, hlm. 116.

¹⁰¹ Makmur Makka, *B.J. Habibie Kisah Hidup dan Kariernya*, Jakarta, Cidesindo, 1999. hlm. 323.

¹⁰² *ibid*, hlm.324.

millenium baru tahun 2000.¹⁰³ Dengan demikian Presiden Habibie berprinsip tidak setuju dengan keinginan dilakukannya referendum di Timor Timur jika antara 5-10 tahun Indonesia dibebani ketidak pastian apakah Timor Timur akan bergabung atau tidak dengan Indonesia. Sementara antara tahun itu Indonesia tetap harus mengeluarkan biaya otonomi.

Presiden Habibie tetap ngotot agar Timor Timur baiknya lepas saja dari NKRI. Tekadnya mulai 1 Januari 200 Indonesia dalam kamus politik tidak mengenal masalah Timor Timur lagi. Baginya pula, Indonesia tidak mau dipersukar oleh masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Namun, untuk menentukan tetap berintegrasi atau lepas dari NKRI, Presiden Habibie tidak setuju jika harus ditempuh melalui referendum. Dari hal tersebut Presiden Habibie tidak mau menyebutkan referendum sebagai penyelesaian akhir masalah Timor Timur. Referendum berarti pemerintah Indonesia ikut campur menentukan cara memilih dan ikut bertanggung jawab. Seolah-olah dari apa yang dikatakan Habibie itu menunjukkan bahwa dia ingin lepas tangan dan tidak mau dipersalahkan dalam soal Timor Timur kedepan dengan alasan apapun. Bagi Habibie, penyelesaian terhadap masalah Timor Timur lebih cepat adalah lebih baik karena tekad pemerintahannya tidak mau dipusingkan lagi soal Timor Timur mulai 1 Januari 2000. Bagi Habibie memfokuskan diri pada 26 propinsi lain adalah lebih baik dari pada dipusingkan oleh satu propinsi yang menguras tenaga dan biaya pemerintah Indonesia.

Sebagai ganti refendum digunakan istilah jajak pendapat. Presiden Habibie pada waktu itu menjelaskan bahwa jajak pendapat itu diawasi oleh tim penasehat

¹⁰³ Dewi Fortuna Anwar. (1999, Febuari 8). "Habibie dan Timor Timur". *Tempo*. Hlm. 31

kepolisian dari enam negara: AS, Jepang, Filipina, Jerman, Inggris dan Australia, yang bergabung dalam misi PBB untuk Timor Timur yakni UNAMET (*United Nation Assessment Mission In East Timor*), yang bertugas mulai 10 Mei 1999.

Tiga naskah paket otonomi dan seandainya menolak paket otonomi tersebut dipersilakan merdeka yang diusulkan Indonesia akhirnya ditandatangani Menlu Ali Alatas dan Jamie Gama serta sekjen PBB Kofi Annan di Markas PBB New York pada tanggal 5 Mei 1999. Kesepakatan itu akan memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur untuk menerima paket otonomi atau menentukan masa depannya sendiri melalui jajak pendapat pada tanggal 31 Agustus 1999.

E. Jajak Pendapat dan Hasilnya

Disetujuinya paket otonomi oleh perwakilan dua negara yakni RI yang diwakili oleh Menlu Ali Alatas dan Portugal yang diwakili oleh Jamie Gama dan disaksikan dan disahkan oleh Sekjen Kofi Annan, jajak pendapat sebagai penentuan kehendak rakyat Timor Timur tinggal menunggu waktu saja. UNAMET sebagai polisi gabungan baru dapat bertugas secara resmi di Timor Timur tanggal 1 Juni 1999 dengan resolusi DK PBB No.1246 dan akan bekerja hingga 31 Agustus 1999.

Pada mulanya jajak pendapat direncanakan akan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1999 berdasarkan persetujuan New York 5 Mei 1999. Namun sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dilakukan suatu kampanye informasi oleh PBB dan disusul dengan kampanye politik selama dua minggu.¹⁰⁴ Penentuan pendapat

¹⁰⁴ Chris Manning & Peter Dierman (Ed), *op.cit.*, hlm. 120.

rakyat mengalami penundaan semula tanggal 8 Agustus akhirnya dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999. Penundaan itu dikarenakan terdapat keterlambatan pengelaran perangkat UNAMET dan juga karena situasi keamanan di Timor Timur belum memadai untuk dilaksanakan jajak pendapat.

Menjelang jajak pendapat digelar, usaha pemerintah Indonesia agar jajak pendapat terlaksana dengan baik khususnya berkaitan dengan tanggung jawab keamanan untuk menjaga wilayah Timor Timur sebelum, selama dan sesudah jajak pendapat, maka pemerintah telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertikai selama dua dekade bahkan lebih.

Sebelum jajak pendapat dilakukan, UNAMET telah menentukan delapan kota sebagai pusat pendaftaran peserta jajak pendapat yakni: Dili, Bacau, Lospalos, Suai, Oeccuse, Maliana, Ermera dan Viquque. Adapun syarat-syarat yang ditentukan bagi peserta yang boleh memilih adalah: berusia minimum 17 tahun, lahir di Timor Timur, salah satu dari kedua orang tua berasal dari Timor Timur, dan orang dari luar Timor Timur yang menikah dengan orang Timor Timur.¹⁰⁵

Tanggal 30 Agustus 1999 merupakan hari yang bersejarah bagi rakyat Timor Timur. Dimana pada hari itu fakta menunjukkan bahwa rakyat Timor Timur berdatangan dalam jumlah besar, tidak ada intimidasi, dan rakyat berdatangan penuh gairah. Mereka memberikan suara dalam jajak pendapat untuk menentukan kepastian wilayah mereka apakah akan berpisah atau tetap bergabung dengan Indonesia. Utusan Sekjen PBB, Jamsed Marker memperkirakan 450 ribu rakyat

¹⁰⁵ Makmur Makka, *op.cit*, hlm. 332.

Timor Timur ikut memilih dan hasil jajak pendapat itu akan diserahkan kepada PBB, Indoensia, dan Portugal.¹⁰⁶

Selain di Dili, pemungutan suara juga dilangsungkan di Ujung Pandang, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Sidney, Darwin, Perth, Melbourne, Lisabon, Macau dan New York. Sedangkan pemungutan suara yang dilakukan di Indonesia di luar Dili, semua kotak suara tersebut akan dikumpul dan di hitung di Jakarta sehari atau sesudahnya. Sedangkan hasil pemungutan suara di luar negeri, setelah dihitung di masing-masing negeri, akan di kirim ke Darwin, Australia.¹⁰⁷ Pelaksanaan jajak pendapat itu sendiri melibatkan tidak kurang 13.000 pengamat internasional dan lokal. Dari jumlah itu pemerintah Indonesia dan Portugal diberi jatah 50 orang pengamat resmi.

Menjelang penghitungan suara, suasana kota Dili mencekam sepi dan sunyi. Lalu lintas nyaris mati. Cuma ada satu-dua mobil yang bertuliskan UN (*United Nation*) yang ditumpangi oleh staf UNAMET yang mondar mandir di jalan raya.

Pada tanggal 4 September 1999, merupakan hari dan tanggal yang ditunggu-tunggu rakyat Timor Timur khususnya dan dunia internasional umumnya, karena pada tanggal itu hasil jajak pendapat akan diumumkan. Di hotel Mahkota, persisnya di jantung kota Dili, suasana agak ramai oleh sejumlah wartawan dan staf UNAMET. Dan tepat pukul 09.30. Waktu Indonesia Tengah, Ian Martin, ketua UNAMET, Misi PBB di Timor Timur, membacakan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dengan suara tenang, Ian

¹⁰⁶ *ibid.* hlm. 333.

¹⁰⁷ N.N. (1999, September 12). "Kembali ke Titik Nol". *Forum Keadilan*. Hlm.14.

Martin mengumumkan bahwa sebagian besar warga Timor Timur memilih merdeka, lepas dari Indonesia. Dari 451.792 warga Timor Timur yang ikut pemilihan, 344.580 Orang (78,5%) memilih merdeka, dan hanya 94.388 orang (21,5%) yang memilih opsi kedua: daerah otonomi di negara Kesatuan RI. Dari jumlah pemilihan itu, cuma 1,8 % suara yang tidak sah.¹⁰⁸

Setelah diumumkan hasil jajak pendapat dengan suara mayoritas memilih merdeka, kemudian muncul isu-isu yang bernada negatif. Oleh pihak yang prointegrasi menilai, staf UNAMET telah melakukan kecurangan dalam melaksanakan jajak pendapat. Armindo Suares anggota DPR Timor Timur misalnya, bernada sama dengan Erico Guteres komandan pasukan pembela integrasi, bahwa UNAMET telah melakukan teror terhadap penduduk Timor Timur agar warga Timor Timur memilih pilihan kedua. Kecurangan lainnya memulai jajak pendapat pukul 06.00 WITA tiga jam sebelum waktu yang ditentukan.¹⁰⁹

Dari isu-isu di atas menandakan bahwa kedua belah pihak belum siap untuk menerima hasil apapun dari jajak pendapat dan belum siap berekonsiliasi. Akibatnya setelah jajak pendapat, muncul kerusuhan-kerusuhan dan kekacauan yang mengarah pada perang saudara. Terjadinya kekacauan luar biasa di Timor Timur itu membuktikan bahwa sebenarnya kedua belah pihak yang bertikai belum siap dalam berjajak pendapat. Kesannya jajak pendapat terlalu buru-buru, terlalu dipaksakan.¹¹⁰

¹⁰⁸ N.N. (1999, September 11). "Jajak Pendapat di Timor Timur". *Gatra*. Hlm. 24

¹⁰⁹ N.N. (1999, September 12). "Kembali ke Titik Nol". *Forum Keadilan*. Hlm. 16.

¹¹⁰ Bdk. Sri-Edi Swarsono, *op.cit*, hlm. 272.

Apa boleh dibuat karena rakyat Timor Timur mayoritas telah memilih untuk menjadi bangsa yang berdiri sendiri dan merdeka. Semua pihak yang bertikai harus mengakui hasil jajak pendapat tersebut dan pemerintah Indonesia mau tidak mau mencabut status tap integrasi Timor Timur Tap No.VI/1978. MPR RI harus mengakui kedaulatan kemerdekaan Timor Timur dengan Tap barunya No.V/MPR/1999. Dari hasil jajak pendapat tersebut sekaligus dapat diartikan mengakhiri era pemerintahan Republik Indonesia atas Timor Timur.



BAB V

DAMPAK DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

A. Dampaknya Bagi Indonesia

1. Dampak terhadap politik

Lepasnya Timor Lorosae dari NKRI secara otomatis telah meruntuhkan usaha diplomasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama 23 tahun. Perjuangan diplomasi yang gagal tersebut tentunya telah mengubah citra politik Indonesia dihadapan dunia internasional. Dunia internasional akan menganggap Indonesia tidak memberikan kebebasan politik, ekonomi, sosial budaya selama 23 tahun dan lebih menyakitkan bila kehadiran Indonesia di Timor Timur ada yang menganggap sebagai neo-kolonialisme. Usaha mengembalikan paradigma politik itulah yang merupakan usaha atau tugas baru pemerintahan Indonesia.

Presiden Habibie yang dianggap paling bertanggung jawab dalam hal itu, telah menurunkan popularitas beliau sendiri dan bahkan laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh anggota sidang umum tahunan MPR. Posisi karier politik Habibie terancam tidak mulus apalagi terpilih untuk menjadi presiden periode berikutnya.

Lepasnya Timor Timur berpengaruh besar terhadap daerah lain. Daerah lain seperti Ambon, Sambas, Aceh, Irian maluku dan yang lainnya, menuntut kepada pemerintahan Habibie hal yang sama yakni ingin merdeka dan lepas dari Indonesia. Sangat disayangkan bila hal ini jika benar-benar terjadi. Mungkin lagu

Dari Sabang Sampai Meraukepun akan berubah menjadi Sabang sampai bercerai berai.

Berkaitan dengan pemulihan nama baik dan citra bangsa Indonesia yang demikian terpuruk di hadapan dunia internasional, kemudian mau dan sanggupkah Indonesia menahan malu dengan “berwajah tembok” bergandengan tangan menjalin hubungan politik secara bersama-sama dengan negara baru Timor Lorosae ? Memulai hubungan baru memang tidak begitu mudah apalagi bila negara yang dijalin pernah bernaung dengan Indonesia selama 23 tahun lamanya. Menjalinkan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara Timor Lorosae adalah tugas yang memerlukan perhitungan karena masalahnya adalah menyangkut citra Indonesia dan negara baru tersebut kedepan.

Hubungan dengan negara Timor Lorosae tidak dapat dipungkiri karena negara yang baru berdiri tersebut adalah tetangga dekat Indonesia dan biar bagaimanapun bila tetangga kita itu dapat berkerjasama dengan Indonesia maka akan tercipta kedamaian kedua belah pihak. Hendaknya pula negara yang baru merdeka tersebut diperlakukan sebagai sahabat seperti negara lain. Mengingat perlakuan Indonesia terhadap Timor Lorosae tentunya akan mempengaruhi citra Indonesia di dunia internasional.¹¹¹ Mau tidak mau Indonesia meskipun telah meninggalkan sejarah yang pahit terhadap negara Timor Lorosae, suka atau tidak suka demi nama baik Indonesia dikancah dunia internasional ada baiknya hubungan politik dengan negara Timor Lorosae harus segera dilaksanakan.

¹¹¹ Sudirman HN. (2002, April 5). “Memulai Era Baru Hubungan RI-Timor Lorosae”. *Kompas*. Hlm.4.



Persoalan politik Indonesia dengan negara yang baru merdeka tersebut sampai saat ini belum tuntas bahkan penyelesaiannya begitu alot dan rumit. Semisalnya saja masalah pertanggungjawaban Indonesia terhadap pampasan perang. Dalam hal ini Indonesia harus mempertanggungjawabkan para pelaku di lapangan dan perencanaan semua aksi yang tidak berperikemanusiaan terhadap rakyat Timor Lorosae itu dengan menghadapkan mereka ke pengadilan. Pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae haruslah objektif. Penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur akan menguras banyak tenaga, waktu dan pikiran bangsa Indonesia bertahun-tahun lamanya, sehingga selama itu pula persoalan rakyat Timor Timur dengan Indonesia belum selesai-selesai.

Persoalan lain yang sempat mengundang pro dan kontra dikalangan elit politik pemerintah Indonesia yang baru-baru sekarang adalah soal perlu atau tidaknya presiden Megawati Sukarno Putri menghadiri undangan perayaan kemerdekaan negara Timor Lorosae dan pelantikan presiden terpilih mereka Xanana Gusmao tanggal 20 Mei 2002. Pro dan kontra tersebut dengan alasan mereka yang berbeda-beda pula. Pada satu sisi Presiden Megawati tidak pantas menghadiri perayaan kemerdekaan Timor Lorosae karena negara yang baru merdeka tersebut telah mengores sejarah hitam Indonesia dan telah menjatuhkan citra politik Indonesia di hadapan dunia internasional serta tidak tahu berterima kasih terhadap hasil pembagunan yang pernah Indonesia bangun. Pada sisi lain bagi mereka yang mendukung kepergian Megawati tersebut menganjurkan agar Presiden Megawati menghadiri perayaan kemerdekaan tersebut dan memenuhi

undangan dari Sekjen PBB Kofi Annan agar supaya nama baik dan kredibilitas politik Indonesia yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif di kancah dunia internasional terpulihkan.

Persoalan yang harus ditangani dan diselesaikan menurut Susilo Bambang Yudoyono adalah perjuangan Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang tersisa seperti: status dan perlakuan negara Timor Lorosae terhadap makam pahlawan prajurit-prajurit Indonesia, aset-aset Indonesia yang masih ada di Timor Lorosae, batas perbatasan antar negara yang disepakati, status kewarganegaraan bagi para pengungsi yang memilih menjadi warga negara Indonesia, jalur perlintasan darat Oekusi-Timor Lorosae, hak politik dan jaminan keamanan para mantan pejuang integrasi yang kembali ke Timor Lorosae.¹¹² Selain itu Indonesia dipusingkan lagi oleh penempatan mautan pegawai Republik Indonesia di Timor Lorosae.

2. Dampak terhadap sosial-ekonomi

Sekarang ini Indonesia tidak lagi pusing-pusing terhadap berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membangun Timor Timur seperti dulu dan anggaranya harus diambil dari mana. Alokasi dana yang selama 23 tahun yang digunakan untuk membantu pembangunan Timor Lorosae dapat dialihkan untuk membantu salah satu dari salah banyak Propinsi yang ada sekarang.

Lepasnya Timor Timur dari Kesatuan Negara Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat cuci tangan begitu saja karena masalah dengan

¹¹² Susilo Bambang Yudhoyono. (2002, Mei 15). "Indonesia-Timor Timur: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan". *Kompas*. Hlm. 28.

Timor Lorosae masih ada, semisal saja masalah mengenai pengungsi yang sekarang berada di Antambua bahkan ada yang memilih status kewarganegaraan bergabung dengan Indonesia. Secara finansial Indonesia juga mengeluarkan biaya untuk menampung para pengungsi Timor Timur pasca jajak pendapat. Masih ada sekitar 100.000 orang pengungsi yang masih harus diurus pemerintah agar diberi bantuan, dicarikan pemukiman yang layak, dan bahkan pekerjaan. Kita sudah ada beban berat ekonomi akibat krisis yang belum usai tahun 1997 dan saat ini masih ada beban soal pengungsi eks Timor Timur.¹¹³

Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi, juga bersama pihak swasta yang telah meninggalkan aset ekonomi di negeri Timor Lorosae, mau tidak mau dengan rela harus kehilangan sumber pendapatan ekonominya. Saat ini aset ekonomi Indonesia yang masih ada di Timor Lorosae menjadi perdebatan antar kedua negara. Pemerintah Indonesia menuntut Pemerintah Timor Lorosae agar aset ekonomi Indonesia yang berada disana diganti. Tuntut menuntut aset ekonomi di negara lama hendaknya pemerintah kita berlandaskan hukum yang berlaku di dunia internasional. Masalahnya juga bagi Indonesia saat ini sedang dibingungkan oleh mana yang harus menjadi aset ekonomi yang dipegang oleh pemerintah dan mana yang aset ekonomi yang dipegang oleh pihak swasta.

Masalah yang lain juga adalah apakah Indonesia menggunakan hukum internasional yang berlaku dari dulu sampai sekarang atau menggunakan aturan hukum sendiri. Menurut hukum internasional, aset ekonomi milik pemerintah negara lama tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi oleh negara baru.

¹¹³ N.N. (2002, Mei 19). "Timor Leste Merdeka, Punai dilepas Tanpa Pipit". *Kompas*. Hlm. 25.

Sedangkan aset ekonomi yang dimiliki oleh pihak swasta, negara baru harus mengakui dan melindunginya.¹¹⁴

Dari kacamata hukum internasional tersebut, sebetulnya pemerintah Indonesia harus merelakan asetnya di Timor Timur diberikan kepada negara baru itu, mengingat bahwa negara Timor Lorosae belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membangun negerinya yang baru merdeka apalagi untuk melakukan ganti rugi. Bukankah Timor Timur dulu dibangun pemerintah Indonesia tanpa pamrih untuk mengejar ketertinggalannya dari propinsi lainya ?

Masalah sosial yang begitu rumit selain masalah pengungsi Timor Timur, juga masalah pengadilan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia pasca jajak pendapat. Penyelidikan dan proses hukum pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia di Timor Timur itu akan memakan waktu yang lama, bisa-bisa bertahun-tahun, sehingga selama itu pula persoalan rakyat Timor Timur dengan Indonesia belum selesai. Pengadilan terhadap hak-hak asasi manusia akan memberatkan tugas Kehakiman Indonesia, terutama bila menyangkut pengadilan terhadap tokoh-tokoh penting dengan menghadirkan mereka di pengadilan sebagai saksi atau sebagai tersangka pelaku kejahatan pelanggaran berat HAM di Timor Timur. Orang-orang yang mungkin dianggap bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur adalah Abillio Jose Osorio Soares mantan Gubernur Timor Timur, Wiranto dan L.B Moerdani selaku mantan Pangab dan banyak lagi yang lainnya. Pihak Kehakiman juga

¹¹⁴ Hikmahanto Jawana. (2002, Juni 3). "Tuntut Menuntut Aset Indonesia". *Kompas*.

diberatkan dengan masalah siapa orang yang mau dan berani menjadi saksi dan betulkan orang tersebut mengalaminya.

B. Dampaknya Bagi Timor Lorosae

1. Dampak terhadap politik

Dampak dari terjadinya disintegrasi Timor Timur sendiri bagi negeri baru tersebut dalam hal ini keadaan politik di Timor Lorosae adalah menyebabkan situasi pemerintahan di Timor Lorosae buruk. Pihak kemerdekaan yang sebagian besar mendorong terjadinya perpisahan dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mendorong pula pihak pro integrasi meluapkan kemarahannya yang membabi buta terhadap apa yang ada di Timor Timur. Rakyat kecil yang tidak berdosapun tidak luput dari sasaran. Berbagai fasilitas seperti rumah dan kendaraan turut dibakar. Keadaan awal disintegrasi membawa penduduk Timor Timur siap siaga untuk perang sesama mereka sendiri.

Memulai agenda-agenda politik barunya pemerintahan Timor Lorosae menjalaninya agak terseok-seok karena kondisi tersebut di atas. Semisal saja tampak bahwa kesiapan untuk memulai pembangunan di negeri yang baru itu belum matang karena masing-masing pihak dilandai emosi sehingga mengakibatkan kehancuran di negeri tersebut. Xanana Gusmao sendiri mengakui bahwa negara Timor Lorosae tidak memiliki pengalaman politik untuk mengelola negeri itu yang berpenduduk kurang lebih mencapai satu juta orang. Saat ini pemerintah Timor Lorosae secara politik belum bisa mandiri karena masih dibimbing oleh UNAMET.

Berbagai masalah politik yang sangat krusial harus mereka hadapi. Semisal saja, siapa-siapa yang dianggap sebagai wakil-wakil sementara rakyat Timor Lorosae untuk merumuskan berbagai kebijakan mengenai masa depan politik Timor Lorosae bersama UNAMET, bagaimana ditengah-tengah masyarakat agar tidak ada kekosongan aturan hukum, undang-undang, bahasa apa yang dijadikan bahasa nasional dan sampai menyangkut masalah mata uang mana yang harus mereka gunakan.

Negeri yang baru merdeka itupun kemudian dibingungkan juga oleh masalah aturan-aturan hukum mana yang akan mereka gunakan. Masalah hukum ini kemudian mengundang perdebatan antara kalangan muda dan kalangan tua. Bagi kalangan muda berkeinginan bahwa baiknya hukum yang diterapkan di Timor Lorosae seperti hukum yang ada di Indonesia. Mereka tidak mempunyai argumen yang lain selain kebanyakan ahli hukum mereka adalah lulusan dari Universitas Indonesia, dari pada anjuran para yang tua agar sebaiknya hukum Timor Lorosae menggunakan hukum skala internasional.¹¹⁵

Dampak lain dari disintegrasi juga adalah terhadap hubungan luar negeri terutama dengan negara Indonesia yang pernah membangun Timor Lorosae selama 23 tahun. Disintegrasi telah menyimpan benih sakit hati terutama bagi kalangan militer Indonesia yang pernah ditugaskan di sana yang kemudian benih sakit hati tersebut membuat hubungan kedua negara tidak baik. Bagi negara Timor Lorosae, menghilangkan sakit hati (khususnya militer) Indonesia adalah tugas yang tidak begitu ringan, mengingat secara geografis negerinya dekat dengan negara

¹¹⁵ Valens Doy. (2002, Mei 19). "Potret Lain Timor Lorosae". *Kompas*. Hlm. 32.

Indonesia dan masalah politik yang harus diselesaikan belum tuntas terutama, menyangkut masalah batas wilayah, aset-aset pemerintah Indonesia yang ada di sana dan penanganan masalah pengungsi secara bersama-sama. Mau atau suka atau tidak suka hubungan luar negeri dengan Indonesia harus segera dilaksanakan.

Ternyata dampak disintegrasi tersebut juga dirasakan rakyat Timor Lorosae menjelang perayaan hari kemerdekaannya 20 Mei 2002 yang lalu. Mereka harus mempersiapkan berbagai hal baik menyangkut pengamanan terhadap para tamu negara undangan, tempat penginapan dan tentunya bagaimana mereka membuat acara perayaan kemerdekaan itu agar lebih baik dan meriah. Mulai dari dana yang dipakai diperoleh dari mana, siapa yang mengurusnya dan sampai pada latihan-latihan kegiatan. Bagaimana cara yang ditempuh dan bagaimanapun hasilnya itu merupakan konsekuensi yang harus mereka terima.

2. Dampak terhadap sosial ekonomi

Disintegrasi juga berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi Timor Lorosae. Semisal saja dampaknya terhadap kehidupan keluarga mereka yang menyelamatkan diri dari peluru nyasar atau libasan senjata lain. Mereka harus terpisah dari anggota keluarganya dan sampai saat ini tidak tahu rimbanya entah dimana. Setelah negara tersebut memilih merdeka dan berdiri sendiri, mereka yang terpisah dari keluarganya harus memulai hidup baru dan mencari-cari kemana keluarga mereka berada. Mereka juga harus membangun rumah baru akibat perang saudara, membuka lahan-lahan baru untuk bekerja atau mencari pekerjaan lain. Persoalan sosial yang krusial sering muncul juga adalah masalah

pengangguran, kelangkaan terhadap kebutuhan rumah tangga, kekurangan gizi, kurang terjaminnya kesehatan dan putus sekolah.

Arus pengungsian keluar dari Timor Timur menjelang dan pasca jajak pendapat terus bertambah. Mereka yang mengungsi dari Timor Timur diperkirakan mencapai 100.000 orang lebih. Masalah pengungsi ini akan menimbulkan masalah sosial yang baru bagi negara Timor Lorosae kelak.

Seiringan dengan pengungsian pasca jajak pendapat tersebut, tentunya arus keluarnya uang dari daerah Timor Timur bertambah banyak. Perputaran uang di Timor Timur sangat berperan dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Jika uang yang keluar dari negara Timor Timur dalam jumlah banyak maka kegiatan perekonomian negara tersebut akan memacetkan roda perekonomian negeri itu.

Aktivitas dipasar belum menunjukkan tanda-tanda adanya orang melakukan kegiatan jual beli. Meskipun ada yang berjual adalah para pedagang tradisional dan mereka ini sendiri mengalami kesulitan siapa yang membeli barang-barang mereka. Barang-barang mereka tidak menaruh minat para bule-bule karena para bule-bule lebih tertarik pada barang-barang yang berbau Eropa. Barang-barang yang dijual harganya cukup tinggi. Semisalnya saja harga kebutuhan pokok seperti beras perkilogramnya mencapai Rp. 15.000,-.

Jenis mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat berpareasi. Ada Dolar Amerika, Dolar Australia dan ada mata uang Rupiah. Bagi para pedagang tradisional bahkan masyarakat Timor Timur pada umumnya bingung mata uang mana yang harus mereka gunakan dan berdasar patokan yang mana.

Kebanyakan pelaku ekonomi Timor Lorosae saat ini adalah para anggota yang bergabung dalam UNAMET. Maka sangat diragukan apakah mereka akan bisa menopang kemandirian ekonomi mereka setelah tugas UNAMET selesai atau setelah para anggota UNAMET itu pergi dari negeri Timor Lorosae. Memang diakui bahwa negeri Timor Lorosae memiliki sumber ekonomi seperti dari kopi yang terkenal bau harumnya, kayu cendana yang langka di dunia dan tambang minyak di celah Timor. Tetapi bagaimanapun sumber daya manusia Timor Lorosae yang kurang, menyulitkan mereka untuk mengolahnya dengan baik. Sampai saat ini negeri tersebut masih membutuhkan beberapa ratusan guru bahkan ribuan, perawat rumah sakit, dokter dan teknisi dengan gaji RP 3-5 juta diluar gaji dokter.¹¹⁶

Sumber daya manusia Timor lorosae yang kurang, akan sulit bagi negara tersebut untuk membangun negerinya apalagi untuk bersaing dengan negara lain. Negeri yang baru merdeka itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menata negerinya menjadi sebuah bangsa yang lebih baik. Semoga negeri tersebut dapat menjadi sebuah negara yang besar dikemudian waktu yang dapat diperhitungkan oleh negara manapun juga. Amin.

¹¹⁶ *loc. cit.*

BAB VI

KESIMPULAN

Pada tahun 1974 di Timor Timur muncul empat organisasi politik sebagai reaksi diberikannya kebebasan berpolitik di negerinya. Masing-masing partai itu adalah UDT, ASDT/FRETILIN, APODETI, dan dua partai politik kecil yakni KOTA dan TRABALHISTA.

Masing-masing partai mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan dari masing-masing partai tersebutlah yang mendorong rakyat Timor Timur ke jurang perpecahan. FRETILIN tanggal 18 November 1975 memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak. Sedangkan partai politik lainnya bersatu menentang tindakan FRETILIN. Tanggal 30 November 1975 mereka mengeluarkan kesepakatan bersama di Balibo yakni mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak FRETILIN.

Pemerintah Indonesia memang sukses membangun Timor Timur selama 23 tahun terutama jika dibandingkan dengan Portugal 450 tahun yang boleh dikatakan tidak melakukan apa-apa. Wajah Timor Timur memang dipermak dengan ribuan kilometer jalan aspal, ribuan sekolah dari TK sampai PT, juga ratusan fasilitas umum seperti klinik dan rumah sakit. Namun secara politik rakyat Timor Timur tidak pernah merasa aman di sana karena kubu yang berseteru baik FRETILIN maupun pihak yang pro terhadap Jakarta yang dipersenjatai oleh ABRI mengacaukan situasi keamanan di sana. Bahkan secara politik kasus

integrasi tersebut masih menganjal di forum PBB. Keadaan sosial rakyat Timor Timur menunjukkan kondisi yang kurang baik. Karena hadirnya para transmigrasi di Timor Timur telah menyempitkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat menganggur bahkan diantara kaum pendatang itu telah melecehkan agama Katolik yang dianut penduduk setempat. Antara lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi rakyat Timor Timorpun kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Berintegrasinya Timor Timur dengan Indonesia ternyata memunculkan reaksi dari negara luar baik dari negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia. Reaksi mereka ini memunculkan beragam pandangan ada yang menentang integrasi dan ada yang mendukung integrasi dan bahkan ada yang bersikap tidak tegas. Keragaman reaksi dari negara-negara tersebut tidak mengoyahkan usaha dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa secara *de-facto* Timor Timur sudah menjadi wilayah Indonesia yang dikukuhkan dengan undang-undang no. 7 tahun 1976. Berdasarkan hal itulah pemerintah Indonesia secara mati-matian menentang negara yang mempermasalahkan kasus integrasi. Bagi rakyat Timor Timur sendiri wilayah mereka tidak pernah berhenti oleh teror, intimidasi, pemerkosaan, pembunuhan dan pelanggaran HAM. Mereka merasa wilayah mereka dijadikan ladang bisnis oleh ABRI.

Pada akhir tahun 1997, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada jatuhnya rejim Soeharto dan kerusuhan di berbagai daerah seperti Ambon, Maluku Aceh, Irian Jaya dan termasuk Timor Timur yang segera membutuhkan penanganan dengan segera karena mengancam keutuhan bangsa.

Rakyat Timor Timur menuntut diberlakukan referendum dengan segera sebagai penentuan nasib sendiri. B.J Habibie berpandangan lain dalam penyelesaian masalah Timor Timur. Presiden Habibie bertekad, mulai 1 Januari 2002 Indonesia dalam kamus politik tidak mengenal masalah Timor Timur lagi. Maka diadakanlah jajak pendapat yang diawasi oleh tim kepolisian dari enam negara: AS, Jepang, Australia, Jerman dan Inggris yang bergabung dalam misi PBB untuk Timor Timur yakni UNAMET=*United Nations Assesment Mission In East Timor*.

Jajak pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan tanggal 4 September 1999 diumumkanlah hasil dari jajak pendapat tersebut. Dari 451.792 warga Timor Timur yang ikut pemilihan 344.580 orang (78,5%) memilih merdeka dan hanya 94.388 orang (21,5%) yang memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia.

Dari hasil tersebut maka resmi pulalah Timor Timur menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 20 Mei 2002 mereka memilih seorang presiden yang pertama. Meskipun Timor Timur telah menjadi sebuah negara yang merdeka, ternyata berdampak pada masalah politik, dan sosial ekonomi di masing-masing kedua negara. Semoga persoalan-persoalan yang masih tersisa untuk kedua negara cepat teratasi demi kedamaian rakyat Indonesia dan rakyat Timor Timur. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer

- N.N. (1996, Oktober 19). "Uskup Belo: Kemenangan Bagi yang Berkehendak Bagi Semua". *Detektif dan Romantika*. Hlm. 76.
- N.N. (1995, Mei 27). "Presiden Tentang Timor Timur Indonesia Takkan Mundur Selangkahpun". *Suara Karya*. Timor Timur 1995 Jilid I. Jakarta, CSIS. Hlm. 22.
- N.N. (1999, Maret 7). "Arwah Mengundang Pasukan PBB". *Gamma*. Hlm. 59.
- N.N. (1994, Januari 20). "Selama Repelita IV: Prioritas Pembangunan di Timor Timur 4 sektor". *Suara Karya*. Timor Timur 1994. Jakarta, CSIS. Hlm. 4.
- N.N. (1995, Mei 19). "Ada 18.000 Penganggur di Timor Timur". *Bisnis Indonesia*. Timor Timur 1996 Jilid I. Jakarta, CSIS. Hlm. 200.
- N.N. (1991, Maret 25). "Mutu angkatan Kerja di Timor Timur Perlu ditingkatkan". *Angkatan Bersenjata*. Timor Timur 1992 Jilid II. Jakarta, CSIS. Hlm. 110.
- N.N. (1976, Juni 16). "Surat Kabar Jerman Dukung Integrasi Timor Timur dengan RI". *Suara Karya*. Integrasi Timor Timur 1976 Jilid II. Jakarta, CSIS. Hlm. 109.
- N.N. (1996, Oktober 19). "Uskup Belo: Kemenangan Bagi yang Berkehendak Bagi Semua". *Detektif Dan Romantika*. Hlm. 79.
- N.N. (1999, Mei). "Kedamaian Tak Kunjung Datang di Timor Timur". *Intisari*. Hlm. 173.

N.N. (1999, Februari 8). "Wawancara Xanana Gusmau: Saya Kira 99 Persen Menginginkan Merdeka". *Tempo*. Hlm. 23.

N.N. (1999, September 12). "Kembali ke Titik Nol". *Forum Keadilan*. Hlm. 14.

N.N. (1999, September 11). "Jajak Pendapat di Timor Timur". *Gatra*. Hlm. 24.

N.N. (1999, September 12). "Kembali ke Titik Nol". *Forum Keadilan*. Hlm. 16.

N.N. (2002, Mei 19). "Timor Leste Merdeka, Punai dilepas Tanpa Pipit". *Kompas*. Hlm. 25.

B. Sumber Sekunder

Aboeprijadi Santoso, 1996. *Jejak-jejak Darah Tragedi dan Penghianatan di Timor Timur*. Yogyakarta: Pijar.

Aditjondro, George J, 2000. *Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau: Dampak Pendudukan Timor Lorosae dan Munculnya Perlawanan Gerakan Pro-Timor Lorosae di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak dan Fortilos.

Armindo Maia, 1979. *Proses Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur*. Yogyakarta: IKIP Sanata Dhrama.

Dewi Fortuna Anwar. (1999, Februari 8). "Habibie dan Timor Timur". *Tempo*. Hlm. 31.

Dewi Fortuna Anwar. (1999, Februari 8). "Habibie dan Timor Timur". *Tempo*. Hlm. 31.

Dua Puluh Tahun Timor Membangun (20 Years Developments of East Timor), 1996, Dili.

Gottschalk, Louis (terj. Nugroho Nutosusanto), 1986. *Mengerti Sejarah*. UI-Press.

- Hamid Rusdie, dkk, 1997. *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Timor Lorosae*. Yogyakarta: Kanisius.
- Helen Mary Hill, 2000. *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*. Dili: Yayasan Hak dan Sahe Institute For Liberation.
- Hikmahanto Jawana. (2002, Juni 3). "Tuntut Menuntut Aset Indonesia". *Kompas*. Hlm. 25.
- Joau Mariano de S.S, 1994. *Ekonomi Politik-Pembangunan Timor Timur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Klinker, Gerry van, 1996. *Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur Kini dan Prospek Perdamaian*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Lapian dan Chaniago, 1988. *Timor Timur Dalam Gerak Pembangunan*. Depdikbud.
- Lopes Da Cruz, 1999. *Kesaksian Aku dan Timor Timur*. Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae.
- Mahfud, MD, dkk, 2001. *Ibu Pertiwi Menangis Cegah Disintegrasi Bangsa*. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Mahmudin Noor, dkk. 1977. *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, Jakarta: Alamanak RI.
- Makmur Makka, 1999. B.J Habibie: *Kisah Hidup dan Kariernya*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Manning, Chris dan Peter Van Diemen, 2000. *Indonesia di Tengah Transisi Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. LKIS.
- Moedjanto, 1989. *Indonesia Abad ke-20 2*. Yogyakarta: Kanisius.

Purwadarminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai

Pustaka.

Rafa'at Nurdin, (1983, Januari 20). "Timor Timur Terus Bergerak
Membangun" *Antara*. Timor Timur 1983. Jakarta, CSIS. Hlm. 20

Ridwan Suryantho. (1983, Januari 20). "Timor Timur Mengejar
Ketertinggalannya". *Antara*. Timor Timur 1983. Jakarta, CSIS. Hlm. 5.

Roy Pakpahan, 1998. *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*.
Jakarta: Solidamor.

Rudini, 1989. *Profil Propinsi Republik Indonesia Timor Timur*. Jakarta: PT
Intermasa.

Saafoedin Bahar & A.B. Tangdililing (Ed). 1996. *Integrasi Nasional Teori,
Masalah dan Strategi*. Ikapi Ghalia Indonesia.

Sardi, Martino, (1999, Mei 14). *Timor Lorosae Merdeka dalam Pandangan Romo
Mangun Wijaya*. Makalah disampaikan di Roma.

Sartono Kartodirjo, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*.
Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.

Soekanto, 1976. *Integrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*. Jakarta: Bumi
Restu.

Sri-Edi Swarsono, 2001. *Reformasi Menjadi Deformasi Dari Lengser ke Lengser*.
Universitas Indonesia.

Sudirman HN. (2002, April 5). "Memulai Era Baru Hubungan RI-Timor
Lorosae". *Kompas*. Hlm.4.

Susilo Bambang Yudhoyono. (2002, Mei 15). "Indonesia-Timor Timur: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan". *Kompas*. Hlm. 28.

Taylor, John, G. 1990. *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur yang Dilupakan*. London.?

Timor Timur di Komisi Hak Asasi Manusia PBB, 1997. Jakarta: Komite Bersama Untuk Masyarakat Timor Timur.

Tomodok, E.M, 1994. *Hari-hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Timor Timur dalam Angka 1993. Dili: Bappeda Tk. I dan Kantor Statistik Propinsi Timor Timur 1994.

Winarno Surahmad. 1980. *Pengantar penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.

Yohanes (Ed), 2000. *Selamat Tinggal Timor Timur*. Insist Press.

Valens Doy. (2002, Mei 19). "Potret Lain Timor Lorosae". *Kompas*. Hlm. 32.

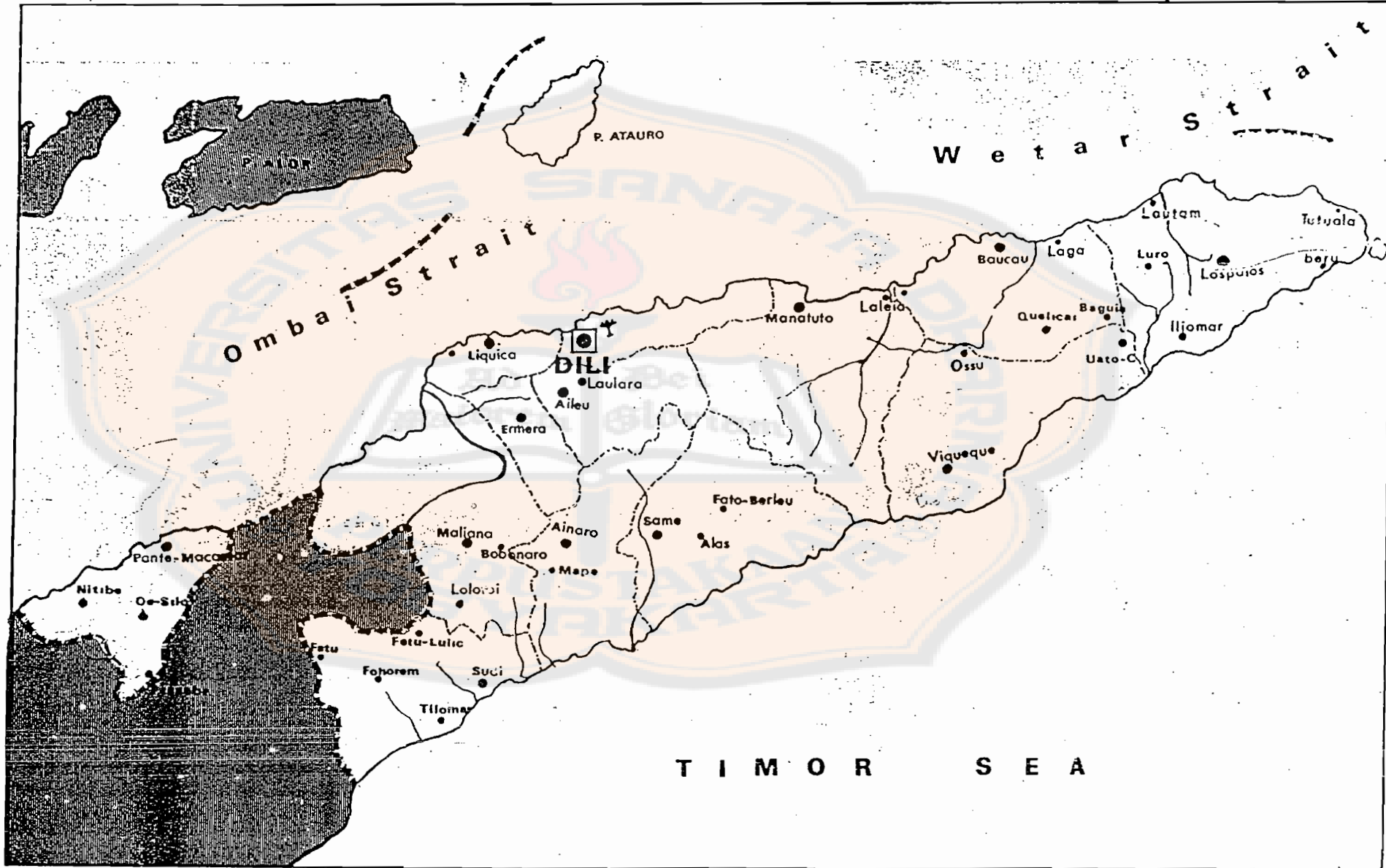
Zamora, (Ed. Gus Mielat), 1997. *Timor Timur Untuk Pemula*. Initiatives for International Dialog.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

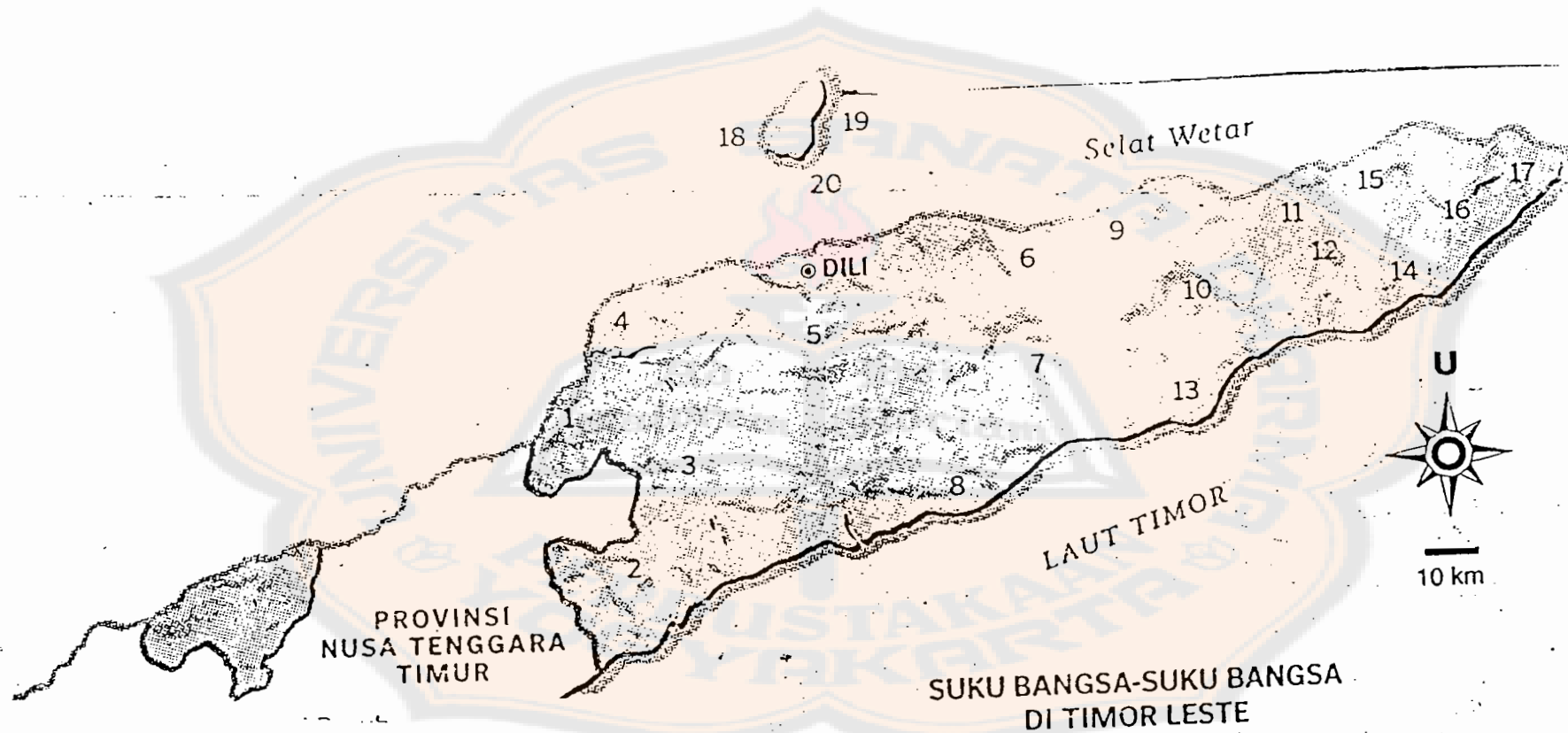


9

PROVINCE OF EAST TIMOR



SUKU BANGSA-SUKU BANGSA DI TIMOR LESTE

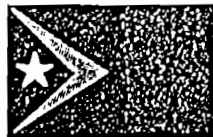


- | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 1. Kemak | 6. Ilimo | 11. Wajma'a | 16. Mambai |
| 2. Bunak | 7. Idate | 12. Samoro | 17. Makua |
| 3. Marobo | 8. Lakalei | 13. Naueti | 18. Adabe |
| 4. Takodede | 9. Caloli | 14. Makasai | 19. Baba |
| 5. Fataluku | 10. Belu | 15. Kairui | 20. Hahak |

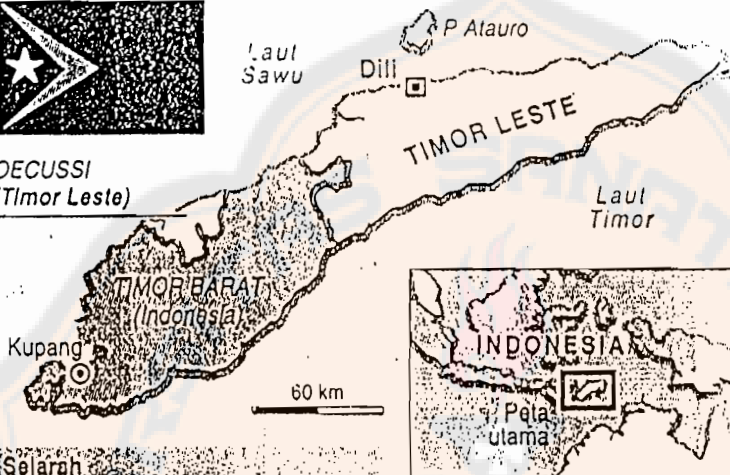
Sumber: "Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia" (1996)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Timor Leste menjadi bangsa terbaru dunia pada 20 Mei, setelah berabad-abad di bawah kekuasaan asing



OECUSSI (Timor Leste)



Populasi
740.000 jiwa
Luas Wilayah
14.615 km²
Agama

Timor Leste
Katolik 91%
Muslim 2%

Indonesia
Muslim 88%
Katolik 3%

Sejarah

1859 Traktat yang memberikan bagian timur Pulau Timor ke Portugal, dan barat ke Belanda

1975 Deklarasi kemerdekaan. Portugal menarik diri, Indonesia masuk

1976 Presiden Soeharto mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia ke-27

1999 PBB menyelenggarakan jajak pendapat -78,5% pemilih memilih merdeka. Aksi kekerasan pecah, disulut oleh milisi antikemerdekaan. PBB mengirimkan pasukan multinasional yang dipimpin Australia

untuk mengembalikan tatanan, dan kemudian menciptakan Pemerintahan Transisi untuk Timor Timur (UNTAET) dengan tugas menjalankan roda pemerintahan di wilayah ini, menyelenggarakan pemilu dan mempersiapkan kemerdekaan

2001 Pemilihan 88 anggota dewan untuk menyusun konstitusi

2002 Mantan pemimpin gerilya, Xanana Gusmao memenangkan 82.69 persen untuk menjadi presiden terpilih pertama Timor Leste

REUTERS

Kompas, 19 Mei 2002

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERJALANAN TIMOR TIMUR MENUJU KEMERDEKAAN

1566:
Portugis mulai berdagang dan menyebarkan agama ke kawasan Timor.

1652:
Setelah mengalahkan beberapa kerajaan lokal, Portugis mulai meletakkan dasar kekuasaan politik, agama, dan ekonomi di Timor.

1633:
Belanda mengusir pasukan Portugis dari Iuping dan Kawasan Timor Barat.

1749:
Perang Penfui pecah dan Timor terbelah. Belanda menguasai bagian barat dan Portugis menduduki bagian timur.

—26 Mei: Koalisi UDT dan Fretilin pecah.
—26 Juni: Pemerintah Portugal berunding dengan parpol-parpol Timor Timur di Maizo. Fretilin menolak hadir karena Portugal membolehkan pemerintah Indonesia mengirim pengamatnya ke pertemuan.

1 Juli: Portugal menetapkan Pemilihan Umum yang akan menentukan masa depan Timtim akan bertanggung pada tober. Kontrol pemerintah kolonial terhadap Timtim diletakkan akan berakhir pada 31 Oktober 1978.

9 Juli: Hasil pemilihan dewan lokal diumumkan. Fretilin berhasil memperoleh 55 persen suara pemilih.

1 Agustus: Partai UDT yang pro-Indonesia merebut kekuasaan dari tangan Partai di Dili. Para anggota Fretilin mulai di-

lah Timor diteken Australia dan Indonesia.

89:
Paus Paulus II berkunjung ke Timtim.

91:
21 November: Tentara Indonesia metak massa yang sedang berpawai dari Gereja Motael ke pemakaman Santa Cruz, Dili. Sedikitnya 85 pemuda Timtim tewas. Delegasi Portugal batal mengunjungi Timtim.

1992:
—20 November: ABRI menangkap pemimpin Organisasi Perlawanan Nasional Rakyat Timtim.

1911:
Raja Dom Boa Ventura dari Manufahi memberontak kepada Portugis.

1913:
Pemberontakan Raja Dom Boa Ventura dipadamkan Portugis.

1941:
Perang Dunia II pecah. Jepang menduduki seluruh Timor.

1945:
Perang Dunia II berakhir. Jepang yang kalah oleh Sekutu mengembalikan Timor Barat kepada Belanda dan Timor Timur kepada Portugis.

—27 Agustus: Fretilin berhasil merebut kekuasaan dari UDT. Gubernur Portugal di Timtim, Lemos Pires, mengungsi ke Pulau Atauro. Pasukan UDT terusir dari Dili dan kemudian terpaksa mengungsi ke wilayah Indonesia (NTT).

—28 November: Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timtim dan memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Timtim.

—30 November: Partai-partai UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista berkumpul di Balibo, Bobonaro, untuk membuat deklarasi yang menyatakan Timtim berintegrasi dengan Indonesia.

—7 Desember: ABRI mulai menyerbu Timtim.
—22 Desember: PBB meminta Indonesia

(CNRT) Xanana Gusmao.

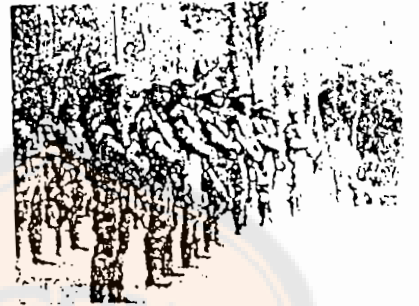
1993:
—21 Mei: Xanana Gusmao dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

1996:
—22 Maret: Warga prointegrasi dan prokemerdekaan Timtim berdialog di Austria.
—Desember: Uskup Carlos Ximenes Belo dari Dili dan Aktivistis CNRT di pengasingan, Jose Ramos Horta, menerima hadiah Nobel Perdamaian.

1997:
—13 Januari: Uskup Belo menyebut Timtim sebagai bagian dari Indonesia.

1998:
—21 Mei: Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah didesak massa dan mah-

1961:
Timor Timur dilepaskan sebagai Provinsi Seberang Lautan Portugal yang heribu kota di Dili.



mundur dari Timtim.

1976:
—13 Januari: Lopes Da Cruz dipilih sebagai presiden pemerintah daerah sementara Timtim.
—17 Juli: Pemerintah RI mengesahkan UU yang menetapkan Timtim sebagai provinsi ke-27 RI.

siswa. Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden Keempat RI.

—4-5 Agustus: PBB menggelar pertemuan tripartit antara RI, Portugal, dan CNRT untuk membahas status otonomi yang lebih luas bagi Timtim.

1999:
—11 Februari: Presiden Habibie menawarkan opsi kemerdekaan atau otonomi yang diperluas guna menyelesaikan masalah Timtim.

—21 April: Kesepakatan damai antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan ditandatangani.

—5 Mei 1999: PBB, Indonesia, dan Portugal sepakat untuk menggelar jajak pendapat (referendum) guna mengetahui keinginan rakyat Timtim.

1974:
Diktator Portugal, Marcello Caetano, tergelincir dalam kudeta yang dilancarkan sekelompok perwira militer Portugal pimpinan Jenderal Antonio De Spiriola. Sejak itu, rakyat Timor Timur dibenarkan mendirikan partai politik. Lalu, terbentuklah partai-partai UDT, ASDT (kemudian menjadi Fretilin), Apodeti, dan Kota.

1975:
—20 Januari: UDT dan Fretilin membentuk koalisi.
—Maret: Komite Deklarasi Parlemen Portugal menggelar pemilihan pertama.

1978:
—20 Januari: Australia mengancam kekuasaan Indonesia secara de facto atas Timtim.
—31 Desember: Ketua Fretilin Nicolao Lobato tewas ditembak ABRI.

1980:
—16 Mei: Vatikan menyatakan tak akan menerima Timtim sebagai bagian dari Indonesia.

1983:
Karena genjayan Fretilin terus berlanjut, Presiden Soeharto mengumumkan Keadayaan Darurat di Timtim.

1985:
Australia mengakui kedaulatan Indonesia di Timtim. Perjanjian eksplorasi minyak di-



—30 Juni 1999: Pertemuan Darurat digelar. Kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan bertekad menetapkan landasan bersama mencari solusi langgeng bagi masalah Timtim.

—30 Agustus: PBB menggelar referendum untuk mengetahui sikap rakyat Timtim terhadap opsi otonomi yang diperluas yang ditawarkan pemerintah RI.

MC. Dari berbagai sumber.



Peristiwa Penting di Timtim 1974-1999

25 APRIL 1974: Gerakan Angkatan bersenjata (Armed Forces Movement) melancarkan kup di Lisbon, Portugal, untuk menggulingkan rezim Caetano.

5 MEI 1974: Gubernur Timor Timur mengeluarkan pernyataan tentang pembentukan partai-partai politik.

11 MEI 1974: Unido Democratica Timorese (UDT—Serikat Demokratik Timor) dibentuk.

12 MEI 1974: Associacao Social Democratica Timorese (ASDT—Perhimpunan Sosial Demokratik Timor) didirikan.

17 JUNI 1974: Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengirim surat kepada perwakilan ASDT, Jose Ramos Horta, bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Timor Timur.

6 SEPTEMBER 1974: Perdana Menteri Australia Gough Whitlam bertemu dengan Presiden Soeharto di Wonosobo, Jawa Tengah, dan menyatakan setuju bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia tidak dapat dihindari.

12 SEPTEMBER 1974: ASDT diubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin—Front Revolusioner bagi Kemerdekaan Timor Timur).

14 OKTOBER 1974: Indonesia melancarkan Operasi Komodo.

20 JANUARI 1975: UDT dan Fretilin membentuk koalisi.

26 MEI 1975: UDT menarik diri dari koalisi dengan Fretilin.

11 AGUSTUS 1975: UDT melancarkan kup di Dili dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Portugal.

27 AGUSTUS 1975: Gubernur dan Pemerintah Portugal angkat kaki dari Dili ke Pulau Atauro.

24 SEPTEMBER 1975: UDT meninggalkan Timor Timur menuju Timor Barat (NTT) dan membiarkan Fretilin sebagai penguasa Timor Timur.

6 OKTOBER 1975: Pasukan Indonesia menyerang dan merebut Batugade, se-

buah kota di perbatasan Timor Timur dengan NTT.

28 NOVEMBER 1975: Fretilin mengumumkan Timor Timur sebagai negara merdeka.

29 NOVEMBER 1975: Tokoh UDT, Apodeti, dan KOTA menandatangani deklarasi yang secara resmi mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia. Deklarasi ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo.

7 DESEMBER 1975: Militer Indonesia menyerang Timor Timur.

22 DESEMBER 1975: Dewan Keamanan PBB menyerukan Indonesia untuk menarik angkatan bersenjata dari Timor Timur.

13 JANUARI 1976: Setelah menduduki Dili, Baucau, dan daerah perbatasan, Indonesia mendirikan pemerintahan yang terdiri dari anggota-anggota Apodeti dan UDT.

3 APRIL 1976: Pemberontakan anggota UDT di Dili dihancurkan oleh militer Indonesia.

22 APRIL 1976: Dewan Keamanan PBB kembali menyerukan Indonesia untuk keluar dari Timor Timur.

15 MEI 1976: Fretilin mengadakan konferensi nasional selama dua minggu untuk mengatur perlawanan terhadap Indonesia.

17 JULI 1976: Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

19 NOVEMBER 1976: Majelis Umum PBB menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur.

7 MEI 1977: Pasukan Fretilin mengklaim bahwa mereka menguasai 80% wilayah Timor Timur.

28 NOVEMBER 1977: Majelis Umum PBB menolak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dan menyerukan penentuan nasib sendiri dilaksanakan.

20 NOVEMBER 1978: Majelis Umum PBB menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur.

16 AGUSTUS 1985: Dalam pidato HUT ke-40 UDT, Presiden Soeharto memban-

kan invasi ke Timor Timur sebagai respons terhadap gerakan rakyat Timor Timur yang membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.

18 AGUSTUS 1985: Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Timur.

9 DESEMBER 1985: Pemerintah Indonesia dan Australia mengumumkan bahwa mereka akan mengembangkan minyak di Celah Timor.

5 NOVEMBER 1988: Presiden Soeharto mengumumkan delapan dari 13 kabupaten di Timor Timur dibuka bagi orang Indonesia dan asing.

12 NOVEMBER 1991: Penembakan terhadap demonstran di pemakaman Santa Cruz.

20 NOVEMBER 1992: Xanana Gusmao ditangkap, dengan tuduhan sebagai otak demonstrasi di Santa Cruz.

20 JULI 1993: Pemerintah Indonesia memberi jalan bagi perundingan antara orang Timor Timur yang pro dan anti-integrasi.

27 JANUARI 1999: Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa Indonesia akan melepas Timor Timur bila otonomi ditolak. Pernyataan itu dikeluarkan setelah Sidang Kabinet Terbatas Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin Presiden Habibie.

5 MEI 1999: Pemerintah Indonesia, Portugal, dan PBB menyetujui kesepakatan untuk menyelesaikan kasus Timor Timur lewat jajak pendapat.

11 JUNI 1999: Dewan Keamanan PBB membentuk misi perdamaian untuk Timor Timur atau UNAMET. Misi ini sebagai pelaksanaan misi pendapat.

30 AGUSTUS 1999: Pelaksanaan jajak pendapat bagi warga Timor Timur di seluruh dunia.

4 SEPTEMBER 1999: Hasil jajak pendapat diumumkan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di New York. Kabupaten merdeka meraih 78,5% suara, dan pro-integrasi/otonomi meraih 21,5%.

1. Laporan: Dili, 10 September 1999, Suara Timor Timur, 10 September 1999, www.suaratimortimor.com